

BELAJAR HARMONI BERAGAMA DARI DESA



DEWA AGUNG GEDE AGUNG
AHMAD MUNJIN NASIH

Belajar Harmoni Beragama dari Desa

BELAJAR HARMONI BERAGAMA DARI DESA

Dewa Agung Gede Agung
Ahmad Munjin Nasih



Universitas Negeri Malang

Anggota IKAPI No. 059 / JTI / 89

Anggota APPTI No. 002.103.1.09.2019

Jl. Semarang 5 (Jl. Gombong 1) Malang, Kode Pos 65145

Telp. (0341) 562391, 551312 psw 1453

Agung, D.A.G., & Ahmad, M.N.

Belajar Harmoni Beragama dari Desa – Oleh: Dewa Agung Gede Agung & Ahmad Munjin Nasih– Cet. I – Universitas Negeri Malang – 2020.

xii, 154 hlm; 21 x 29,7 cm

ISBN: 978-602-470-179-6

BELAJAR HARMONI BERAGAMA DARI DESA

Dewa Agung Gede Agung

Ahmad Munjin Nasih

-
- Hak cipta yang dilindungi:

Undang-undang pada : Penulis

Hak Penerbitan pada : Universitas Negeri Malang

Dicetak oleh : Universitas Negeri Malang

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis.
Isi diluar tanggung jawab Penerbit.

- Universitas Negeri Malang
Anggota IKAPI No. 059/JTI/89
Anggota APPTI No. 002.103.1.09.2019
Jl. Semarang 5 (Jl. Gombong 1) Malang, Kode Pos 65145
Telp. (0341) 562391, 551312; psw. 1453
-

- Cetakan I : 2020
-

PENGANTAR PENULIS

Berkat Rahmat Tuhan Yang Mahaesa tulisan ini akhirnya dapat terselesaikan. Tulisan ini berawal dari keprihatinan penulis terhadap kondisi negara Indonesia yang sudah berumur 74 tahun yang sebentar lagi akan berulang tahun emas di tahun 2045. Dengan umur tersebut kalau dianalogkan dengan manusia adalah umur yang sudah kenyang akan asam garam. Semua itu sudah dibuktikan dengan perjalanan sejarah bangsa, paling tidak sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Banyak kejadian yang dialami, berbagai tantangan dihadapi tetapi tetap saja Indonesia berdiri dengan simbol-simbol negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Begitu juga dengan terjadinya peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan konflik agama. Layaknya manusia, jumlah usia seseorang tidak menunjukkan kedewasaan seseorang. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata tuanya umur suatu negara tidak menjamin kedewasaan warganegaranya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Seharusnya setiap warga negara Indonesia sudah tidak lagi berkutat dengan sentimen agama, berbau SARA seharusnya sudah memahami hakekat agama dalam kehidupan keragaman keberagaman, apalagi mempunyai sikap bermusuhan dengan penganut agama yang lain. Tentu itu sangat bertentangan dengan pesan agama apapun dan tentu bertentangan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.

Berdasarkan Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di mana terdapat 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa di Indonesia. Dengan data tersebut, desa tentu mempunyai jumlah yang paling banyak sehingga peran desa sangat penting di berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk perannya dalam kehidupan yang harmonis. Inilah yang menyebabkan penulis memberi judul “Belajar Harmoni dari Desa”. Itulah kenyataan yang penulis ketahui berdasarkan penelitian. Konflik agama umumnya terjadi di daerah-daerah perkotaan yang katanya banyak terdapat orang-orang pintar dengan tingkat pendidikan pamuncak. Mereka harus belajar dari desa tentang yang satu ini. Peranan semua pihak sejak dini sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan empati dengan

perbedaan. Dalam hal ini peranan orang yang paling dekat dengan anak-anak adalah orang tua dan guru.

Penulis melihat peranan guru sangat penting karena dalam tatanan empirik anak-anak didik lebih menurut pada guru dari pada orang tuanya. Akhir-akhir ini situs di media sosial terkit dengan wacana kebencian terhadap penganut agama yang berbeda sangat mengganggu. Begitu juga viral disalah satu Sekolah Dasar Negeri yang mana gurunya memperkenalkan tepuk pramuka "Tepuk Pramuka Islam Yes Kafir No" !. Karena sebagai insan pendidik dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai Perguruan Tinggi (PT), terlebih guru-guru agama dalam menyayikan materi agamanya tidak hanya mengedepankan doktrin-doktrin agama, tetapi diposisikannya sebagai "Pendidikan Agama". Agama sebagai Pendidikan tentu yang disampaikan adalah nilai-nilai yang menyangkut perilaku, baik dalam hubungannya dengan yang Maha Kuasa yang diyakininya dan dengan sesama manusia, bahkan dengan semua makhluk ciptaan-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Nurcholis, A., & M. Dja'far, A. (2014) bahwa, "Pluralisme adalah paham, sikap terbaik untuk mengelola dan menyongsong anugerah keberagaman (pluralitas). Sebuah sikap yang berpandangan, bahwa manusia beragama dialah manusia yang mencintai Tuhan, adalah mustahil mencintai Tuhan tanpa mencintai ciptaan-Nya"

Karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para informan, apakah itu tokoh agama, masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, khususnya di Malang Raya, Jawa Timur dan Kabupaten Bangli, Bali . Merekalah yang banyak memberikan informasi secara jujur sehingga tersusunnya tulisan ini. Mudah-mudahan bantuan baik para informan mendapat imbalan yang setimpal dari Tuhan yang Mahaesa. Sebaliknya kami penulis minta maaf kalau selama berinteraksi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Harapan kami sebagai penulis, buku ini bermanfaat bagi kita semua.

SALAM BHINEKA TUNGGAL IKA !

KATA PENGANTAR

Kami bangga dan bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karuniaNya, akhirnya kolega kami Dr. Dewa Agung Gede Agung dari Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Dr. Ahmad Munjin Nasih dari Jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul **Belajar Harmoni Beragama dari Desa**. Buku ini disusun dari beberapa kali hasil penelitian di kantong-kantong penganut minoritas agama Hindu di Kabupaten Malang dan Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangli Bali, berbagai macam kajian literature, serta diskusi ilmiah dengan para ahli yang dilakukan para penulis untuk memperkaya isi buku ini.

Di negara yang sangat beragam seperti Indonesia ini buku buku Belajar Harmoni Beragama dari Desa diharapkan bisa menjadi model atau rujukan untuk kajiiah ilmiah dalam mengembangkan penelitian serupa dan panduan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara singkat, karya ini berupaya untuk menggiring pembaca agar menyadari bahwa nilai-nilai luhur kearifan local dan dan implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting dilakukan.

Semoga dengan terbitnya buku ini bisa berarti, bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan beberapa pihak bagi banyak pembaca, terutama untuk akademisi, maupun para praktisi untuk membangun bangsa yang lebih baik. Dan tidak hanya sebagai wawasan teoritis saja bagi pembaca, tetapi juga bisa menginspirasi pembaca untuk mengaplikasikan sebagai warga Negara Indonesia yang baik.

Malang, 20 Februari 2020
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR FOTO	X
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERBHINEKA	7
2.1. KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.....	7
2.2. KONFLIK AGAMA	11
2.3. INTEGRITAS BANGSA.....	30
2.4. PLURALISME AGAMA DALAM PESPEKTIF ISLAM.....	34
2.5. MAKNA PLURALISME	35
2.6. DISTRIBUSI AYAT-AYAT PLURALISME AGAMA DALAM AL-QUR'AN	37
2.7. KELOMPOK PENDUKUNG PLURALISME AGAMA	40
2.8. KELOMPOK PENOLAK PLURALISME AGAMA	48
2.9. ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN KELOMPOK PENDUKUNG DAN PENOLAK PLURALISME AGAMA	52
2.10. PLURALISME AGAMA DALAM PESPEKTIF HINDU	55
2.11. WISATA DAN TOLERANSI.....	66
BAB III HARMONI BERAGAMA DARI DESA DI MALANG RAYA	71
3.1. KONDISI GEOGRAFIS MALANG RAYA	71
3.2. BUKTI AWAL HARMONISASI HUBUNGAN ANTAR AGAMA DI MALANG RAYA (DALAM PERSPEKTIF HISTORIS).	72
3.3. KIAMAT PARA TOKOH ISLAM DAN HINDU DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA.....	77
3.4. BENTUK-BENTUK INTERAKSI SOSIAL ANTARA UMAT MUSLIM DAN HINDU DI MALANG RAYA DALAM MENCIPTAKAN INTEGRITAS BANGSA	81
BAB IV HARMONI BERAGAMA DARI DESA DI KABUPATEN BANGLI, BALI	101
4.1. KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN BANGLI, BALI.....	101
4.2. KONDISI SOSIAL-BUDAYA.....	103
4.3. KONDISI EKONOMI	111
4.4. KIAMAT PARA TOKOH HINDU DAN MUSLIM DI KABUPATEN BANGLI, BALI DALAM MEMBANGUN KEHIDUPAN "MENYAMA BRAYA"	114
4.5. BENTUK-BENTUK KEHIDUPAN "MENYAMA BRAYA" ANTARA MASYARAKAT HINDU DAN MUSLIM DALAM MEMBANGUN TOLERANSI BERAGAMA	119
BAB V PENUTUP	142
5.1. KESIMPULAN	142
5.2. SARAN	144
DAFTAR RUJUKAN	146
SINOPSIS	154

DAFTAR FOTO

FOTO 3.1: TK BHAKTI PERSADA (YAYASAN HINDU)	86
FOTO 3.2: PERAYAAN HUT RI DI DUSUN JUNGGO, KOTA BATU.....	87
FOTO 3.3 : UMAT HINDU DAN MUSLIM BERSAMA-SAMA MEMBANGUN PURA GIRI.....	92
FOTO 3.4: SESEPUH DUSUN KARANG TENGAH MEPIMPIN UPACA PETIK PADI.....	95
FOTO 3.5: SETELAH UPACARA PETIK PADI MASYARAKAT (HINDU DAN ISLAM) BERSAMA-SAMA MENIKMATI HIDANGAN DI SAWAH... 	96
FOTO 3.6: SALAH SATU JENIS SESAJEN YANG DITANCAPKAN DI SUDUT SAWAH.....	98
FOTO 3.7: UPACARA BERSIH DESA SEBAGAI PELAKSANAAN “BUDAYA ADAT NALURI”	99
FOTO 4.1: TUGU MASUK KOTA BANGLI	102
FOTO 4.2: MUSHOLA DI DESA SIDEMBUNUT	120
FOTO 4.3: TEMPAT WUDLU DI PURA LANGGAR	121
FOTO 4.4: SUMBANGAN SAPI OLEH WAKIL BUPATI	124
FOTO 4.5: PAPAN NAMA PURA DALEM JAWA	125
FOTO 4.6: PURA LANGGAR DARI ARAH TIMUR LAUT	127
FOTO 4.7: KOLAM YANG TERDAPAT DISEKITAR PURA JAWA	130
FOTO: 4.8: SPANDUK UCAPAN HARI RAYA IDUL FITRI OLEH PHDI BALI DI DEPAN MASJID AGUNG BANGLI.....	132
FOTO: 4.9: LANGGAR DAN PURA YANG BERDEKATAN DI DUSUN ANGAN SARI DESA KUTUH	139
FOTO 4.10: MAKAM UMAT MUSLIM BERDAMPINGAN DENGAN UMAT HINDU DI DESA BEBALANG.....	140

DAFTAR PETA

PETA 3.1. PETA JAWA TIMUR DAN LETAK WILAYAH MALANG RAYA.....	72
PETA 4.1: PULAU BALI DAN LETAK KABUPATEN BANGLI	101

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu problem besar yang dihadapi bangsa Indonesia belakangan ini adalah munculnya pelbagai masalah yang menjurus kepada disintegrasi bangsa, dimana salah satu faktor pemicunya adalah konflik horizontal yang bernuansa agama. Kondisi ini sudah barang tentu harus menjadi perhatian seluruh elemen bangsa agar tidak berkembang ke arah yang tidak diinginkan. Dilihat dari akar budaya bangsa Indonesia, konflik yang mengatasnamakan agama, sulit untuk menemukan justifikasinya. Sebab para leluhur dan nenek moyang bangsa telah mewariskan tatanan kehidupan yang saling menghargai dalam keragaman budaya, etnis dan agama antara satu dengan yang lain. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil anak bangsa yang memanfaatkan sentimen agama dan kesukuan untuk kepentingan politik dan agenda terselubung lainnya.

Dalam kurun beberapa tahun belakangan kekerasan atas nama agama sering mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Entah ia muncul sebagai akibat hubungan antar umat beragama yang tidak dibarengi sikap toleran, atau ia sengaja diciptakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya konflik antar agama lebih banyak disebabkan faktor ekonomi dan faktor politik, di samping juga adanya usaha sengaja dari kelompok yang ingin mempertahankan atau meraih status sosial yang lebih baik.

Sebenarnya konflik semacam ini tidak populer, lucu bagi Indonesia yang begitu bangga dengan predikat sebagai negara religius, agamais dan sebagainya. Predikat tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab moral bagi pemeluk agama di Indonesia untuk melaksanakan ajaran agama yang maha suci dan mulia tersebut. Dalam kenyataannya sampai sekarang masih banyak ditemui konflik-konflik agama sehingga predikat sebagai negara “religious” bisa berubah menjadi “misterius”. Setiap orang tahu bahwa, setiap agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Kongfuchu pada dasarnya tidak pernah mengajarkan umatnya berbuat aniaya terhadap umat lain. Tetapi sayangnya, agama yang mengajarkan perdamaian tak jarang dijadikan legitimasi untuk mengganggu, memusuhi bahkan memusnahkan umat lain.

Kenyataan ini seharusnya menjadi refleksi buat kita semua. Ada yang salah dalam menyampaikan ajaran agama yang maha suci dan mulia tersebut oleh oknum tertentu. Masih banyak terdapat retorikan wacana keagamaan yang disampaikan oleh pemuka agama baik melalui kutbah-kutbahnya maupun melalui media sosial yang mempunyai kemampuan olah kata sedemikian rupa yang dengan mudah diterima oleh pendengarnya. Dan tidak jarang wacana tersebut bernuansa propokatif sehingga menanamkan kebencian dengan umat beragama yang berbeda. Mereka ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang “pintar berkata-kata bijak”, tetapi “tidak mampu berperilaku bijak”. Seorang penganut agama atau keyakinan tertentu sudah harusnya mengatakan agama atau keyakinannya yang terbaik, tetapi tidak mengatakan agama atau keyakinan orang lain lebih jelek, tidak masuk sorga dan sebagainya. Hal semacam inilah yang menyebabkan munculnya konflik karena “orang telah menyadari dirinya jelek sekalipun tidak mau dikatakan jelek”, apalagi apa yang diyakini tersebut benar dan dikatakan jelek, tidak masuk sorga dan sejenisnya, semua itu merupakan bentuk dari intimidasi agama.

Dalam konteks Indonesia, konflik antar umat beragama (baca; Islam dan Kristen) seperti yang terjadi di Ambon dan Poso adalah salah satu bukti nyata bahwa ajaran agama dijadikan sebagai alat pembenar bagi pemeluknya untuk melakukan tindakan permusuhan dan pembunuhan terhadap pemeluk agama lain. Kenyataan ini jelas sangat bertentangan dengan esensi ajaran agama itu sendiri yang selalu mengajarkan cinta kasih dan perdamaian. Contoh konflik bernuansa agama antara Islam dan Kristen seperti yang terjadi di Ambon dan Poso, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada agama-agama yang lain, seperti antara Islam dan Hindu, Islam dan Budha, serta Kristen dengan Hindu atau Kristen dengan Budha. Hal ini bisa difahami mengingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dengan pemeluk agama yang beragam. Belum lagi perbedaan suku dan ras, bisa jadi faktor ini juga berpotensi memperkeruh suasana konflik agama. Inilah sebagai diameter bahwa keragaman sebagai kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di Dunia, tetapi kalau salah kelola akan menjadi petaka. Orang Indonesia sudah waktunya keberagaman hendaknya disikapi sebagai kelebihan yang dimiliki sebagai modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural*

capital), bahkan sebagai modal agama (*religious capital*) dalam melaksanakan relasi sosial.

Namun demikian, perbedaan sebagai biang konflik tidak akan terjadi apabila masyarakat dan bangsa Indonesia mampu menumbuhkan sikap toleransi diantara umat beragama. Bahkan bukan sekedar toleransi yang secara etimologis berarti hanya mengakui perbedaan, tetapi “empati” yaitu mengakui dan mau menerima perbedaan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Perlu dikembangkan sikap inklusif yang kecenderungan cara berpikir mau mengakui kebenaran yang dimiliki orang agama orang lain. Cara berpikir semacam ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar dan keyakinannya tidak tergoyahkan oleh faktor-faktor eksternal. Tidak sebaliknya yaitu bersikap eksklusif yang kecenderungan menganggap dirinya paling baik dan yang lainnya tidak baik, akibatnya mereka akan selalu membatasi diri untuk melakukan praktik sosial dalam perbedaan.

Jika dilihat dari potensi konflik sebenarnya konflik agama di Indonesia tidak hanya antara Islam dan Kristen, dalam masyarakat Hindu menyimpan potensi konflik yang tidak kecil. Pasca ledakan bom Bali tahun 2002 yang menghancurkan ekonomi Bali, terdapat perkembangan yang mengkhawatirkan kehidupan beragama, yakni tumbuhnya kelompok milisi yang disebut dengan *Pecalang*. Kelompok ini pada awalnya adalah polisi tradisional yang menjaga keamanan upacara adat/agama, namun dalam perkembangannya mereka juga melakukan *sweeping* terhadap orang-orang pendatang yang tidak mempunyai KTP/KIPEM/KIPP yang sah. Sementara itu, para pendatang yang rata-rata berasal dari Jawa, mereka adalah pemeluk agama Islam. Satu sisi hal semacam ini juga dapat dimaklumi karena peristiwa bom Bali tersebut sangat mempengaruhi kondisi ekonomi kepariwisataan, apalagi kepariwisataan merupakan andalan ekonomi di Bali. Di bulan Nopember 2015 di Bali, terdapat berita yang viral di media sosial terkait rencana pendirian Desa Syariah oleh Umat Islam yang mendapat reaksi dari kelompok Hindu. Bulan Agustus 2019 di Bali terjadi viral, bahwa polisi melakukan rasia bagi masyarakat setempat (Hindu) berpakaian adat tanpa helm kemudian di tilang, tetapi tidak berlaku bagi masyarakat (Islam) yang pergi jumatun walaupun

tanpa memakai helm. Kondisi inilah yang berpotensi menciptakan konflik agama antara Islam dan Hindu.

Dalam kurun beberapa tahun belakangan kekerasan atas nama agama sering mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Entah ia muncul sebagai akibat hubungan antar umat beragama yang tidak dibarengi sikap toleran, atau ia sengaja diciptakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. Jika ditelaah lebih dalam, sesungguhnya konflik antar agama lebih banyak disebabkan faktor ekonomi dan faktor politik, di samping juga adanya usaha sengaja dari kelompok yang ingin mempertahankan atau meraih status sosial yang lebih baik. Untuk mengantisipasi berkembangnya konflik yang lahir dari perbedaan agama ataupun konflik yang sengaja diciptakan atas nama Tuhan, salah satu cara yang sangat efektif adalah menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama dengan mengembangkan sikap toleran di antara mereka. Apabila konflik agama tidak diberikan perhatian serius dari semua pihak, maka bangsa Indonesia akan menghadapi persoalan besar, yakni disintegrasi bangsa dan carut marutnya NKRI.

Malang Raya yang terdiri dari Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu adalah wilayah yang terkenal dengan pendidikan, industri, dan kepariwisataannya yang sangat cepat berkembang, termasuk juga dalam bidang keagamaan. Mobilitas penduduk yang sangat tinggi dari dan ke Malang Raya sangat tinggi yang secara otomatis juga membawa berbagai kebudayaan dan agama yang dianutnya. Akibatnya, dilihat dari sudut pandang pengembangan agama, Malang Raya merupakan wilayah yang sangat dinamis. Di Malang Raya terdapat lembaga pendidikan agama yang berskala nasional dan internasional. Sebut saja ada UIN Malang dan ratusan Pondok Pesantren, puluhan Seminari dan Sekolah Teologi, termasuk Sekolah Teologi Salem dan Sekolah Al Kitab Asia Tenggara, STAH (Sekolah Tinggi Agama Hindu), Yayasan Trimurti, dan Sekolah Tinggi Agama Budha. Berdasarkan pengamatan penulis, selama ini secara umum bisa dikatakan bahwa hubungan antar umat beragama di wilayah Malang Raya berjalan dengan baik, namun tidak dipungkiri muncul riak-riak kecil yang bisa mengganggu keharmonisan hubungan tersebut. Kasus yang katanya pelecehan Al-Qur'an yang terjadi di Batu oleh sekelompok umat Kristiani pada tahun 2006 dan isu pembakaran salah satu pura Kota Malang tahun 2007 oleh sekelompok orang yang

tidak bertanggungjawab, sempat menimbulkan kekhawatiran akan adanya kerusuhan yang bernuansa agama. Namun berkat kesigapan pihak berwenang menangani kasus tersebut dan terbangunnya komunikasi dan interaksi sosial yang baik antar tokoh agama, persoalan tersebut dapat diatasi. Selain fakta diatas, hal menarik lainnya dari pengamatan penulis, bahwa arah konflik yang bernuansa agama yang terjadi di Malang Raya hanya terjadi antara umat Muslim dan Kristiani, sementara antara umat lain, seperti antara umat Islam dengan Hindu, Buddha hampir belum terdengar, mudah-mudahan tidak terjadi !!!.

Beberapa tulisan relasi agama biasanya yang dikedepankan adalah sisi konflik saja, selanjutnya mencari solusi pemecahannya yang dituangkan dalam bentuk produk model toleransi. Tetapi dalam tulisan ini, penulis berpijak pada kondisi yang sebaliknya. Bahwa di Malang Raya maupun di Kabupaten Bangli, Bali, melihat dari sisi harmoni yang terjadi antar pemeluk agama. Kondisi semacam ini perlu digali, mengapa hal bisa terjadi, patut dicari dan dipelajari mengapa benturan-benturan kepentingan yang bernuansa agama khususnya antara umat Islam dan Hindu di kedua wilayah tersebut tidak terjadi. Bagaimana pula kiat para tokoh mereka mengelola potensi konflik menjadi potensi kebersamaan sehingga tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat dengan saling menghormati, saling berempati dan menghargai perbedaan yang ada. Studi mengenai hal-hal yang terkait dengan kehidupan beragama yang harmonis antara pemeluk Islam dan Hindu di Malang Raya dan di Kabupaten Bangli, Bali akan banyak memberikan manfaat bagi komunitas beragama di Indonesia, setidaknya hal itu bisa menjadi sumber inspirasi bagi umat lain dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di lingkungan mereka masing-masing, secara khusus dan integrasi bangsa secara umum. Menurut penulis kedua wilayah ini menarik karena di Malang Raya yang mayoritas adalah Umat Islam, sebaliknya Umat Hindu pada posisi minoritas. Sebaliknya di Kabupaten Bangli, Bali, yang mayoritas adalah Umat Hindu dan Umat Islam pada posisi minoritas.

Tulisan ini adalah hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif rancangan studi kasus. Rancangan ini menghasilkan teori dengan generalisasi lebih luas dan lebih umum penerapannya untuk kasus harmonisasi hubungan antar umat beragama khususnya umat Islam dan Hindu di Malang Raya dan Kabupaten Bangli, Bali.

Studi kasus yang digunakan rancangan studi kasus observasional dan multi situs, dimana penulis hadir di daerah kantong-kantong komunitas masyarakat Hindhu dan Muslim yang tersebar di beberapa kecamatan di Malang Raya dan di Kabupaten Bangli, Bali untuk melihat lebih dekat bagaimana mereka membangun toleransi beragama dalam perbedaan.

BAB II

INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERBHINEKA

2.1. Kerukunan Umat Beragama

Berbicara mengenai kerukunan umat beragama, ada baiknya dimulai dengan pembicaraan mengenai asal-usul agama yang berkembang di Indonesia. Sebab, pengetahuan yang memadai mengenai asal-usul agama, dapat memberikan landasan berfikir yang logis mengenai pentingnya hidup rukun antar umat beragama itu sendiri.

Konsep awal yang harus difahami dalam hubungannya dengan asal usul agama yang ada di Indonesia, bahwa tidak ada satupun agama besar yang berkembang dan diakui oleh pemerintah sampai saat ini murni berasal dari Indonesia. Semua agama, apakah Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katholik (Nasrani) dan Konghuchu adalah berasal dari luar Nusantara. Namun demikian, pada perkembangannya agama-agama tersebut dapat diterima dan berkembang di Indonesia melalui perjalanan panjang dengan melakukan serangkaian proses akulturasi dan adaptasi dengan unsur-unsur lokal yang berkembang di masyarakat. Ini artinya sebelum datangnya agama-agama tersebut, Indonesia sudah memiliki system social, budaya, dan system religi.

Pada saat kedatangan agama Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia tidak nihil dari system kepercayaan walaupun pelaksanaannya masih sangat sederhana. System kepercayaan yang dikenal kala itu adalah dalam bentuk kepercayaan animisme dan dinamisme (Subagya, 1981, pp. 66-68). Begitu juga saat kedatangan agama Islam pada abad ke 7 M pada masa Kerajaan Sriwijaya, masyarakat Indonesia telah menganut agama Budha dan Hindu. Indikasi yang menguatkan hal ini bahwa pada abad ke 7 M, telah berdiri kerajaan Sriwijaya yang nota bene para rajanya menganut agama Budha. Fakta lain bahwa masyarakat Indonesia telah menganut agama Hindu dan Budha pada saat kehadiran Islam, bisa dilihat dari fakta sejarah bahwa para wali/sunan, sebagai penyebar agama Islam, mencoba menggunakan budaya lokal seperti wayang, gending-gending Jawa, sebagai media penyebaran agama Islam (Lombard, 2005, pp. 340-341).

Indonesia dengan pluraritas agama yang ada, menyimpan potensi yang besar untuk menciptakan harmoni yang indah dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah tatanan masyarakat yang penuh saling pengertian dan kerjasama dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Idealitas ini pada dasarnya bukanlah sesuatu berlebihan mengingat dalam setiap agama terkandung ajaran moral yang bersumber dari kitab suci dan selalu menjadi pedoman bagi para penganutnya dalam setiap berperilaku. Ajaran moral yang selalu mengedepankan aspek kebersamaan dan tidak saling merugikan. Ajaran moral tersebut selaras dengan fakta bahwa manusia, apapun agama, suku, dan latar belakangnya adalah makhluk sosial, yakni makhluk Tuhan yang tidak akan mampu hidup dalam kesendirian dan selalu membutuhkan keterlibatan orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Hanya saja dalam praktik kehidupan masih banyak terdapat perilaku yang sebaliknya karena kurang difahaminya ajaran agama yang dianutnya. Kelompok ini biasanya hanya memosisikan kitab suci sebatas tekstual (*erklaren*), bukan kontekstual (*verstehen*).

Namun demikian, ajaran moral yang sarat akan pesan-pesan ke-Tuhanan dalam realitasnya perlu didukung dengan argumen rasional. Sebagai contoh ketika agama melarang membunuh, berdusta, mencuri, dan perbuatan jelek lainnya, maka perlu dihadirkan argumen rasional mengapa hal itu tidak diperbolehkan. Sebaliknya ketika terdapat ajaran agama yang memperbolehkan membunuh, berdusta, mencuri, dan perbuatan jelek lainnya, maka perlu juga dihadirkan argumen rasional mengapa, kapan, dimana, kepada siapa, dan dalam keadaan seperti apa hal itu diperbolehkan. Selain itu kesadaran dari dalam untuk berinteraksi normal merupakan hal sangat penting. Kesadaran, niat, dan komitmen untuk bersatu merupakan kunci untuk hidup berdampingan antar penganut agama yang berbeda, sehingga memunculkan rasa kebangsaan yang sejati (Soekarno, 1965, pp. 3-4). Ini berarti hendaknya mulai dari dalam diri sendiri (*faktor internal*), disamping adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengkondisikan (*faktor eksternal*) kesadaran hidup berdampingan dengan siapapun, termasuk pemeluk agama lain harus selalu ditumbuhkan. Kesadaran demikian perlu selalu ditumbuhkan, mengingat bahwa dunia ini adalah plural, baik agama, suku, dan etnis. Semua itu adalah kodrat yang tidak mungkin dapat disamakan satu dengan yang lain. Pemerintah sudah mengatur

semua itu sebagai regulasi dalam kehidupan harmonis antar umat beragama, yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 29.

Oleh karena itu, prinsip bahwa “berbeda adalah rahmat” sangat tepat dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Sebagai pengejawantahan dari pernyataan tersebut hendaknya diikuti dengan cara berpikir dan berperilaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti melihat baik atau tidaknya seseorang bukan dari agama yang dianutnya, tetapi dari perilaku mereka kepada sesama. Demikian juga masuk tidaknya seseorang ke surga sebagaimana dijanjikan dalam setiap agama, juga dilihat dari seberapa besar amal kebaikan mereka di dunia sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang dianutnya. Begitu juga hendaknya adanya kesadaran yang dalam akan perbedaan tersebut adalah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, karena mengabaikan semua itu sama artinya dengan mengingkari keputusan Sang Pencipta. Masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat semi feodal dan semi kolonial. Semi feodal, adanya orang atau kelompok dominasi dan sub-dominasi. Kelompok-kelompok dominasi mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat sampai saat ini. Mereka adalah aktor atau agen dalam masyarakat, mereka adalah tokoh-tokoh struktural dan kultural. Dalam kondisi yang plural tersebut tokoh-tokoh ini hendaknya mampu menyampaikan dan memperkenalkan nilai-nilai harmonis yang terdapat dalam kitab suci agama masing-masing dalam kotbah-kotbahnya, sehingga tidak hanya berbicara sorga dan neraka belaka. Kelompok dominasi inilah mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat sebagai kelompok sub-dominasi sehingga apapun yang dikatakan atau disampaikan perlu berhati-hati, tidak menanamkan kebencian demi keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semi kolonialisme, masih terdapat masyarakat yang tidak disadari kalau dirinya di jajah oleh bangsa asing, sehingga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alinea pertama dengan tegas mengatakan ”bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahana di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Begitu juga sampai sekarang kita punya motto bahwa ”anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestinya”. Dari segi bentuk dikenal ada ”bentuk kuno” dengan ”Tri G” (*Gold, Gospel, dan Glory*), sedangkan

imperialisme dan kolonialisme mempunyai dua prinsip yaitu, mencari sumber bahan mentah dan mencaai tempat pemasaran. Imperialisme dan kolonialisme jenis ini tidak memperhatikan prinsip penyebaran agama yang penting adalah penguasaan ekonomi. Hal ini bisa dicontohkan dengan sejarah kedatangan bangsa asing di Indonesia. Berdasarkan pandangan Groeneveldt dalam *Historical Notes on Indonesia and Malaya*, bahwa sebelum kedatangan India, bangsa Cina sudah terlebih dahulu menginjakkan kakinya di Indonesia yang diperkirakan sejak tahun 132 SM (Groeneveldt, 1960). Namun berdasarkan tinggalan arkeologis yang lebih nampak adalah peninggalan budaya dan agama Hindu-Buddha dari India. Cina dalam konteks ini mempunyai prinsip seperti Imperialisme modern yaitu tidak memperhatikan penyebaran budaya dan agama, tetapi penguasaan ekonomi. Dari segi manifestasinya, ini yang perlu di waspadai karena manifestasinya bukan saja secara materiil (ekonomi, militer), tetapi bersifat non-materiil seperti budaya, bahkan tidak mustahil adalah agama. Karena kalau tidak hati-hati akan menjadi orang Indonesia secara fisik namun secara phisikis menjadi orang lain. Dengan keyakinan dan budaya akan mengkonotasikan dirinya menjadi bangsa lain. Di satu sisi terdapat orang yang ingin mempertahankan dirinya menjadi diri sendiri dengan keyakinan dan budaya Indonesia. Namun sisi lain terdapat seseorang atau sekelompok orang yang ingin mensintesiskannya antara kepercayaan dan budaya yang diyakini baik yang berasal dari luar dan dalam Indonesia. Kondisi seacam ini kalau tidak disipaki secara cerdas akan menyebabkan terbentuknya front yang menjadi embrio konflik horizontal.

Masyarakat sipil (*civil society*) diperlukan dalam kondisi seperti ini, tipe masyarakat seperti ini mempunyai kemampuan berpikir memilah dan memilih yang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan dalam praktik sosial baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga bangsa. Berdasarkan beberapa referensi masyarakat sipil adalah masyarakat yang berpikir reformis bahkan berpikir dekonstruksi terhadap suatu keniscayaan. Masyarakat sipil biasanya mempunyai beberapa ciri, diantaranya demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah

masyarakat yang demokratis. Dalam konteks pluratias agama, seorang tokoh muslim sufi Jalal al-Din Rumi, sebagaimana dikutip (Rahman & Munawar, 2006) berpendapat:

"Meskipun ada bermacam-macam agama, tujuannya adalah satu. Apakah Anda tidak tahu bahwa ada banyak jalan menuju ka'bah?...Oleh karena itu, apabila yang Anda pertimbangkan adalah jalannya maka sangat beraneka ragam dan sangat tidak terbatas jumlahnya; tetapi apabila yang Anda pertimbangkan adalah tujuannya, maka semuanya terarah hanya pada satu tujuan."

Sejalan dengan pandangan Rumi, dalam kitab Weda yang menjadi pegangan umat Hindu dinyatakan *ekam sat viprah bahudha vadanti* "Tuhan hanya satu, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama". Pandangan ini menegaskan bahwa untuk mengenal dan menuju Tuhan banyak jalan bisa dilalui. Karena itu, umat Hindu selalu berusaha memahami keberadaan agama lain dengan prinsip bahwa perbedaan agama hanyalah perbedaan dalam memilih jalan menuju Tuhan. Dua pandangan di atas (pandangan Jalal al-Din Rumi dan rumusan dalam Weda), setidaknya dapat dijadikan sebagai dasar pijakan berfikir bahwa setiap pemeluk agama hendaknya selalu berusaha mencari dasar argumentatif yang bersumber dari kitab suci masing-masing untuk melihat sisi-sisi kesamaan, dan bukan perbedaan. Kalaupun harus berbicara mengenai siapa yang layak masuk surga atau nirwana, selayaknya yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana sikap dan perilaku mereka dengan alam dan kepada orang lain (Asghar, 2008).

2.2. **Konflik Agama**

Konflik merupakan bagian yang selalu ada dalam sejarah kehidupan umat manusia. Masyarakat sebagai entitas penuh dengan dinamikanya, disitulah keunikannya masyarakat sehingga tidak dapat dipisahkan antara konflik dan integritas. Inilah menariknya masyarakat, yang terpenting bukan bagaimana menghilangkan konflik, tetapi bagaimana mencari jalan keluar mengakhiri konflik, bahan konflik sebagai media untuk integrasi atau konsensus. Semua ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang cerdas. Perlu diketahui tingkat kecerdasan seseorang tidak selalu paralel dengan tingkat pendidikan seseorang. Sepanjang masih ada kehidupan mustahil untuk menghilangkan konflik di muka bumi ini,

karena setiap orang atau kelompok punya kepentingan akan etnis, suku, agama, politik dan sebagainya (Chang, 2003, pp. 27-28). Menurut Etzioni (Santoso, 2003, p. 163) salah satu penyebab terjadinya konflik adalah kekuasaan. Kekuasaan sering dimaknai sebagai kemampuan untuk mengatasi sebagian atau semua perlawanan, dan untuk melakukan perubahan-perubahan pada pihak yang berseberangan pandangan. Kondisi inilah yang memicu konflik, sebab pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan akan berupaya melakukan pembalasan atas apa yang menimpa dirinya yang dilakukan oleh penguasa.

Kehidupan di dalam masyarakat penuh dengan dinamika, apalagi dalam masyarakat demokratis-sosial yang modern, barangkali kegiatan politik tidak dapat dipisahkan dari macam-macam tingkah laku karena banyak tindakan yang mempunyai efek-efek atau akibat-akibat politik yang bersifat positif maupun negatif sebagai bentuk dinamika kehidupan dalam masyarakat (Lloyed, 1987, pp. 11-12). Menurut Santoso bahwa kata dinamika berasal dari bahasa Yunani *dynamics* yang bermakna “kekuatan”. Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lainnya secara keseluruhan (Santoso S. , 2004, p. 5). Menurut Turner bahwa kehidupan “sosial” itu bercirikan sebuah “dinamika” antara solidaritas (proses-proses yang menyebabkan kita bersama-sama hingga membentuk suatu komunitas) dan kelangkaan (proses-proses yang memecah belah berbagai komunitas) (Turner, 2012, p. xxxv). Badudu, Zein, dinamika sosial berarti masyarakat yang selalu bergerak, berubah dengan segala permasalahannya baik kemajuan maupun kemunduran (Badudu & Zain, 1996, p. 354). Young and Durlauf, masyarakat secara tradisional biasanya bercirikan sifat-sifat kebersamaan, tetapi dalam perkembangannya akan terjadi perubahan, perkembangan yang bercirikan dinamika dan inilah ciri dari model interaksi sosial sekarang dan dimasa yang akan datang (Young & Durlauf, 2001, p. 77).

Individu kecenderungan berperilaku menghasilkan kolektif sosial yang kemudian dikenal dengan masyarakat, dalam kolektif sosial yang lebih besar ini akan menyebabkan munculnya perilaku yang dinamis, inilah disebut dinamika yang terus terjadi dari waktu ke waktu (Salganik & D.J, p. 1). Dinamika sosial akan

terjadi pada setiap jaringan sosial baik diciptakan atau secara spontan, baik dalam berperilaku maupun dalam percakapan sehari-hari (Wyatt & Kautz, 2007, pp. 1-3). Dinamika sosial berfokus pada perilaku baik di tingkat individu maupun kolektif, dan mengakui pentingnya heterogenitas seluruh individu. Dinamika sosial adalah membahas tentang persoalan bagaimana masyarakat-masyarakat berkembang dari tahap yang satu kepada tahap yang lain, suatu gerakan yang bersifat evolutif atau revolutif (Ankersmit, 1984, pp. 54-55). Karena itu dinamika sosial dapat diamati dan masuk akal pada masa tertentu dan tidak dapat dipakai untuk mengadakan ramalan mengenai masa depan. Senada dengan pandangan Soekanto bahwa masyarakat majemuk yang hidup saling berdampingan tentu mengalami proses interaksi, karena semakin besar tingkat keragaman di dalam masyarakat maka semakin dinamis juga hubungan-hubungan sosial yang terjadi (Soekanto, 2006, p. 58). Dinamika sebagai realitas kehidupan dalam masyarakat dipengaruhi berbagai hal, baik itu objek atau subjek. Objek hal-hal yang bersifat materiil (kebendaan) dan subjek adalah aktor (*agent*), keduanya bersifat sinergis yang saling melengkapi. Menurut John Law dalam teori jaringan aktor, bahwa aktor tersebut bisa saja dalam bentuk manusia maupun bukan manusia (Turner, 2012, p. 231). Banyak teori sosial, terutama yang berhubungan dengan sosiologi struktural memandang para agen tidak banyak memiliki pengetahuan, padahal yang benar adalah sebaliknya (Giddens, 2010, p. xxxiv).

Berbicara kehidupan di dalam masyarakat dengan segala perbedaan yang ada pasti terjadi dinamika, walaupun di dalam masyarakat yang homogen karena etnis, agama atau kebudayaan yang sama. Setiap orang baik sebagai individu maupun kelompok pasti memiliki *interest*, hal ini yang menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi dinamis, terjadi dialektika yang saling mengkritisi, menyalahkan, membenarkan, dan saling mendukung. Dalam kondisi semacam ini, mungkin dipermukaan terlihat kehidupan sangat harmonis. Tetapi sebaliknya dalam interaksi sosial akan terjadi dikotomi yang menyebabkan konflik. Di dalam masyarakat yang heterogen dengan berbagai perbedaan, termasuk perbedaan agama konflik tidak dapat dihindari, namun tidak selalu nampak atau ditampakkan dengan berbagai strategi yang dilakukan. Kalau kondisi semacam ini dibiarkan maka akan

berbahaya dalam interaksi kedepan, ibaratkan gunung es dan tidak mustahil akan terjadi *chaos*.

Dalam teori sosiologi terdapat *grand theory* yang selalu bertolak belakang yaitu antara Teori Struktural Fungsional dan Teori Struktural Konflik. Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi dekonstruksi terhadap kedua teori tersebut, bahwa dalam masyarakat tidak selalu konflik, begitu juga sebaiknya dalam masyarakat tidak selalu fungsional. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis sampaikan juga bagaimana kedua teori tersebut yang pada awalnya bersifat *binner*, akhirnya dapat disintensikan bahwa antara konflik dan fungsional adalah dinamika, bahkan dapat dikatakan kodrat dalam masyarakat.

Teori struktural fungsional melihat kehidupan yang kasat mata, empirik sifatnya, yaitu kehidupan yang serba teratur, integritas yang tinggi, dan teori konflik untuk melihat realitas di balik realita yang tidak kasat mata, karena konflik tidak selalu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang bersifat destruktif. Berbicara teori struktural fungsionalisme akan teringat pada kajian yang bersifat positivistic yang menekankan pada pentingnya struktur yang mempengaruhi individu, cara pandangnya terkait dengan ilmu-ilmu alam (*Naturwissenschaften*), *erklaren*, yang kebenaran bersifat universal. Namun dalam perkembangannya bisa juga dipakai oleh ilmu-ilmu sosial (*Geisteswissenschaften*), *verstehen*, dalam rangka memahami realita sosial sehingga penekanannya pada pentingnya individu yang mempengaruhi struktur.

Begitu juga dengan teori struktural fungsional seperti pandangan Comte, masih relevan melihat realitas masyarakat yang bersifat empirik atau kasat mata. Bahwa melihat masyarakat yang baik, atau seperti apa masyarakat yang normal, yang disumbangkan adalah fenomena keutuhan sosial. Struktural fungsional diawali dengan gagasan keseimbangan sosial dengan konsep keseimbangan sosial, integrasi sosial, kohesi sosial atau keadaan masyarakat yang mapan. Comte melihat masyarakat sebagai suatu jenis organisme, yaitu organisme sosial yang terkadang memberi istilah “fisika sosiologi” (Turner & Maryanski, 2010, pp. 7-9). Manusia merupakan seluruh sistem biologis yang memiliki tangan, kaki, jantung, mata, hidung dan sebagainya. Keseluruhan bagian tersebut harus berfungsi baik sesuai dengan bagiannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Apabila terdapat salah

satu bagian tidak berfungsi maka manusia akan mengalami abnormal atau sakit, demikian juga dengan masyarakat (Martono, 2014, p. 35).

Begitu juga dengan Spancer (Turner & Maryanski, 2010, pp. 23-24), teori struktural fungsionalisme, bahwa perubahan struktur itu melibatkan fungsi struktur bagi keutuhan sosial, karena itu kebutuhan organisme sosial itu sangat penting untuk menentukan mengapa suatu struktur itu harus ada dan harus tetap bertahan. Menurutnya ciri masyarakat menurut teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat merupakan suatu sistem, dan merupakan suatu keutuhan yang koheren atas bagian-bagian yang saling berhubungan.
2. Sistem ini hanya bisa dipahami berdasarkan cara kerja struktur khusus, yang masing-masing berfungsi untuk mempertahankan keutuhan sosial
3. Sistem memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, jika sistem tersebut ingin tetap hidup.
4. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait, bukan suatu yang kontroversial, namun pemahaman terhadap bagaimana sistem itu berfungsi berdasarkan cara kerja kebutuhan sistem dan bagian sistem tersebut merupakan ciri-ciri analisis fungsional.

Struktural Fungsionalisme Durkheim, bahwa kebutuhan masyarakat agar tetap bertahan adalah integrasi, atau memperlihatkan solidaritas diantara bagian-bagian komponennya. Dia melihat masyarakat sebagai kesatuan sosial yang saling terhubung dengan sifat-sifat mereka yang khas, sifat-sifat yang merupakan “fakta sosial” yang sui generis, atau unik, bagi mereka (Scott, 2001, p. 79). Secara umum pokok-pokok pikiran Durkheim (Wirawan, 2012, p. 47) tentang masyarakat dalam perspektif fungsional adalah sebagai berikut; 1) setiap masyarakat secara relatif bersifat langgeng, 2) setiap masyarakat merupakan struktur elemen yang terintegrasi dengan baik, 3) setiap elemen di dalam suatu masyarakat memiliki satu fungsi, yaitu menyumbang pada bertahannya sistem itu, dan 4) setiap struktur sosial berfungsi didasarkan pada konsensus nilai di antara para anggotanya. Di lain pihak Durkheim mengatakan, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memunculkan masyarakat dengan solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Hal ini menyebabkan meningkatnya kepadatan dinamis (*dynamic density*),

hal semacam ini yang menyebabkan terjadinya konflik (Turner & Maryanski, 2010, p. 36).

Pandangan Ferdinand Tonnies (Soekanto, 2006, pp. 144-147) sebagai contoh klasik tetapi masih relevan sampai sekarang kalau kita berbicara tentang kehidupan masyarakat dalam perspektif teori struktural fungsional. Menurutnya, terdapat dua jenis masyarakat salah satu diantaranya adalah masyarakat Paguyuban (*Gemeinschaft*). Masyarakat tipe ini adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat kekal. Karena itu dalam masyarakat Paguyuban mempunyai beberapa ciri pokok yaitu; 1) *unimite*, hubungan menyeluruh yang mesra, 2) *private*, hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja, dan 3) *exclusive*, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja tidak untuk orang lain di luar “kita”. Menurutnya di dalam setiap masyarakat selalu dapat dijumpai salah satu diantara tiga tipe Paguyuban, yaitu:

- a. Paguyuban karena ikatan darah (*Gemeinschaft by blood*), yaitu Paguyuban yang merupakan ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan.
- b. Paguyuban karena tempat tinggal (*Gemeinschaft of place*), yaitu Paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong.
- c. Paguyuban karena jiwa, fikiran (*Gemeinschaft of mind*), merupakan suatu Paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggalnya tidak berdekatan, akan tetapi mereka mempunyai jiwa dan fikiran yang sama, ideologi yang sama.

Dengan segala kelemahannya, teori struktural fungsionalisme telah lama memperoleh peran penting dalam ilmu-ilmu sosial, tidak hanya karena keunggulannya sebagai suatu bentuk teorisasi, namun juga karena dorongan empiris yang diberikannya. Struktural Fungsionalisme dalam sosiologi berperan juga melahirkan kumpulan hasil kerja penelitian yang penting. Hendaknya disadari bahwa pemikiran fungsionalis juga berperan melahirkan kumpulan kerja penelitian yang penting, walaupun tetap berkeyakinan bahwa fungsionalis secara konseptual pengaruhnya sangatlah merusak. Karena itu konsekuensi-konsekuensi tidak disengaja dari pandangan struktural fungsionalisme sangat mungkin sekali

dipelajari dengan menggunakan konsep-konsep, teori-teori tanpa fungsionalis (Giddens, 2010, p. xxxv). Menurut Lakatos (Veerhaak & R.H, 1987, p. 168), bukan teori tunggal yang harus dinilai sebagai ilmiah, melainkan rangkaian teori-teori. Rangkaian teori-teori itu sendiri dihubungkan satu dengan yang lain sebagai rangkaian kontinuitas yang menyatukan teori-teori tersebut menjadi program-program riset (*research programmes*). Pandangan ini memberikan peluang adanya komparasi teori dalam melihat realita sosial. Begitu juga dengan teori struktural fungsionalis, bisa dikomparasikan dengan teori konflik.

Teori konflik menekankan adanya perbedaan dalam mendukung suatu sistem sosial. Menurut teori ini, masyarakat terdiri atas individu yang masing-masing memiliki berbagai kebutuhan keinginan yang tidak terbatas. Namun kemampuan individu untuk mendapatkan kebutuhan berbeda-beda, perbedaan kemauan inilah yang melahirkan konflik (Martono, 2014, p. 35). Max Weber, konflik adalah mempunyai posisi sentral dalam menganalisis kehidupan masyarakat. Baginya, konflik merupakan unsur dasar kehidupan manusia. Pertentangan tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan budaya manusia. Orang memang dapat mengubah sarananya, objeknya, arah dasar ataupun pendukungnya, akan tetapi orang tidak dapat membuang konflik itu sendiri (Wirawan, 2012, pp. 66-70). Terdapat beberapa asumsi yang mendasari teori Marx ini adalah:

1. Manusia tidak memiliki kodrat yang persis dan tetap;
2. Tindakan, sikap dan kepercayaannya individu tergantung pada hubungan sosialnya, dan hubungan sosialnya tergantung pada situasi kelasnya dan struktur ekonomis masyarakatnya;
3. Manusia tidak mempunyai kodrat, lepas dari apa yang diberikan oleh posisi sosialnya;
4. Dalam suatu sistem pasti ada benih-benih konflik kepentingan;
5. Konflik adalah fakta sosial;
6. Konflik merupakan suatu gejala yang ada dalam setiap sistem sosial;
7. Konflik sangat mungkin terjadi terhadap distribusi sumber daya yang terbatas;
8. Konflik merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem sosial

Teori yang lain adalah dari Weber yang mengistilahkan konflik sebagai suatu sistem “otoritas” atau sistem “kekuasaan”. Kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasi. Kedua ini harus diintegrasikan antara kekuasaan dan otoritas untuk menemukan kebutuhan semua sistem. Tindakan manusia itu di dorong oleh kepentingan-kepentingan, bukan saja kepentingan materiil seperti yang dikatakan oleh Marx, melainkan juga oleh kepentingan-kepentingan idel. Karena itu antara konflik dan integrasi akan terjadi dalam masyarakat. Pandangan ini diperkuat juga oleh Simmel (Wirawan, 2012, p. 81), bahwa dalam kehidupan sosial, individu tidak hanya mau melibatkan diri dalam konflik, tetapi bersemangat untuk konflik.

Seperti beberapa pandangan tentang dinamika di depan, bahwa masyarakat penuh dengan dinamika yang disebabkan karena kepentingan, baik yang bersifat *individual interest* maupun yang bersifat *common interest*. Kondisi ini menyebabkan kehidupan terkadang terjadi konflik yang diekspresikan atau tidak, bahkan sebaliknya masyarakat menjadi romantis. Menurut Lawer (Wirawan, 2012, p. 43), bahwa integrasi yang sempurna di dalam masyarakat tidak pernah ada, sehingga di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan, walaupun terkadang bisa dinetralisir lewat pelembagaan. Begitu juga di dalam realitas masyarakat, konflik sebagai hal yang harus ada dan kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Adanya perbedaan kekuasaan dapat dipastikan menjadi sumber konflik dalam sebuah masyarakat. Kelompok-kelompok kepentingan yang berbeda dalam sistem sosial akan saling mengejar tujuan yang berbeda dan saling bersaing yang kemudian menyebabkan mekanisme *social disorder* (Wirawan, 2012, p. 59).

Menurut Pruitt dan Rubin, bahwa sejak jaman dahulu kala konflik, telah menarik untuk diteliti, sejak abad ke-19 telah membuat gebrakan yang dramatis dan enerjik, yang dampaknya masih dapat dirasakan sampai sekarang (Pruitt & J.Z., 2011, p. 12). Konflik bukan saja menyangkut hal-hal yang bersifat materiil, tetapi juga menyangkut ide (Wirawan, 2012, p. 69). Ide, pikiran adalah bersifat sentral dalam diri manusia yang memengaruhi tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niat. Charles Darwin, tertarik mengenai perjuangan yang dilakukan suatu species untuk bertahan hidup. Sigmund Freud, mempelajari tentang

perang antar berbagai kekuatan psikodinamika untuk mengontrol Ego yang terjadi dalam diri seseorang. Dan Karl Marx, mengembangkana analisis politis dan ekonomi berdasarkan asumsi bahwa konflik adalah bagian yang takterelakan dalam sebuah masyarakat. Semua sejarah atau peristiwa digerakkan dan diarahkan oleh konflik antara kelas-kelas properti dan ketidakpunyaan alat-alat produksi (Scott, 2001, p. 129). Charles Tilly, tindakan-tindakan yang bersifat bersama (*collective action's*), tentu maksudnya termasuk konflik didasari tiga hal pokok yang fundamental yaitu; 1) kepentingan (*interest*), 2) kapasitas (*capacity*), dan kesempatan (*opportunity*). Menurut penulis, masih ada faktor lain yang ikut mempengaruhi terjadi tindakan konflik, diantaranya *power* (kekuatan), *threat* (ancaman), dan *facility* (dukungan), baik dalam bentuk materil maupun non materii. Tentu dalam pencapaian ini tidak bisa lepas dari peranan aktor (*agent*), sebagai bentuk tindakan sosial (Tilly, 1981, p. 46).

Menurut Weber, bahwa terdapat tindakan *afektif* dalam intaraksi sosial yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi orientasi-orientasi emosional si aktor (*agent*) dan tindakan-tindakan tradisional yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun (Tones, 2012, p. 115). Aktor bisa muncul dari siapa saja yang penting mereka mempunyai pengaruh dan panutan di masyarakat dalam berpikir, berkata dan bertindak. Mereka bisa berasal dari kelompok bangsawan secara geneologis, agamawan, birokrat, pemuka masyarakat karena kedudukannya sebagai pimpinan-pimpinan masyarakat atau adat. Secara umum mereka dapat dikatakan sebagai kelompok *cultural* dan *struktural*. Berbeda dengan pandangan Felix Bourdieu dalam teorinya *struktural konstruktif*, dia menolak dominasi subjek (*actor* atau *agent*) atau *structure* (objek) dalam menentukan tingkah laku manusia (Lubis, 2014, pp. 102-113). Struktur (objek) yang dimaksudkan disini dapat berupa aturan, hukum, pola, alam sebagai tempat tinggal yang secara tidak sadar mempengaruhi pratik sosial dan tindakan individu. Konsep “dualitas” yang disampaikan oleh Gidden, mendapat posisi penting dalam hal ini. Bahwa struktur sebagai perangkat aturan dan sumber daya yang terorganisasikan secara rutin berada diluar ruang dan waktu, tersimpan dalam koordinasi dan instansinya dalam bentuk jejak-jejak ingatan dan ditandai dengan ketidakhadiran si subjek. Sebaliknya, sistem sosial yang secara rutin melibatkan

struktur terdiri dari aktivitas-aktivitas tertentu para agen manusia dan diproduksi disepanjang ruang dan waktu (Giddens, 2010, p. 40).

Tindakan individu tidak bisa dilepaskan dari struktur atau yang kolektif, sintesis dan dialektika antara struktur objek dengan fenomena subjek yang akan terlihat melalui praktik hidup sehari-hari. Maka tindakan seseorang merupakan perpaduan antara dimensi objektivitas dan subjektivitas, antara dimensi struktur dengan agensi. Dengan teori ini diharapkan dapat merefleksikan unsur-unsur realitas masyarakat, termasuk problem yang berasal dari objek dan subjek penelitian. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya dinamika dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan dua pandangan tersebut di atas, Felix Bourdieu melihat sisi lemah dari pandangan Weber atau anti tesis terhadap pandangan Weber. Dalam konteks ini pandangan Antony Giddens bisa dipakai untuk menengahinya sebagai hasil dari sintesa yaitu dengan teori strukturasi-nya.

Giddens mengatakan bahwa teori strukturasi, sebagai domain dasar kajian ilmu-ilmu sosial bukanlah semata-mata ditentukan oleh pengalaman-pengalaman aktor ataupun keberadaan setiap bentuk totalitas kemasyarakatan, melainkan praktik-praktik sosial yang terjadi sepanjang ruang dan waktu. Perkembangan semua itu saling terkait antara aktivitas-aktivitas sosial karena peran aktor dan struktur, termasuk alam yang berkembang biak sendiri (Giddens, 2010, p. 3). Dikatakan juga bahwa dunia modern sangat cepat berlari dan lepas kendali, karena itu kita memerlukan analisis yang terus-menerus agar dapat mengendalikannya sendiri (Plumer, 2013, p. 90).

Menurut Pruitt dan Rubin, tidak memungkiri juga bahwa terdapat sisi positif dari konflik yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas (Pruitt & J.Z., 2011, pp. 14-15). Adapun sisi positifnya adalah; 1) konflik adalah persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial, 2) konflik sosial adalah konflik yang memfasilitasi tercapainya konsolidasi atas berbagai kepentingan. Kebanyakan konflik tidak berakhir dengan kemenangan di salah satu pihak dan kekalahan di pihak lainnya, tetapi akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat integritas yang menguntungkan kedua belah pihak dan sering sekali memberikan manfaat kolektif yang lebih besar, 3) konflik dapat mempererat persatuan kelompok. Karena itu masyarakat yang menentang konflik biasanya tidak berhasil melakukan perubahan

yang dibutuhkan, dan menekan timbulnya inovasi dan kreativitas. Terpenting adalah pemilihan strategi dalam menyelesaikan konflik.

Dalam perkembangannya bahwa konflik dan fungsional adalah dinamika dalam masyarakat. Kedengarannya memang aneh, bertolak belakang bagaimana teori struktural fungsional yang mengedepankan keteraturan, integritas dalam masyarakat, bisa dikomporasikan dan dielaborasi dengan teori konflik yang berkonotasi dengan hal-hal yang bersifat serba tidak teratur dan tidak mapan. Alfred Whitehead mengatakan, bahwa “sebuah ilmu pengetahuan yang ragu untuk melupakan pendirinya maka akan hilang atau tenggelam”, karena sosiologi seharusnya meninggalkan keterikatannya dengan teori-teori pendahulunya yang dianggap tidak sesuai lagi. Tapi pandangan ini ditolak oleh Ronald Fletcher, bahwa memang benar dunia sudah berubah, tetapi “sebuah ilmu pengetahuan apabila melupakan para pendirinya akan tenggelam, atau paling tidak, akan menghadapi banyak kesulitan (Scott, 2001, pp. 1-3). Menurut penulis, pandangan Ronald Fletcher masih relevan, seperti halnya dengan teori struktural fungsional dan struktural konflik masih tetap dipakai yang sesuai dengan realita sosial, baik dalam tatanan makro, mezo maupun mikro. Realita masyarakat sekarang semakin kompleks akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga teori-teori terdahulu perlu dikomparasikan, dielaborasi dalam rangka menangkap realita sosial pada jamannya. Ramlan Surbakti mengatakan, tidak ada teori yang lahir tanpa dipengaruhi oleh teori lain sebelumnya. Sebagai contoh, analisis fungsional yang kemukakan oleh Robert King Merton tidak akan dapat difahami apabila kita belum membaca teori struktural-fungsional dari Talcot Parsons. Karena Merton mengemukakan teorinya sebagai koreksi atas pengembangan terhadap Parsons. Teori konflik kelas Ralf Dahrendorf hanya akan dapat dipahami apabila kita sudah membaca teori konflik kelas Karl Marx, karena Ralf Dahrendorf merumuskan teorinya sebagai koreksi dan pengembangan terhadap teori konflik kelas Karl Marx (Surbakti, 2010, pp. xv-xvi).

Seperti disampaikan di depan bahwa, dalam membicarakan teori struktural fungsional, tokoh-tokoh diantaranya adalah August Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Ferdinand Tonnies. Tokoh-tokoh ini dengan teori evolusinya menyadari bahwa masyarakat akan berkembang yang tentunya mempunyai konsekuensi-

konsekuensi, termasuk konflik. Comte dengan hukum tiga tahap yaitu; teologi, methafisika, dan positif. Begitu juga dengan Durkheim dengan mengamati perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat Industri. Pembagian kerja masyarakat tradisional (solidaritas mekanik) masih sederhana, adanya kesamaan antar anggota masyarakat, sedangkan masyarakat industri (solidaritas organik) dinamikanya sangat kompleks. Spencer yang menggambarkan masyarakat dari tipe masyarakat homogen (tradisional) menuju tipe masyarakat heterogen (modern). Tonnies, dengan konsep *Gemeinschaft*, adalah masyarakat dengan ikatan masyarakat yang kuat, didasarkan atas kesamaan, sedangkan *Gesellschaft*, masyarakat dengan ikatan masyarakat yang lemah, tidak saling mengenal (Martono, 2014, pp. 40-53). Dalam perkembangan masyarakat tersebut di atas akan berdampak dan punya konsekuensi polarisasi kepentingan, cara berpikir masyarakat. Kalau kondisi ini tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan konflik.

Fungsional dan konflik tidak dapat dihindari dalam masyarakat. Terkadang dalam masyarakat yang terlihat teratur, harmonis, integratif belum tentu begitu adanya di dalam masyarakat yang heterogen. Dan sekecil apapun perbedaannya, apalagi perbedaan keyakinan (baca:agama) yang hidup dalam satu lingkungan masyarakat dalam waktu yang lama. Perjuangan untuk merealisasikan kepentingan yang menyebabkan konflik, hanya saja konflik tersebut tidak selalu bersifat revolusi, perang, atau yang peristiwa sejenis yang kasat. Karena berbicara konflik tidak selalu bersifat fisik yang nampak, tetapi bisa bersifat psikhis, perasaan konflik yang tidak nampak. Semua ini sangat tergantung pada individu atau sekelompok individu dalam menyikapi konflik. Menurut Parson bahwa masyarakat selalu berkembang, dan inilah yang menyebabkan terjadinya dinamika interaksi. Sistem sosial tidak statis, tetapi selalu berubah dan menyesuaikan. Masyarakat selalu terlihat sisi harmoni, stabil, kebersamaan dan status quo, padahal tidak begitu adanya. Akhirnya Parson memformulakan lima pola variabel masyarakat tradisional *vesus* modern, yang mempengaruhi model interaksi mereka (So, 1990, pp. 20-22), yaitu:

MASYARAKAT TRADISIONAL	MASYARAKAT MODERN
<p>1. Afektifitas (<i>affective</i>), yaitu hubungan antar anggota masyarakat didasarkan pada kasih sayang. hubungan komponen yang efektif, pribadi, emosional, dan saling berhadapan, begitu juga hubungan antara buruh dengan majikan.</p>	<p>1. Netralitas efektif (<i>Affective-neutral</i>), yaitu bersikap netral bahkan dapat menuju sikap tidak memperhatikan orang lain/lingkungan. hubungan komponen sosial tidak efektif, sangat pribadi, pemisahan, tidak langsung, ada jarak tegas antara majikan dengan buruh.</p>
<p>2. Partikularisme (<i>Particularistic</i>), yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang khusus berlaku untuk suatu daerah tertentu saja, ada hubungannya dengan perasaan subyektif dan rasa kebersamaan. Dalam masyarakat tradisional, siklus sosial dengan anggota yang sama. Contoh bekerja dibantu oleh tetangga, begitu juga kalau membeli sesuatu ditetangga. Semua transaksi dilakukan dengan saling percaya dan kesepakatan tanpa dokumen tertulis.</p>	<p>2. Universalisme (<i>universalistic</i>), yaitu menerima segala sesuatu dengan obyektif. Interaksi dengan norma-norma universal, populasi yang plural, semua transaksi dipertanggungjawabkan secara tertulis berbasis dokumen.</p>
<p>3. Orientasi kolektif (<i>collective orientation</i>), yaitu lebih mengutamakan kepentingan kelompok/kebersamaan. Terjadi hubungan loyalitas di keluarga, masyarakat, atau negara bersifat</p>	<p>3. Orientasi diri (<i>self orientation</i>), yaitu lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Berorientasi pada kepentingan pribadi berkembang sesuai dengan bakat, mencoba menjadi yang terbaik, mobilitas tinggi, mengedepankan teknologi</p>

kesukuan, memiliki kewajiban bersama.	inovasi memunculkan ekonomi produksi.
4. Askripsi (<i>acription</i>), yaitu segala sesuatu yang dimiliki diperoleh dari pewarisan generasi sebelumnya. Memperhatikan asal dari seseorang, contoh majikan mencari buruh teman baiknya sendiri.	4. Prestasi (<i>achievement</i>), yaitu masyarakatnya suka mengejar prestasi. Status seseorang berdasarkan prestasi, pengalaman karena akan berhadapan dengan pasar yang berkompetisi.
5. Diffuseness/kekaburan (<i>functionally diffused</i>), yaitu dalam mengungkapkan sesuatu dengan tidak berterus-terang. Dalam melaksanakan sesuatu tidak dengan sistem/prosedur yang jelas sehingga tidak efisien.	5. Spesifitas (<i>functionally specific</i>), yaitu berterus terang dalam mengungkapkan segala sesuatu, terdapat aturan yang jelas, spesifik.

Terdapat kesepakatan dari kalangan pendukung teori struktural fungsionalis yang kemudian dilanjutkan oleh Talcott Parsons, bahwa jika ingin masyarakat tetap hidup maka; a) persiapan bagi hubungan yang memadai dengan lingkungan dan bagi perekrutan seksual, b) penetapan dan difrensiasi peranan, c) komunikasi, d) orientasi kognitif bersama, e) seperangkat tujuan bersama yang dikemukakan, f) regulasi normatif alat, g) regulasi ungkapan efektif, h) sosialisasi (Turner & Maryanski, 2010, p. 108). Teori Pasons, terkenal dengan AGIL yang menyampaikan premis tentang empat kebutuhan fungsional yakni; *latent maintenance* (menjamin kesinambungan tindakan), *integration* (kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya menjadi fungsional), *goal attainment* (pemenuhan tujuan), dan *adaptation* (kemampuan sistem menjamin kebutuhan lingkungan dan mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem)

(Wirawan, 2012, pp. 25-26). Dan empat kondisi yang menyebabkan tamatnya riwayat masyarakat, yaitu:

1. Kepunahan biologis anggotanya
2. Sikap apatis anggotanya
3. Perang seluruh masyarakat melawan seluruh anggota masyarakat
4. Penyerapan masyarakat itu ke dalam masyarakat lain

Pandangan ini diperkuat oleh Collins yang mengatakan bahwa teori konflik tidak sama sekali meninggalkan solidaritas sosial, cita-cita sosial. begitu juga Coser, bahwa konflik merupakan cara atau alat untuk memertahankan, mempersatukan, dan bahkan mempertegas sistem sosial yang ada (Wirawan, 2012, p. 83). Karena itu kedua teori ini bisa dipertautkan dalam melihat realitas sosial, baik dalam masyarakat yang homogen maupun heterogen. Menurut Berghe (dalam Martono, 2014:9-10), strategi “keseimbangan dinamis” perlu dipertimbangkan, bahwa masyarakat harus dianalisis secara keseluruhan, sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan timbal-balik dan bersifat jamak sehingga integrasi yang sempurna tidak pernah terwujud, setiap sistem mengalami ketegangan dan penyimpangan, namun cenderung dinetralisir melalui institusionalisasi sehingga perubahan cenderung melalui proses penyesuaian dari pada revolusi. Dalam kondisi semacam ini, masyarakat cenderung bergerak menuju satu tujuan yang sama dan menempuh jalan yang sama pula untuk mencapai tujuan tersebut, hal semacam ini disebut juga dengan “teori konvergensi”. Struktur penting, tetapi tidak bisa meninggalkan agen dalam kehidupan interaksi manusia. Semua umat manusia adalah pelaku yang berpengetahuan. Artinya, semua aktor sosial banyak mengetahui seluk beluk kondisi dan konsekuensi perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Aktor juga bisa mendeskripsikan perbuatannya dan alasan melakukan perbuatan tersebut, para aktor manusia senantiasa terikat oleh alam sebagai struktur materiil. Prinsip struktural (baca: struktural fungsional dan konflik) sangat penting, karena menetapkan ciri-ciri bagi semua jenis masyarakat dalam dimensi ruang dan waktu, dan Inilah menjadi ciri utama dari teori strukturasi (Giddens, 2010, pp. 436-439). Teori Strukturasi Giddens merupakan teori tautan antara *agency* dengan *structure (construction of reality)* dalam rangka melakukan

rekonstruksi sosial sosial. Peter Berger dan Thomas Luckmann bahwa *social practice* sebagai produk interaksi antara *habitus and field*, Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa fenomena sosial sebagai produk interaksi atau tautan antara individu dengan struktur (Surbakti, 2010, p. xxii).

Dengan segala dinamika dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat, terdapat lima strategi dasar dalam menyelesaikan konflik (Pruit & J.Z., 2011, pp. 57-59) yaitu:

1. *Contending* (bertanding, bersaing), segala usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya sendiri dan mencoba membujuk pihak lain untuk mengalah, termasuk diantaranya dengan mengeluarkan ancaman.
2. *Problem Solving* (pemecahan masalah), usaha mengidentifikasi masalah yang memisahkan kedua belah pihak dan mengembangkan serta mengarah pada sebuah solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Cara ini dapat dilakukan dengan cara kompromi dan integratif. Kompromi adalah alternatif nyata yang berada di antara posisi yang lebih disukai oleh masing-masing pihak. Sedangkan integratif adalah rekonsiliasi kreatif atas kepentingan-kepentingan berdasar masing-masing pihak.
3. *Yielding*, (mengalah), dimana orang harus menurunkan aspirasinya sendiri, tidak berarti penyerah total, karena mengalah bukan berarti kalah.
4. *Inaction* (diam), adalah tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya menyelesaikan kontroversi.
5. *Withdrawing* (menarik diri), adalah sebagai upaya untuk menghindari pertengkaran dengan cara menghindarkan diri dari masalah yang dihadapi.

Berdasarkan lima hal tersebut sangatlah jelas bahwa ekspresi konflik sangat beragam, tetapi apapun jenis dari konflik tersebut pada akhirnya ingin memecahkan masalah. Dalam keluarga yang anggotanya terdiri dari keluarga inti (bapak, ibu dan dua orang anak), begitu juga dalam masyarakat paguyuban sekalipun konflik pasti terjadi, hanya saja dalam menyelesaikan masalah menggunakan pilihan-pilihan yang dianggap tepat sehingga menyelesaikan masalah dengan tidak membuat

masalah baru. Disamping itu karakteristik sosio-budaya, tingkat sensitifitas permasalahan, tingkat pendidikan masyarakat, dan sebagainya akan mempengaruhi pilihan tersebut di atas dalam menyelesaikan masalah. Sintesis teori tersebut diatas diharapkan dapat menginspirasi bahwa konflik tidak selalu diselesaikan dengan konflik, sebaliknya dalam masyarakat yang terlihat fungsional, damai, aman, jangan senang dahulu karena tidak mustahil terdapat konflik. Karena konflik melihat jenisnya, ada konflik yang bersifat *manifes* (kasat mata), tetapi juga konflik yang bersifat *laten* (tidak kasat mata).

Dalam konteks konflik yang bernuansa agama, sikap eksklusivisme beragama seringkali menjadi sumber konflik. Eksklusivisme beragama adalah kecenderungan memberikan klaim kebenaran tunggal dalam agama sendiri, tanpa melihat sisi kebenaran dalam agama orang lain, bahkan penganut agama lain harus tunduk terhadap prinsip agama yang dianutnya. Secara konsepsional sikap eksklusivisme selalu bertalian dengan fanatisme (sikap keras dalam memegang suatu konsep ajaran agama tertentu), dan fundamentalisme (sikap menegakkan ajaran agama secara harfiah). Dua sikap terakhir ini, memberi andil besar terhadap terjadinya konflik yang bernuansa agama. Sementara itu, lawan dari sikap eksklusivisme adalah inklusifisme, yakni sikap terbuka dalam memahami agama dengan cara merangkul, membuka diri, dan memposisikan penganut agama lain sebagai bagian dari keberadaan makhluk Tuhan. Sikap inklusif bukan berarti menggadaikan keyakinan beragama demi kebersamaan, akan tetapi inklusif mencoba menempatkan penganut agama lain sebagai bagian dari makhluk Tuhan yang harus dihargai dan dijadikan mitra dalam membangun kehidupan manusia secara lebih baik. Persoalan keyakinan sesuai dengan ajaran agama masing-masing tetap dijunjung tinggi untuk menunjukkan identitas keberagamaan mereka tanpa harus mengerdilkan dan meremehkan keyakinan penganut agama lainnya. Tidak jarang yang menolak sifat ini dengan alasan tertentu, seperti menyekutukan Tuhan, berentangan dengan akidah. Memang tidak setiap orang bisa bersikap inklusif, sangat tergantung pada difahami atau tidaknya hakekat agama yang dianutnya sebagai kepercayaan dan media untuk berinteraksi sosial. Jadi agama sebenarnya tidak hanya mengatur hubungan semata-mata bersifat vertikal, hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga bersifat horizontal yaitu hubungan manusia dengan

sesama manusia dengan segala perbedaannya. Mungkin hanya orang-orang yang berjiwa besar dan meyakini betul agala yang dianutnya yang bisa bersifat inklusif. Orang-orang yang bersifat inklusif biasanya tidak akan tergoyahkan imannya walaupun berinteraksi dengan yang berbeda agama, justru dipertanyakan imannya bagi yang bersifat eksklusif.

Fenomena kekerasan berbau agama yang belakangan terjadi di Indonesia menggugah cendekiawan muslim asal India, Asghar Ali Engginer, memberikan komentar. Menurut perlu dicermati bahwa di Indonesia sekarang sedang dalam ujian. Di masa lalu, kami mengagumi hubungan antarpenganut agama di Indonesia; Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lain hidup secara harmonis. Tapi sekarang terjadi konflik agama di Indonesia (Asghar, 2008). Saya berharap demokrasi dan pluralisme di Indonesia akan bertambah kuat. Magnis-Suseno seorang teolog dan sosiolog terkemuka berpendapat bahwa setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya konflik etnis dan agama di Indonesia. *Pertama*, modernisasi dan globalisasi yang jauh memasuki masyarakat Indonesia yang berpengaruh terhadap pergeseran pemahaman terhadap nilai-nilai agama dan budaya; *Kedua*, adanya akumulasi kebencian dalam masyarakat terhadap pemeluk agama yang berbeda; *Ketiga*, masyarakat kita lebih banyak dalam genggamannya budaya kekerasan; dan *Keempat*, Ekses dari penerapan sitem politik pada masa Orde Baru yang monolitik dan represif (Suseno, 2003, pp. 122-123).

Indonesia dikenal sebagai negara yang penduduknya sangat religius, memegang adat-istiadat dan norma-norma ketimuran, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian karena terjadi kekerasan atas nama agama, terjadi akumulasi kebencian. Nampaknya kita sangat senang beretorika, retorika wacana. Seseorang mempunyai kemampuan berbicara dengan vokal dan gerak fisik yang menyakinkan apabila berotbah ibaratkan seorang merayu pasangannya. Dengan olah kata dan gerak fisiknya mampu membenarkan apa yang dikatakan dan dilakukan dengan merujuk ayat-ayat agama, inilah yang disebut dengan metode ironi. Sehingga ada ungkapan "orang yang mengaku bijak sering membijaki kebijakanaanya". Keberaran yang hakiki dipermainkan dengan olah vokal dan gerak fisik sehingga yang terjadi adalah "kebenaran adalah akumulasi dari kesalahan". Karena itu setiap pemeluk agama sangat perlu memahami ajaran agamanya, bukan sekedar

mempunyai kemampuan mengeksplanasi saja sehingga tidak terpengaruh oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan melaksanakan metode ironi. Dengan demikian kita akan menjadi orang cerdas dalam menyikapi berbagai isu agama sehingga tidak mudah terprovokasi.

Konflik Poso yang terjadi pada tahun 1998 menurut banyak kalangan sebenarnya tidaklah murni konflik agama antar warga Poso. Ia mencakup konflik yang lebih kompleks, yakni konflik yang melibatkan persilangan antar etnik, baik lokal maupun pendatang, dan konflik kepentingan politik, baik dari elit sipil maupun militer. Konflik yang semula hanya melibatkan kekuatan lokal menjadi konflik yang lebih besar ketika kekuatan-kekuatan dari luar Poso ikut terlibat di dalamnya seperti, Laskar Jihad dan satuan-satuan TNI dan Polri (Sianturi, 2009). Akibatnya konflik yang berskala lokal akhirnya berkembang menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang berskala nasional, yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kurun waktu yang tidak berjauhan dari Tragedi Poso, menyusul konflik serupa yang terjadi di Ambon pada awal tahun 1999, yakni antara umat Muslim dan Kristen. Konflik ini kemudian menyebar ke wilayah lain di Kepulauan Maluku yang menyebabkan ribuan orang meninggal dan ribuan orang terluka atau mengungsi. Lagi-lagi konflik di Ambon tidak hanya murni karena faktor agama, tetapi juga persoalan primodialisme dan tradisi, sehingga sangat sulit diselesaikan (Ratnawati, 2003, pp. 13-14).

2.3. Integritas Bangsa

Integrasi nasional merupakan terminologi yang sering dipergunakan dalam masyarakat, baik oleh kalangan ilmiah maupun anggota masyarakat lainnya. Meskipun sudah menjadi istilah yang baku dalam bahasa politik, namun pemahaman yang diberikan terhadapnya oleh ahli politik masih bervariasi. Karena itu untuk pengertian integrasi menurut Coleman dan Rosberg dapat dipakai untuk mendefinisikan integrasi nasional Indonesia (Sjamsuddin, 2003, p. 5). Menurutnya integrasi adalah suatu proses pemersatuan bangsa di suatu negara yang terdiri atas dua dimensi, yaitu dimensi *vertikal* (elite-massa), dan *horizontal* (teritorial). Integrasi vertikal mencakup masalah-masalah yang ada dalam bidang vertikal yang bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada antara elite politik dengan massa dalam rangka pengembangan suatu proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Integrasi horizontal, yaitu antar masyarakat pendukung suatu negara dengan tujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dan agama yang dianut dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen.

Indonesia sebagai negara bangsa (*nation-state*) yang terdiri dari kesatuan rakyat, wilayah dan pemerintahan diperlukan seperangkat aturan atau pedoman yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pedoman tersebut bisa berupa ideologi, konstitusi atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada penfungsian nilai-nilai kebersamaan. Keberbedaan di segala bidang hendaknya disikapi sebagai kekayaan yang harus disyukuri, bukan sebagai potensi konflik. Karena itu integrasi nasional jelas akan dipengaruhi oleh visi pemerintah sebagai pelaksana pemerintah, sebagai pelaksana kekuasaan negara (Bahar & Tangdililing, 1996, p. viii). Konsep "arena" oleh Bourdieu perlu dicermati dalam praktik sosial. Bahwa setiap orang dalam berinteraksi sosial tidak bisa lepas dari "arena", dimana seseorang berada yang terikat oleh aturan, konsensus yang telah disepati demi kehidupan yang harmonis. Dalam keluarga batih yang terdiri dari bapak, ibu dengan anak-anaknya pasti memiliki aturan yang disepakati demi keharmonisan kehidupan keluarga. Begitu juga dalam masyarakat, apalagi kehidupan sebagai warga negara, dan dinegara manapun di dunia. Begitu juga dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia, bahwa Indonesia sebagai "arena" yang dilengkapi oleh seperangkat aturan,

konsensus baik secara yuridis formal maupun berdasarkan tradisi atau budaya yang anutnya demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Empat konsensus dasar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinekaan) sampai saat ini tentu sudah menjadi harga mati. Karena mempermasalahkan semua ini tentu akan membuat masalah baru, sehingga kita tidak pernah membangun demi kemaslahatan orang banyak. Begitu juga simbol-simbol negara seperti Bendera Merah Putih tidak perlu diperdebatkan lagi dan harus dihormati biasanya setiap upacara bendera serta dikibarkan setiap hari-hari besar kenegaraan. Tidak perlu diperdebatkan boleh dihormati atau tidak. Mengapa ini perlu disampaikan karena masih ada kelompok tertentu yang mempermasalahkan bahwa "menghormati bendera merah putih" adalah bertentangan dengan agama. Nampaknya penganut hal tersebut kurang kaya akan pemahaman makna perbendaharaan kata, tidak bisa membedakan antara "menghormati" dengan "menyembah".

Dalam kehidupan beragama harus dikembalikan perannya sebagai penyeimbang dalam dua kepentingan yaitu kepentingan *vertikan* dan *horizontal*. Itulah yang dimaksud dengan upaya untuk merumuskan kultur bangsa yang beradab. Jelas bahwa orientasi hidup beragama tidak hanya sekadar mencari kerukunan antara agama satu dan lainnya, justru kerukunan agama harus menjadi modal bangsa (*nation capital*) untuk membangun dan mencari keseimbangan dalam segala kehidupan yang sejati. Jadi masalahnya adalah bagaimana kerukunan hidup beragama itu bisa menjadi modal dasar untuk membangun sebuah cara pandang, cara merasa, dan cara perilaku sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dengan cara seperti itu, berarti agama dalam masyarakat diposisikan sebagai roh dan semangat untuk membangun dan bukan agama sebagai tujuan yang dilegal-formalkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Agama akan menjadi roh pembebas masyarakat dari ketakutan akan represi negara maupun represi kelompok mayoritas. Mayoritas dan minoritas tidak perlu didikotomikan, justru kondisi semacam ini adalah suatu kaharusan karena tidak akan ada istilah mayoritas tanpa minoritas, begitu juga sebaliknya. Mayoritas dan minoritas hendaknya berjalan secara sinergi sehingga tidak tercipta situasi intimidatif baik secara fisik atau psikis.

Agama tidak menjadi orientasi hidup, melainkan untuk menjadikan hidup ini lebih berorientasi pada kemanusiaan. Itulah sekiranya tujuan terpenting beragama yang sering terselewengkan dalam perjalanan kita sebagai bangsa. Yakni ketika agama dijadikan sebagai manifesto simbolik yang harus ditegakkan dengan pedang daripada dijadikan pewarna kehidupan kita untuk memperkuat semangat. Kualitas kerukunan beragama amatlah ditentukan oleh masyarakat sendiri, sejauh politik tidak menggunakan agama sebagai aspirasi. Masalahnya, di Indonesia ini agama sering dijadikan instrumen kekuasaan daripada sebagai pewarna dan pengarah. Inilah yang membuat agama sering mandul dalam diri para pengkhotbah dan para pemeluknya. Sebab, ia tidak pernah dibatinkan dalam perilaku, tetapi lebih dijadikan komoditas politik dan ekonomi untuk kepentingan jangka pendek dan amat sempit. Kasus pemilihan elit-elit politik baik di tingkat lokal maupun nasional, agama disosisikan sangat sentral sebagai komoditas politik dengan motto "yang penting seiman". Sebenarnya selama manusia hidup dan punya kepentingan (*interest*) ranah politik tidak bisa ditinggalkan, yang perlu sadarkan diri kita adalah berpolitik yang beretika dan profesional. Wajarlah yang dipilih seiman, bersifat primordial, hanya saja tidak mengesampingkan "profesionalisme". Memilih yang seiman mempunyai kedekatan secara primordial yang tidak profesional sama artinya menjatuhkan kredibilitas kelompok sendiri.

Kualitas beragama bisa diukur bila kesalehan tidak sekedar bermakna individual, melainkan sosial. Kesalahan sosial akan melahirkan sikap-sikap kemanusiaan dalam berbagai kebijakan politik maupun ekonomi. Pluralitas yang seharusnya menjadi modal utama untuk pembentukan karakter bangsa berjalan terseok-seok. Agama sendiri terjebak pada hal-hal ritual. Akibatnya, cara beragama masyarakat hanya upaya mengejar simbol. Hal ini membuat agama tidak mampu menjadi dirinya sendiri dan gagal menjadi penyeimbang dua kekuatan utama, yakni kehidupan bernegara. Padahal pemahaman akan agama bukan sekedar melaksanakan yang bersifat rutinitas (*upakara*) yang bersifat ritual, tetapi lebih pada pada tingkat perilaku (*susila*) dan hakekat (*filsafat*). Tingkat susila berkait dengan bagaimana berinteraksi secara horizontal dengan sesama. Dan tingkat hakekat, menyangkut penghayatan dari adanya agama di muka bumi ini dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam praktik kehidupan nyata. *Upakara, susila,*

dan *hakekat* hendaknya dilihat sebagai sistem, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kalau ingin menjalankan ajaran agama yang baik dan benar.

Tampaknya kini yang dibutuhkan adalah paradigma baru, dari semua pihak apakah itu pemerintah, elite politik, orang tua, dan para pemimpin agama berani menafsirkan teks sesuai dengan konteks politik, budaya, ekonomi pada waktu ini, bukan sesuai dengan *setting history* masa lampau. Dengan menafsirkan teks dalam konteks zaman ini, para pemuka agama akan mampu keluar dari kaca mata eksklusif dan berubah menjadi inklusif. Pemahaman yang lebih inklusif inilah yang seharusnya dimiliki oleh para pemuka agama di negara kita. Dengan pemahaman seperti ini maka dialog agama akan lebih berkembang menjadi dialog kehidupan. Dialog, kompromis adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang yang beradab dalam menyelesaikan masalah, sedangkan cara-cara sebaliknya hanya dilakukan oleh orang-orang yang biadab. Di dalam hubungan sosial (*social relation*) pasti akan berpotensi terjadi konflik, tetapi di satu pihak hubungan sosial akan memberikan manfaat bagi mereka yang terlibat di dalamnya. Di lihat dari sudut pandang ini hubungan sosial dapat dianalogikan dengan sebuah kerja sama antar anggota masyarakat untuk menghasilkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Maswadi Rauf mengatakan perlu dibangun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adanya hubungan yang positif. Setiap anggota masyarakat mengadakan hubungan sosial karena ada manfaat yang dihasilkan untuk memajukan dirinya sendiri maupun masyarakat dimana mereka berada. Hal ini dapat terjadi karena setiap anggota masyarakat mempunyai niat baik di dalam setiap diri anggota masyarakat untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Sebaliknya adalah hubungan sosial negatif, yaitu terjadi gangguan dalam interaksi sosial, ketegangan bahkan tidak ada hubungan sama sekali yang muncul dalam bentuk konflik-konflik sosial karena SARA (Rauf, 1996, pp. 77-78). Untuk menghindari hubungan negatif tersebut dan menciptakan integrasi nasional diperlukan penciptaan situasi interaksi sebagai berikut (Kusumaatmadja, 1996, pp. 50-52):

1. Strategi kemitraan kerja antara birokrasi dan aparatur dengan masyarakat luas khususnya menyangkut operasionalisasi sektor-sektor negara ke arah integrasi nasional.

2. Bentuk-bentuk keterkaitan antar berbagai unsur keragaman masyarakat harus dihindarkan dari pragmatisme ekonomi, terutama pragmatisme politik.
3. Warga birokrasi dan aparatur selaku pemegang mandat konstitusi harus menyelenggarakan administrasi pemerintahan negara memberikan yang wajar terhadap setiap prakasra kemajuan masyarakat.
4. Pengakuan terhadap keragaman latar belakang sosio-kultural dan tidak perlu diikuti oleh pandangan dikotomis yang berlebihan.
5. Lapisan-lapisan strategis dan elite masyarakat harus lebih giat melakukan komunikasi politik, baik antara mereka dengan pemerintah, maupun diantara mereka sendiri.
6. Rintisan kebersamaan atau persaudaraan baru diantara segenap sumber daya nasional perlu ditingkatkan pada yang lebih masif dalam bidang yang lebih strategis.
7. Perlu ada kesadaran bahwa masalah pengembangan wawasan kebangsaan dalam kerangka integrasi nasional bukanlah monopoli birokrasi dan aparatus negara. Semua pihak atau semua unsur keragaman masyarakat mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk mengkonkretkan komitmen nasional dengan cara dan lewat pengabdian mereka masing-masing.

Mungkin tidak berlebihan kalau pandangan Aristoteles dapat dijadikan pegangan beinteraksi dalam keberbedaan, bahwa manusia adalah binatang berakal budi (*animal rationale*). Akal budi hendaknya menjadi acuan dalam berinteraksi dalam perbedaan supaya berbeda perilaku kita dengan binatang. Manusia yang mempunyai logika seharusnya dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dalam interaksi sosial dalam menjalin hubungan dengan segala sesuatunya (Peurson, 1990, p. 1).

2.4. Pluralisme Agama Dalam Pespektif Islam

Pluralisme agama adalah kosakata baru dalam khazanah pemikiran Islam yang hingga kini pemaknaannya belum ada kesepakatan diantara umat Islam. Tak heran apabila kemudian muncul berbagai perdebatan seputar pluralisme, apakah Islam membenarkan paham ini atau tidak. Sebagian kelompok sangat yakin bahwa Islam sangat akomodatif dan menghargai terhadap pluralisme agama, namun

sebagian yang lain berkeyakinan bahwa pluralisme agama adalah paham yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Masing-masing kelompok telah mencoba melakukan eksplorasi dalil-dalil yang dikutip dari al-Qur'an maupun Hadits dalam rangka menguatkan pendapatnya.

Tulisan berikut ini berusaha menyajikan data-data yang sering dipakai oleh pihak-pihak baik yang pro dan kontra terhadap pluralisme agama. Dari penelusuran awal penulis, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang berhubungan dengan tema pluralisme agama memiliki banyak sisi yang memungkinkan siapapun untuk memberikan tafsir terhadap teks-teks suci tersebut. Akibatnya, setiap penafsiran selalu memiliki sisi kebenaran disamping kesalahan. Hal ini dimungkinkan karena teks, betapapun sucinya teks tersebut, tidak bisa menafsirkan dirinya sendiri. Ia tidak bermakna apa-apa tanpa keterlibatan pembaca. Pada saat yang sama latar belakang pembaca dapat dipastikan sangat beragam, maka hasil dari pembacaan terhadap teks dengan sendirinya juga sangat bervariasi.

2.5. Makna Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata *plural* (Inggris) yang berarti banyak atau berbilang atau “bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu” (*from the word used with reference to more than one*). *Plural* juga berarti keanekaragaman dalam masyarakat, ada banyak hal lain di luar kelompok kita yang harus diakui. Lebih luas lagi pluralisme adalah sebuah “ism” atau aliran tentang pluralitas (*a pluralism is an “ism” about a “plurality”*) (Mouw & Sander, 1993, p. 13). Pengertian ini akan lebih bermakna ketika seseorang mengakui dan meyakini bahwa ada sesuatu yang penting untuk dikatakan mengenai banyaknya perbedaan itu (Ma'arif, 2005, p. 12). Dalam menghadapi keragaman, kata M. Dawam Rahardjo, kita membutuhkan suatu paham pluralisme (*pluralism is needed to deal with plurality*). Tentu akan menyulitkan jika di satu pihak pluralitas diterima sebagai suatu realitas, sedangkan di pihak lain, pluralisme ditolak sebagai suatu paham (Raharjo, 2006). Pengertian lain tentang pluralisme menyebutkan bahwa pluralisme adalah “*The existence of many different group in one society, for example people of different races or of different political or religious belief: cultural or political pluralism*”. Dari definisi ini dapat difahami bahwa pluralisme

adalah keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya (Ma'arif, 2005, p. 13).

Menurut Nurcholis Madjid pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama yang justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekadar kebaikan negatif, hanya ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine angagement of diversities within th bond of civility*) (Rahman M. , 2006, p. 31). Pluralisme tidak saja mengisyaratkan adanya sikap bersedia mengakui hak kelompok lain untuk ada, tetapi juga mengandung makna kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain itu atas dasar perdamaian dan saling menghormati.

Para ahli menggunakan istilah pluralisme dalam berbagai hal mulai dari dunia filsafat, agama, sosiologi sampai pada dunia politik. Hal ini berbeda dengan kebanyakan orang yang selalu mengaitkan pluralisme dengan agama. Dalam dunia filsafat, pluralisme diartikan sebagai pandangan yang melihat dunia terdiri dari banyak makhluk. Istilah ini sering dilawankan dengan monoisme yang menekankan satu kesatuan dalam banyak hal atau dualisme yang melihat dunia terdiri dari dua hal yang berbeda (William, 1996). Monoisme terbagi kepada *physical monoism* yang terwujud dalam filsafat materialisme bahwa seluruh alam adalah benda dan *mental monoism* atau idealisme yang menyatakan bahwa alam seluruhnya adalah gagasan atau ide. Pada dualisme, segala sesuatu dilihat sebagai dua. Filsafat zoroaster, Descartes mempertentangkan antara pikiran (*mind*) dan benda (*matter*). Pada pluralisme, segala hal dilihat sebagai banyak (Ka'bah, 2005, p. 68).

Sementara itu, dalam dunia sosio-politik pluralisme diartikan sebagai sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok baik yang bercorak ras, suku, aliran, kebudayaan maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan yang sangat unik diantara kelompok tersebut. Selanjutnya, dalam diskursus agama, pluralisme dapat dimaknai dengan sebuah sikap yang saling memahami bahwa dalam realitas kehidupan manusia terdapat beragam agama dan keyakinan yang dianut oleh umat manusia dengan satu tujuan untuk mendapatkan kedamaian dalam

kehidupan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya setiap manusia yang beragama harus dalam hubungannya dengan umat beragama lain dapat membuka diri dan tidak menganggap ajarannya dan sistem peribadatannya sebagai yang paling benar.

Selanjutnya dari jika dihubungkan dengan agama, pluralisme dapat diartikan dengan sebagai relasi damai antaragama yang berbeda. Jika bertolak dari pengertian tersebut, menurut ada dua hal yang ditekankan dalam pluralisme agama. Pertama, pengakuan sekaligus penerimaan terhadap keragaman termasuk dalam agama. Keragaman agama merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Munculnya pelbagai agama pada masa sebelumnya secara historis tidak bisa menghapus agama yang muncul pada masa sesudahnya. Begitu juga sebaliknya. Fakta ini meniscayakan adanya suatu pengakuan terhadap keragaman.

Kedua, perlunya mengembangkan relasi damai dengan kelompok agama lain. Bahwa pada masing-masing agama terdapat perbedaan terutama pada ranah eksoterik, agaknya telah menjadi kesadaran semua pemeluk agama. Cara beribadah antara pemeluk Kristen tentu berbeda dengan pemeluk Hindu, Budha, Yahudi, Islam, dan lain sebagainya. Pada masing-masing agama juga terdapat perbedaan dalam membahasakan istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan dimensi kemutlakan seperti Tuhan dan kehidupan eskatologis.

Tetapi perbedaan pada ranah eksoterik tidak perlu dijadikan penghalang untuk mengembangkan relasi damai. Sebab, di balik perbedaan eksoterik, masing-masing agama diperjumpakan dengan visi perenial yang sama. Apa pun agamanya, bisa dipastikan memiliki kepedulian pada masalah kemanusiaan. Semua agama juga menekankan kepasrahan terhadap apa yang kita sebut dengan Tuhan. Poin-poin inilah yang memungkinkan adanya perjumpaan, dan bahkan kerja sama, antarumat beragama, tanpa harus mempertukarkan keyakinannya. Pendek kata pluralisme adalah kata yang paling tepat dan ringkas untuk menyebut suatu tatanan dunia baru dimana perbedaan budaya, sistem, kepercayaan, dan lain-lain perlu disadari agar warga negara terpanggil untuk hidup berdamai dalam perbedaan (Sachedina, 2002, p. 48).

2.6. Distribusi Ayat-ayat Pluralisme Agama dalam Al-Qur'an

Sebagaimana diketahui bahwa pluralisme agama adalah istilah baru dalam khazanah pemikiran Islam, karena itu sangat logis apabila istilah ini tidak dapat ditemui dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi. Perdebatan di kalangan akademisi muslim pun menyeruak ke permukaan. Pertanyaan mendasar yang muncul dalam perdebatan tersebut adalah apabila pluralisme agama secara eksplisit tidak terekam dalam kedua sumber primer Islam, lantas bagaimana dengan substansi pluralisme agama? Para pemikir muslim terbelah ke dalam dua kelompok besar, sebagian menyatakan bahwa Islam mengakomodasi nilai-nilai pluralisme agama dan sebagian yang lain meyakini bahwa Islam sangat tidak sejalan dengan ajaran pluralisme agama.

Dua kelompok di atas, meskipun berbeda secara diametral, keduanya biasanya dalam menyampaikan argumentasi tidak bisa melepaskan diri ayat-ayat al-Qur'an. Suatu ketika merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an yang sama tetapi berbeda dalam penafsirannya, dan pada saat yang lain memang merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an yang sama sekali berbeda. Ayat-ayat yang dipakai tersebar di banyak surat, mulai dari surat al-Baqarah sampai pada surat al-Kafirun. Menurut pengamatan penulis, ada sekitar 34 ayat yang dapat dijadikan sebagai argumentasi baik yang pro maupun kontra terhadap adanya relasi antara Islam dengan pluralisme agama.

Berikut ini kami susun distribusi ayat-ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dasar argumentasi oleh pihak yang pro maupun kontra dalam sebuah tabel. Sementara itu, untuk mengetahui secara lebih detail mengenai ayat-ayat diatas, penulis sertakan lafaz dan terjemahan dari ayat-ayat tersebut dalam lampiran di akhir makalah ini.

Distribusi Ayat-ayat al-Qur'an yang Berhubungan dengan Pluralisme Agama

No	Nama Surah	Ayat
1.	Al-Baqarah	62, 109, 113, 120, 148, 213, 221
2.	Ali Imron	19, 28, 60, 83, 85, 118
3.	Al-Nisa	144
4.	Al-Maidah	3, 5, 48, 51, 64, 72, 73, 82.

5.	Al-Taubah	23, 29, 30, 31
6.	Yunus	99
7.	Hud	118
8.	Ibrahim	4
9.	Al-Nahl	36
10.	Kahfi	29
11.	Al-Haj	40
12.	Al-Fatir	24
13.	Fath	29
14.	Al-Hujurat	13
15.	Shaf	6
16.	Kafirun	6

Diantara tiga puluhan ayat yang berhubungan dengan pluralisme agama, ada beberapa ayat pokok yang menjadi titik tolak perdebatan. Ayat-ayat tersebut adalah

1. Ayat 120 surat al-Baqarah

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ لِيَ هُودُ وَلَا لِنَصَارَىٰ حَتَّىٰ يَتَّبِعَ لِحْتَهُمْ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.”

2. Ayat 148 surat al-Baqarah

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُؤَلِّي دَهْلِيَّتِيْقُوا لِنَحْرَاتِ يٰنَ مَاتَكُونُوايَاتِبِكُمْ اللهُ جِهِيَا

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat).”

3. Ayat 213 surat al-Baqarah

كَانَ لِنَاسِ أُمَّةٍ وَاحِدَةً هَبَعَتْ اللهُ لِلنَّبِيِّنَ مَشْرِيْنَ وَهٰذِيْنَ

“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan”

4. Ayat 19 surat Ali Imran

إِنَّ لِي دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامَ

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.”

5. Ayat 83 surat Ali Imran

فَلْيَخِرَّ بَيْنَ أَلْيَدِنَا وَإِلَيْهِ
يُرْجَعُونَ

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.”

6. Ayat 84 surat Ali Imran

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”

7. Ayat 29 surat Al-Kahfi

قُلْ لِحَقِّ مِنْ رَبِّي وَأَعْلَىٰ وَمِنْ شَأْنِ أَهْلِ الْقُرْ

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.”

2.7. **Kelompok Pendukung Pluralisme Agama**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada kelompok pendukung dan penolak konsep pluralisme agama dalam Islam. Bagi kelompok yang setuju, mereka berkeyakinan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad sejak awal penyebarannya telah menunjukkan wataknya yang akomodatif terhadap pluralisme agama. Dalam keyakinan mereka Islam sebagai agama *samawi* termuda melalui praktik kehidupan Rasul sesungguhnya telah memberikan petunjuk bagaimana membangun kehidupan pluralisme agama di tengah masyarakat Arab saat itu.

Sejak kelahirannya pada abad ke 7 Islam sudah berada di tengah-tengah budaya dan agama-agama lain, seperti Yahudi, Kristen, Majusi dan para penyembah berhala. Fakta ini sekaligus menunjukkan bahwa ada unsur kritis pluralisme yang terlibat dalam proses diturunkannya Islam pada masa-masa awal. Di dalam Al-Qur'an ditemukan rekaman kontak Islam serta kaum muslimin dengan komunitas-komunitas agama yang ada di sana. Perdagangan yang dilakukan bangsa Arab pada waktu itu ke Syam, Irak, Yaman, dan Etiopia, dan posisi kota Makkah sebagai pusat transit perdagangan yang menghubungkan daerah-daerah di sekeliling Jazirah Arab membuat budaya Bizantium, Persia, Mesir dan Etiopia, menjadikan agama-agama yang ada di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya tidak asing lagi bagi Muhammad (Machasin, 2000, p. 187).

Dalam catatan sejarah pula terbukti bahwa Muhammad saw. telah membuktikan diri sebagai tokoh yang mampu membangun dan mengaplikasikan semangat pluralisme agama dengan sangat baik. Sebagai contoh bagaimana Rasul dengan segala sikap toleransinya bersama dengan sahabat Muhajirin dan Anshar serta tokoh-tokoh Non Muslim saat itu menelorkan butir-butir kerjasama dan kesepakatan dalam Piagam Madinah yang terdiri dari 46 butir. Sebagai tokoh sentral, Muhammad berupaya merangkul seluruh kekuatan tanpa melihat latar belakang ras dan agama mereka untuk membangun *city-state* yang baru (Bulac, 1998, p. 203).

Fakta sejarah di atas sejalan dengan salah satu prinsip utama Islam, *rahmatan li al-alamin*, artinya bahwa Islam secara konseptual dirancang mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Imam al-Alusi dalam tafsirnya memaknai *al-alamin* dengan umat manusia (Al-Alusi, tth, p. 231). Dilihat dari redaksinya kata *al-alamin* adalah bentuk kata *jama'*, artinya bahwa kata tersebut

tidak menunjuk kepada manusia tertentu, sehingga *al-alam* berlaku bukan hanya untuk umat muslim tetapi juga non muslim. Dengan pemaknaan yang lain dapat dikatakan bahwa Islam tidak hanya menjadi sumber rahmad bagi komunitas manusia tertentu, akan tetapi menyeluruh ke semua lapisan masyarakat tanpa dibatasi oleh sekat-sekat suku, budaya, ras, bahkan ideologi sekalipun. Konsep yang sangat ideal ini dapat dipahami mengingat Allah swt. telah menciptakan manusia tidak dalam satu bentuk dan pola, akan tetapi manusia diciptakan dalam beragam jenis. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 118.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزِلُّونَ مِنْ خَلْقِهِ

“Jikalau Tuhanmu (Muhammad) menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat”.

Dalam redaksi yang sedikit berbeda, Allah memberikan penegasan betapa pluralitas manusia adalah sebuah keharusan, bahkan sampai dengan urusan keyakinan sekalipun.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ الْأَرْضَ لِأَنَّهَا لِلْإِنْسَانِ كُلِّهِمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ

مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu (Muhammad) menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (Q.S. Yunus 99).

Di sinilah terletak pluralitas manusia yang sesungguhnya, yang darinya manusia diharapkan dapat bekerja sama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Lantas mengapa Allah tidak menjadikannya dalam satu pola saja? Bukankah Allah sangat bisa mewujudkannya? Dalam beberapa ayat al-Qur’an Allah menegaskan bahwa Allah sekali-kali tidak menghendaki manusia dalam satu agama (baca: Islam), melainkan Allah telah mendesain sedemikian rupa sehingga terdapat banyak aliran dan keyakinan yang dianut manusia. Bahkan Allah memberikan

هُكِي شَرِيهًا : يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكُمْ وَإِسْكُمْ وَجَعَلَكُمْ كُنُؤًا غِي فَلَجُر
قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ هُنَّ مَاتَقَصَّ لَكُمْ مِنْ هُنَّ شَرِيهًا (رواه مسلم)

Diriwayatkan dari Abu Dzar al-Ghifari r.a. dari Nabi saw. dari Allah swt, bahwasanya Allah berfirman: Wahai hambaku seandainya orang yang paling awal dan akhir diantara kalian, manusianya ataupun bangsa jinnya, semuanya bertakwa seperti orang yang paling bertakwa diantara kamu niscaya hal itu tidak akan menambah kerajaanKu sedikitpun. Dan seandainya sejak awal dari kamu sampai akhir dari kamu, manusia ataupun bangsa jinnya, semua menyimpang seperti orang yang paling menyimpang diantara kamu niscaya hal itu tidak akan mengurangi kerajaanKu sedikitpun (H.R. Muslim) (Nawawi, 1992:49).

Prinsip-prinsip pluralisme keagamaan sejak jaman awal Islam telah dipraktikkan dan dicontohkan oleh Muhammad saw. hal ini sebagaimana tercermin dalam sebuah hadits bagaimana Muhammad memperlakukan umat beragama lain sangat baik bahkan beliau memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah pada tempat yang sangat diagungkan oleh umat Islam, yakni Masjid Nabawi. Rasul tidak sedikitpun berusaha mempengaruhi mereka untuk berpaling kepada agama Islam.

حسني محمد بن جعفر بن لندي، قال : « لم اقدم فادنجران غي رسول
الله صلى الله عليه وسلم دخلوا غيه من جدب عدل عسر فحلت تصلاتهم
فقاموا يصلون في من جدب أراد لئاس فدعاهم فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : « دعوهم » فليلتقبلوا لشرف فصلوا واصلاتهم.

Diceritakan dari Muhammad bin Ja'far bin Nida berkata: Ketika sekelompok duta dari Najran menemui Rasulullah saw. mereka memasuki masjid Rasul setelah Ashar. Ketika itu tibalah waktu shalat mereka, selanjutnya mereka shalat di masjid Rasul. Para sahabat mencoba melarang mereka shalat di sana, kemudian Rasul berkata: biarkanlah mereka. Selanjutnya mereka menghadap ke timur dan shalat sesuai dengan tata cara mereka (Baihaqi, tth:482).

Sikap Nabi Muhammad saw. sebagaimana tercermin dalam hadits di atas, diteruskan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Dalam sebuah koinformansi dengan seorang sahabat yang sedang melakukan perjalanan ke daerah Najran. Ketika di daerah Najran sang Sahabat mempunyai persoalan pada saat hendak melakukan shalat, sebab di Najran tidak ditemukan tempat yang representatif sebagai tempat shalat, dan satu-satunya tempat yang layak dipakai shalat adalah sebuah gereja. Karena takut melanggar ajaran agama, lantas dia menulis surat kepada Umar bin Khattab sang Khalifah. Umar pun kemudian memberikan jawaban dengan memerintahkan untuk shalat di gereja tersebut dengan terlebih dahulu membersihkannya.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَسْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ كُرَيْبٍ قَالَ لَتَبَّتْ لِي
عَمْرٌ مِنْ جِرَانٍ لَمْ يَجِدُوا مَكَانًا أَنْ يَنْظِفُوا وَلَا أَجُودَ مِنْ بَيْعَاتِكُمْ أَنْ يَضْحَوْهُ
بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَصَلَّوْا فِيهَا. (ابن شريفة جزء ١)

“Diceritakan oleh Abu Bakar dari Sahal bin Yusuf dari Hamid dari Baker berkata “saya menulis surat kepada Umar bin Khattab dari Najran, (saya mengabarkan) para sahabat (di sana) tidak menemukan tempat yang paling bersih dan baik dari gereja. Kemudian Umar menjawab “siramilah tempat itu dengan air dan sidr, selanjutnya shalatlah kalian di sana” (Syaibah, tth:527).

Dalam kesempatan ini perlu juga disampaikan pandangan Khofifah Indar Parawansa (Jawa Pos, 5 September 2010) dalam “Hak-hak Kerahmatan Muslim Non Muslim”, bahwa secara etimologis, Islam berarti “damai”. Sedangkan *rahmatan lil’alamin* adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam.

Rahmatan lil’alamin adalah istilah Qurani. Dan istilah itu sudah terdapat dalam al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Anbiya di atas. Ayat tersebut menegaskan bahwa jika diimplementasikan secara benar, dengan sendirinya ajaran Islam akan mendatangkan rahmat, baik untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam, baik umat laki-laki maupun perempuan, baik untuk

mayoritas maupun minoritas. Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua; rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim.

Rahmat dalam konteks *rahman* adalah bersifat *amma kulla syai*, meliputi segala hal, sehingga orang-orang non muslim pun mempunyai hak kerahmatan. Rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi Rahim itu adalah *khoshshun lil muslim*. Karena itu, apabila ajaran Islam dilaksanakan secara benar, rahman dan rahim Allah akan turun semua.

Kendati orang Islam, jika tidak melakukan ikhtiar kerahmatan, mereka tidak akan mendapatkan hasilnya. Dengan kata lain, terhadap karunia rahman ini, berlaku hukum kompetitif. Contohnya jika orang Islam yang bekerja tidak profesional, hasilnya pun tidak akan maksimal dalam memakmurkan hidupnya. Sementara itu, jika orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah non muslim, mereka pun akan mendapatkan sifat kerahmanan Allah yang berlaku universal (*amma kulla syai*). Sedangkan hak atas surga ada pada sifat rahim Allah SWT. Karena itu yang mendapat kerahiman ini adalah orang mukminin. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *rahmatan lil'alamin* adalah bersatunya karunia Allah yang tercakup di dalam kerahiman dan kerahmanan Allah.

Dalam konteks Islam *rahmatan lil'alami*, Islam telah mengatur tata hubungan yang menyangkut aspek theologis, ritual, sosial dan humanitas. Dalam segi theologis, Islam memberikan rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk memaksa non muslim memeluk Islam. Begitu pula halnya dalam tataran ritual yang operasionalnya memang sudah ditentukan dalam al-Quran dan al-hadis. Namun dalam konteks sosial, menurut para ahli, Islam sesungguhnya hanya berbicara ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja, yang penerjemahan operasionalnya secara detail dan komprehensif bergantung kepada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas, yang tentu memiliki keunikan berdasarkan keragaman lokalitas nilai sejarah yang dimiliki.

Etnitas Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* mengakui eksistensi pluralitas karena Islam memandang pluralitas sebagai *sunattullah*, yaitu fungsi pengujian Allah kepada manusia (*social engeneering*) kemajuan umat manusia. Pluralitas

sebagai *sunattullah* telah diabadikan dalam banyak ayat Alquran, antara lain, dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang maknanya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jens laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Ayat tersebut menempatkan kemajemukan atau pluralitas sebagai syarat determinan (*condition sinequa non*) dalam penciptaan makhluk. Dalam Al-quran, banyak ayat yang menyerukan perdamaian dan kasih sayang, antara lain surat al-Hujurat ayat 10 yang memerintahkan kita untuk saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan. Allah SWT berfirman, yang maknanya: *“Sungguh orang-orang yang beriman itu bersudara. Sebab itu, damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat”.*

Terkait dengan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa benang merah yang dapat ditarik dari perintah itu adalah mewujudkan perdamaian; semua orang harus merasa bersaudara. Dalam konteks itu, ada tiga macam persaudaraan (*ukhuwwah*). Pertama, *ukhuwwah* Islamiyah, yang berarti persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan (Islam), baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Kedua, *ukhuwwah wathaniyyah* yang berarti persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Ketiga, *ukhuwah basyariyyah*, yang berarti persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Ketiga macam ukhuwah tersebut harus diwujudkan secara berimbang menurut posisi masing-masing. Satu dan lainnya tidak boleh dipertentangkan. Sebab, hanya melalui tiga dimensi ukhuwah itulah *rahmatan lil alamin* akan terealisasi.

Rasulullah SAW memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama secara damai dengan umat agama lain. Begitu juga ketika menaklukkan Makkah, beliau menjamin setiap orang yang

ditaklukkan agar tetap merasa nyaman dan aman. Gereja-gereja dan sinagoge-sinagoge boleh melakukan peribadatan tanpa harus merasa takut.

Selama hampir 23 tahun perjuangan kenabian, Rasulullah SAW selalu menggunakan pendekatan dialog secara konsisten sehingga misi kerahmatan lintas suku, budaya dan agama dapat dicapai dengan baik. Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk tetap bersabar, tidak menggunakan kekerasan dan pemaksaan, apalagi pembunuhan. Bahkan, untuk menjaga keselamatan kaum muslimin karena waktu itu (tahun ke-12 masa kenabian) kekuatan Islam masih lemah – beliau memutuskan untuk berhijrah ke Madinah.

Para periode Madinah, Rasulullah tetap konsisten menggunakan pendekatan peradaban, yaitu membangun ketenangan masyarakat dengan menerapkan kebebasan beragama, dan kebebasan melaksanakan ajaran agama masing-masing yang dituangkan dalam *Mitsaq Madinah*, yang terkenal dengan sebutan Piagam Madinah.

2.8. Kelompok Penolak Pluralisme Agama

Bagi kelompok yang memilih pendapat kedua ini, mereka berkeyakinan bahwa hal fundamental dalam Islam yang sudah pasti diketahui dan telah disepakati oleh seluruh (ulama) kaum muslimin (baca: ijma') bahwa tidak ada di muka bumi ini agama yang paling benar selain agama Islam. Agama ini adalah penutup seluruh agama. Agama ini menghapus seluruh ajaran agama-agama sebelumnya. Tidak lagi tersisa di muka bumi yang menyembah Allah dengan benar selain agama Islam. Allah Ta'ala berfirman.

إِنَّ لِي لِنَبَأٍ مِنْهُ أَيُّكُمْ يُدْعَى اللَّهُ بِهِ لِيُكْفَرَهُ

“*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.*” (QS. Ali Imron: 19)

Keyakinan diatas ditopang dengan ayat lainnya yang menegaskan bahwa siapa saja yang berusaha mencari agama selain Islam, maka kelak di akherat mereka akan merugi.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Ali Imran: 85)

Menurut kelompok ini kata “Islam” dalam potongan ayat diatas memberikan penegasan bahwa Islam merupakan agama yang dipilihkan Allah kepada umatnya, dan bukan agama lainnya. Hal ini disebabkan karena Islam merupakan agama samawi yang dirancang Allah sebagai penyempurna terhadap agama-agama samawi sebelumnya, sebut saja Nasrani dan Yahudi. Karena itu, segala upaya yang berusaha menyamakan kebenaran Islam dengan agama lain adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Bahkan usaha yang demikian diancam siksaan kelak di akherat nanti.

Keyakinan diatas dipertegas dengan ayat yang lain bahwa agama yang diridhai Allah adalah agama Islam dan bahwa Nabi Muhammad adalah rasul terakhir yang diutus ke muka bumi.

لَيْوَمَ كُنْتُمْ لَكُمْ وَبَنَاءُكُمْ وَيَوْمَ تَرْضَىٰ لَكُمْ الْإِسْلَامَ هَيَّا

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al Maidah: 3)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

“Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.” (QS. Al Ahzab: 40)

Ayat di atas memberikan makna bahwa dengan diutusnya Muhammad sebagai Rasul terakhir, maka hal itu menandai berakhirnya penurunan agama dari Allah. Dengan kata lain, kehadiran Islam sebagaimana yang dibawa Muhammad menjadi agama terakhir sekaligus penyempurna terhadap agama-agama samawi sebelumnya, Nasrani dan Yahudi. Agama Islam dengan demikian menjadi agama terakhir yang diturunkan Allah untuk umat manusia. Oleh karenanya dapat

dipahami apabila Islam menjadi satu-satunya agama yang diridhai Allah untuk diikuti umat manusia.

Apabila Muhammad adalah Rasul terakhir, hal ini berkonsekwensi terhadap sebuah keyakinan bahwa al-Qur'an juga merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah. Al-Qur'an adalah penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, Injil dan seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Qur'an adalah sebagai hakim (ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya). Tidak ada satu pun kitab yang diturunkan saat ini yang memberi petunjuk untuk beribadah pada Allah dengan benar selain al-Qur'an al-Karim. Allah Ta'ala berfirman;

وَنَزَّلْنَا لِيَاكُ الْكِتَابَ لِحَقِّ هُمْ لِيَاكُ لِحَقِّ هُمْ لِيَاكُ لِحَقِّ هُمْ
فَاحْكُم بَيْنَهُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَاهُمْ وَمَا جَاءَكُمْ مِنْ لِحَقِّ

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan sebagai hakim terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS. Al Maidah: 48)

Dalam keyakinan kelompok ini, al-Qur'an sengaja diturunkan Allah dengan pertimbangan bahwa kitab-kitab sebelumnya telah mengalami penyelewengan, penggantian, penambahan dan pengurangan sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Al Qur'an Al Karim ayat 13 surat al-Maidah dan ayat 79 surat al-Baqarah.

فَبِمَا رَغَبُوا مِنْهُ وَكُنُفُوا بِهِ نَسُوا آيَاتِهِ وَلَمْ يَأْتُوا بِنُجَّةٍ
مَوْضِعَهُ وَكَسَبُوا خَسَارًا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسَ أَتَى الْخَطَاةَ فِي هُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِنْهُمْ

“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa

yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka (yang tidak berkhianat).” (QS. Al Maidah: 13)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَلْتَبُونَ الْقِتَابَ بِي هِمَّتْ وَيُقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتْ رُؤْيَاهُ
ثَمَّ أَقْلِي لَهَيِّ لَوْلَهُمْ مَّ التَّبَّتْ بِي هِي هِي وَهَيِّ لَوْلَهُمْ مَّ أَيُّ لَيْسَتْ رُؤْيَاهُ

“Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya; “Ini dari Allah”, (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 79)

Selanjutnya, ayat lain yang sering dijadikan sebagai titik tolak untuk menolak pluralisme agama adalah ayat-ayat yang tersusun dalam surat al-Kafirun. Surat ini diyakini menjadi petunjuk yang sangat jelas adanya batas kebenaran antara Islam dengan agama lainnya. Allah melalui surat al-Kafirun mengingatkan kepada umat Islam agar dapat menempatkan batas-batas yang tegas dalam hubungannya dengan persoalan agama. “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.

Dilihat dari asbabun nuzulnya, surat ini diturunkan sebagai jawaban atas permintaan pemuka-pemuka Quraisy yang ingin menawarkan perjanjian “damai” dengan Nabi. Perjanjian itu terutama terkait dengan ajakan melakukan peribadatan secara bergantian. Pemuka Quraisy yang diwakili al-Walid ibn Mughiroh, dll. sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Said ibn Mina mengajukan penawaran:

“Ya Muhammad, mari kita berdamai. Kami bersedia menyembah apa yang engkau sembah, tetapi engkau pun hendaknya bersedia pula menyembah yang kami sembah, dan di segala urusan negeri kita ini, engkau turut serta bersama kami. Kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang ada pada kami, supaya turutlah kami merasakannya dengan engkau. Dan jika pegangan kami ini yang lebih benar daripada apa yang engkau serukan itu, maka engkau pun telah bersama merasakannya dengan kami, sama mengambil bagian padanya” (Hamka, 1998).

2.9. Analisis Terhadap Perbedaan Kelompok Pendukung dan Penolak Pluralisme Agama

Dalam pembahasan sebelumnya diketahui bahwa masing-masing kelompok baik yang pro dan kontra akan pluralisme agama mengajukan argumentasinya melalui ayat-ayat al-Qur'an. Menurut hemat penulis adalah sah-sah saja menggunakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai dasar berpikir, namun yang perlu diperhatikan bahwa apakah ayat-ayat yang dirujuk telah mempunyai kesesuaian atau belum, dan bagaimana juga logika berpikir yang dibangun.

Terkait dengan pendapat kelompok yang setuju dengan pluralisme agama, hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pluralisme agama adalah sesuatu yang bersifat "given" dari Tuhan yang tidak dapat dihindari. Dengan pemikiran ini, konsekwensi logisnya adalah manusia harus menerima kondisi ini apa adanya, tanpa harus memperdebatkan keabsahan agama yang satu dengan yang lain. Manusia, dalam kerangka logika ini, tidak mempunyai kompetensi untuk menilai suatu agama adalah "baik" atau "tidak baik". Sebab yang boleh menilai hanyalah Allah sebagai pemilik agama itu sendiri. Kalaupun manusia dapat melakukan penilaian, yang demikian hanyalah bersifat "relative" sesuai dengan kacamata agamanya masing-masing. Sebab setiap pemeluk agama pasti akan melakukan penilaian terhadap agama lainnya berdasarkan pada parameter subyektif masing-masing. Sehingga tolak ukurnya sangat mungkin menjadi bias, yang disebabkan adanya intervensi kepentingan personal atau kelompok.

Oleh karena itu, yang terpenting dalam hubungannya dengan relasi antar agama adalah bagaimana membangun kebersamaan yang sesungguhnya diantara pemeluk agama tanpa memberikan penilaian negatif kepada agama di luar yang diyakini. Biarkan masing-masing pemeluk agama menjalankan apa yang mereka yakini benar. Selanjutnya dalam hal responsibility agama terhadap manusia, biarlah hukum alam yang akan berbicara. Ketika ajaran suatu agama mampu berdialog dengan realitas manusia dan memberikan solusi terhadap persoalan mereka, maka dengan sendirinya ia akan dapat bertahan, namun jika tidak, maka agama tersebut akan runtuh dan ditinggalkan oleh manusia.

Logika berfikir yang dibangun para pendukung pluralisme seperti tergambar di atas, pada satu sisi dapat memberikan rasa aman khususnya bagi

pengikut agama minoritas. Sebab dengan demikian tidak ada lagi hegemoni agama besar kepada agama kecil. Namun pada sisi lain, logika ini dapat mereduksi semangat untuk mendakwahkan agama Islam kepada orang lain. Padahal, berdakwah adalah tuntutan yang diberikan Islam kepada seluruh pengikutnya, bahkan dengan semua potensi yang dimiliki.

Menurut hemat penulis, akan lebih proporsional apabila logika berfikir di atas ditempatkan dalam hubungannya dengan membangun interaksi yang positif dengan agama lain. Namun pada saat yang sama, harus ditumbuhkan kepada diri umat Islam bahwa melalui Islamlah kedamaian dapat diwujudkan, dan umat Islam harus nyaman dengan agamanya.

Selain itu, mencermati beragam argumentasi yang dikemukakan kelompok pendukung pluralisme agama tampak tidak adanya ketegasan dalam memberikan batasan antara pluralisme dan toleransi. Toleransi dimaknai dengan semangat pluralisme. Hal ini seperti terlihat dalam hadits Nabi yang memberikan kebebasan kepada umat Nasrani untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya. Perilaku Nabi dalam konteks ini lebih mengarah kepada sikap toleransi di banding pluralisme itu sendiri.

Sementara itu, hal mendasar dari kelompok kedua yang menolak pluralisme agama adalah rasa *confiden* yang sangat tinggi bahwa Islam agama yang paling benar. Sikap ini tidaklah berlebihan mengingat bahwa setiap individu yang beragama haruslah mempunyai kebanggaan terhadap agamanya. Apabila tidak ada sesuatu yang pantas dibanggakan, maka tingkat keberagamaan orang tersebut layak dipertanyakan. Selain itu, kelompok ini meyakini bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam, diakui sebagai kitab suci terakhir yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Secara logika, dapat dimaklumi bahwa sebuah ketentuan yang muncul belakangan merupakan revisi dan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya. Dalam konteks inilah dapat dipahami bahwa al-Qur'an merupakan penyempurna terhadap kitab suci yang diturunkan Allah kepada umat sebelumnya, sebut saja Taurat, Zabur dan Injil. Terkait dengan hal ini Allah menyebut al-Qur'an sebagai *mushaddiq* (pembenar) dan *muhaimin* (penyetuju).

وَلَقَدْ نَزَّلْنَا لِيُكَفِّرَ لِقَابِ بِلْحَقِّ هُصَقِ الْمَلِئِكِينَ يَيَّ هِ مِنْ الْقِتَابِ وَمُ فِيْنَا عِيَّ هِ

Hal penting yang perlu dicatat dari ayat di atas, bahwa al-Qur'an diturunkan Allah SWT. dengan membawa misi "*mushaddiq*" dan "*muhaimin*". Kata *mushaddiq* berarti pembenar terhadap kitab-kitab suci sebelumnya, sementara itu *muhaimin* berarti penguat. Imam Abu Fida' Ismail dalam tafsirnya Ibnu Katsir memaknai *muhaimin* dengan *mu'tamin* (menyetujui). Kata pembenar dalam redaksi ayat tersebut memberikan makna bahwa substansi dari kitab-kitab suci sebelum al-Qur'an masih belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan oleh al-Qur'an. Pada saat yang sama al-Qur'an juga menyebut *muhaimin*, hal ini berarti kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Nabi-nabi sebelum Muhammad memuat kebenaran yang tetap perlu dilestarikan dan diperkuat dengan turunnya al-Qur'an.

Mencermati argumentasi kelompok kedua di atas, dapat difahami bahwa kelompok ini memposisikan Islam dan kitab sucinya (al-Qur'an) sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Sikap yang demikian ini tidaklah salah, akan tetapi dalam penempatannya harus berhati-hati. Sebab jika salah dalam menempatkannya bukan tidak mungkin akan memicu persoalan keharmonisan di antara pemeluk agama. Setiap pemeluk agama akan berkeyakinan bahwa agama dan kitab sucinya adalah yang terbaik. Karena itu walaupun umat Islam ingin menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang paling benar, maka tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan, yakni dengan mengedepankan aspek rasionalitas dan kejujuran serta dengan menjunjung tinggi etika berdiskusi yang baik. Atau dalam redaksi al-Qur'an disebut dengan *bi al-hikmah, mau'idzoh hasanah*, dan *jidal al-ahsan*. Hanya dengan cara inilah kebenaran al-Qur'an sebagaimana diyakini umat Islam dapat ditransformasikan kepada orang lain tanpa harus menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

Berdasar pada keterangan di atas hendaknya dapat difahami bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang unik dan memiliki kandungan makna yang tidak akan habis apabila digali. Meminjam ungkapan Abdullah Darraz, sebagaimana dikutip Syihab (1998) bahwa al-Qur'an laksana intan, dimana setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut-sudut lainnya. Karena itu, tidak mengherankan apabila satu ayat sama terkadang

memungkinkan ditafsiri dengan dua hal yang berbeda atau bahkan bertolak belakang.

Menurut hemat kami, ayat-ayat yang berhubungan dengan pluralisem diatas harus dipahami dalam dua perspektif, yakni perspektif internal untuk kepentingan umat Islam dan perspektif eksternal untuk kepentingan orang di luar Islam. Dalam arti bahwa ketika ayat ini berlaku secara internal, ia dimaksudkan untuk memberikan *support* kepada umat Islam agar lebih memiliki kemantapan kepada agamanya. Hal yang demikian adalah sangat wajar, mengingat bahwa al-Qur'an sengaja diturunkan Allah sebagai pedoman bagi umat Islam. Kata *inda Allah* (di sisi Allah) dalam potongan ayat *inna al din inda Allah al islam* semakin menegaskan bahwa ayat tersebut bersifat khusus untuk pemeluk Islam, sebab Allah adalah Tuhan umat Islam. Kalaupun umat Islam berharap agar keberanaran ajaran Islam dapat juga dirasakan oleh umat lain, maka upaya ke arah sana harus dilakukan dengan cara yang elegan, yakni *bi al-hikmah, mau'idzah hasanah, dan al-jidal al-ahsan*.

Selanjutnya, dalam perspektif eksternal, ayat tersebut sudah barang tentu tidak bisa diberlakukan, sebab Rasulullah telah memberikan contoh bagaimana harus menghargai dan memperlakukan orang yang berbeda keyakinan dengan Islam sebagaimana dijelaskan dalam serangkaian hadits yang telah dipaparkan sebelumnya.

2.10. Pluralisme Agama Dalam Pespektif Hindu

a. Weda Mengajarkan Pesaudaraan dan Toleransi

Weda mengajarkan dan menekankan bahwa jiwa dari semua mahluk apakah itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan memiliki inti sinar suci yang sama. Semua tersusupi oleh sinar suci Tuhan Maha Kasih, Yang Maha Agung, Ida Sang Hyang Widhi. Tiada satu pun tempat yang kosong di alam raya ini dari kemurahan hati, keagungan dan kemuliaan Ida Sang Hyang Widhi. Seluruh jiwa mahluk berasal dari Sang Hyang Widhi (Parama Atma atau *supreme being*). Beliau adalah Ayah/Ibu utama dan pertama dari semua anak-anak-Nya.

Ida Sang Hyang Widhi memberikan sinar suci yang sama kepada semua makhluk, baik tinggi atau rendah, yatim piatu atau pangeran, orang suci atau *pendosan* (orang berdosa), dsb. Pustaka Yajur Weda menyatakan:

Dia yang menyusupi segalanya

Meliputi semua makhluk

Di dalam maupun di luar

(Yajur Weda XXXII.8)

Mereka yang memahami dan menghayati serta mengejawantahkan doktrin emas ini dalam hidupnya akan melihat bahwa semua makhluk di bumi ini adalah saudara yang sederajat yang memiliki percikan suci yang sama, seperti yang dia rasakan dalam dirinya sendiri, sehingga menjadi terbatas dari kebencian, kedengkian dan fanatisme.

Diuraikan pula dalam pustaka Yajur Weda bahwa:

Dia yang melihat seluruh makhluk dalam dirinya sendiri

Dan menemukan refleksi dari dirinya sendiri dalam semua makhluk

Tidak pernah memandang rendah siapapun.

(Yajur Weda XL.6)

Jadi, ajaran Hindu sangat memegang konsep persaudaraan dan kesederajatan. Ia memegang konsep persaudaraan universal yang berarti tidak hanya persaudaraan sesama orang Hindu, tetapi seluruh manusia dan makhluk di muka bumi ini. Seperti diuraikan pula dalam pustaka Bhagawadgita:

Sang Hyang Parama atman

Ada dalam hati semua makhluk.

(Bhagawadgita XVIII.61)

b. Weda Mengajarkan Nilai Hukum Kedamaian Universal

Hukum universal dalam Hindu disebut ***Rta*** (baca; Rita) yang memiliki arti bahwa semua yang ada di alam raya ini terkena hukum tersebut. Tidak ada bangsa terpilih, rakyat khusus dan non terpilih (terkutuk). Berlaku secara sama dan adil, tidak peduli warna kulit atau keyakinan. Tidak seorang pun di muka bumi ini,

betapapun besarnya dapat melawan atau melanggar hukum universal itu. Pustaka Reg Weda menyatakan:

***Dia yang teguh dalam tindakan
Yang mendirikan hukum-hukum tak terbatalan
Yang perbutan-Nya tanpa cacat
Memasuki dan menyusupi setiap hati
Untuk memegang kekuasaan-Nya atas semuanya.
(Reg Weda I.25.10)***

Adalah fakta yang diakui dan logis bahwa Yang Mahakuasa, Yang Maha Agung, Sang Pencipta alam semesta adalah satu, bukan dia. Tetapi manusia dengan keegoisannya senantiasa mengklaim bahwa itu adalah Tuhannya sendiri, yang lain tidak punya tuhan. Dia adalah orang tua bagi seluruh manusia bumi, apapun bangsa, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin, maupun keaggotaan masyarakat dan Negara mereka. Pusat pembelajaran pertama dan utama bagi manusia adalah keluarga. Weda menekankan akan adanya cinta kasih dan cahaya suci, kedamaian dan kemakmuran, kemanisan, kelembutan dan ketenangan dalam hidup bersama. Ia berarti hidup toleransi yang demikian tinggi. Bila hidup dalam keluarga dipenuhi kedamaian dan cinta, hormat dan penghargaan, harga diri dan kepantasan, perhatian dan integritas dalam setiap keluarga, maka akan membentuk masyarakat, bangsa dan Negara yang kuat. Itu sebabnya Sang Hyang Widhi mengajarkan dalam pustaka Atharwa Weda pelajaran tentang; cinta, harmoni, kelembutan dan persatuan dalam setiap keluarga. Keluarga dalam arti rumah tangga maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

***Hendaknya saudara laki-laki tidak membenci saudara laki-lakinya
Hendaknya saudara perempuan tidak membenci saudara perempuannya
Hendaknya kau bicara dan bertingkah laku dengan keselarasan dan
kelembutan
Hendaknya kau bersepakat dengan suara bulat.
(Atharwa Weda III.30.3)***

Kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan individu maupun keluarga benar-benar mendapat penekanan dalam ajaran Weda. Seperti diuraikan pula dalam pustaka Atharwa Weda, yakni:

Hendaknya anak laki-laki mengikuti tapak kaki ayahnya
Hendaknya ia mempunyai kesatuan pikiran dengan ibunya
Hendaknya istri bicara dengan suaminya
Dalam bahasa yang sopan, semanis madu.
(Atharwa Weda III.30.2)

Weda mengajarkan, hendaknya hidup individu dalam keluarga dan masyarakat senantiasa terikat antara yang satu dengan yang lain dalam harmonisasi yang terjaga. Hendaknya semua laki-laki dan wanita hidup dalam kebersamaan.

Hendaknya tempat minumnya sama
Hendaknya pembagian makananmu sama
Aku mengikatmu dengan ikatan bersama
Seperti semua jeruji sebuah roda disatukan pada pusatnya dari seluruh arah
Demikian engkau tetap bersatu
Untuk sembahyang bersama kepada Sang Hyang Widhi yang maha mulia.
(Atharwa Weda III.30.6)

Ajaran Hindu mendorong manusia untuk berkumpul mencapai landasan kebersamaan untuk berpikir bersama, membuat rencana bersama dan bekerja bersama guna mencapai tujuan bersama yakni terjadinya **Jagathita** (masyarakat yang aman, tentram, damai dan sejahtera) dan **Moksah** (kebahagian rohani tertinggi), seperti ditegaskan berikut:

Hendaknya sidangmu mencapai kesepakatan
Semoga engkau menjadi satu kelompok pesaudaraan
Semoga pikiranmu bergerak maju dengan persetujuan
Semoga hatimu bekerja dalam keselarasan untuk satu tujuan
Semoga engkau diinspirasi oleh cita-cita bersama

Semoga engkau mempersembahkan doa dengan persembahan bersama.

Hidup dalam kebersamaan ini memberikan ruang gerak toleransi yang demikian terbuka guna saling memperhatikan serta saling memahami antar individu maupun kelompok yang hidup dalam masyarakat dan Negara.

c. Weda Mengajarkan Non Kekerasan dan Persaudaraan Sederajat

Weda memerintahkan kepada manusia agar tidak saling menghina satu sama lain, tidak membenci orang lain. Sebab membenci orang lain berarti juga membenci dirinya sendiri, karena itu ditekankan agar manusia menghentikan kejahatan dan kebencian. Ajaran Weda menggariskan:

***Hentikan kebencian
(Reg Weda VI.10.7)***

Juga diuraikan dalam Weda, bahwa hendaknya manusia hidup dalam suasana persahabatan, sebab dunia akan menjadi tentram dan damai apabila kehidupan ini dilandasi oleh rasa persahabatan. Dalam Yajur Weda dinyatakan:

***Semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan bersahabat
Semoga kami memandang semua makhluk sebagai sahabat
Semoga kami saling berpandangan dengan penuh persahabatan
(Yajur Weda XXXVI.18)***

Kekerasan adalah tindakan menjijikkan dan buruk sekali menurut Weda. Weda mengajarkan manusia untuk tidak menyakiti dan tidak saling membunuh makhluk lain (*Ahimsa Karma*). Adalah sangat berdosa apabila menyakiti atau membunuh makhluk yang tidak berdosa.

***Adalah dosa yang paling keji
Membunuh makhluk yang tidak bersalah
(Atharwada X.1.29)***

Pengampunan dan *ahimsa karma* (*forgiveness and non-violence*) mendapat penekanan pertama dan utama dalam ajaran Weda. Para pengikut Weda mengajarkan untuk berdoa untuk memberikan hidup bahkan kepada musuh-musuh yang membenci. Mereka diajarkan untuk berdoa kepada Sang Hyang Widhi tidak saja bagi kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan mereka yang memusuhinya.

***Oh Hyang Widhi yang ramah
Anugerahkan hidup kepada yang menyimpan rasa jahat dan kebencian
terhadap kami
Biarkan dia sejahtera dan biarkan juga kami sejahtera
Semoga kami dianugerahi: ternak, anak cucu, rumah, kesehatan dan
kekayaan***

***Semoga semua sejahtera; semoga kami sejahtera.
(Atharwa Weda VII.81.5)***

Peradaban Weda yang agung dan halus mengangkat manusia dan seluruh lingkungan menjadi bermartabat dan lestari. Ia tidak dimaksudkan hanya untuk bangsa, keyakinan atau negeri tertentu, tetapi adalah untuk seluruh ras manusia beserta lingkungan alamnya.

d. Weda Mengajarkan Kebenaran Ilmiah dan Logika

Weda, sebagai pustaka suci tertua di dunia, sepenuhnya selaras dengan ilmu pengetahuan modern. Sehingga Weda berdasarkan atas agama, ilmu pengetahuan dan filsafat. Kebenaran ilmu pengetahuan dan logika telah tersurat dalam Weda secara tegas, seperti diuraikan dalam pustaka Yajur Weda:

***Bumi dengan airnya
Bergerak di sekitar matahari
Bumi berputar, dengan ibu air dengan orbitnya
Bumi berputar, di sekeliling ayahnya, matahari
(Yajur Weda III.6)***

Dalam bidang kedokteran ilmu penyakit, juga diakui bahwa apa yang diuraikan dalam pustaka-pustaka Weda adalah sangat ilmiah. Disebutkan bahwa penyakit disebabkan infeksi (virus, bakteri), makanan tidak sehat, polusi udara dan air yang terkontaminasi dst. Dokter-dokter Barat mulai menyadari reaksi yang diberikan dari *allopathy*. Mereka mulai menghargai kemanjuran penyembuhan alam dan obat-obatan Ayur Medik, seperti yang dijelaskan dalam pustaka Weda.

***Engkau orang terpelajar
Dapatkan pengetahuan tentang penyembuhan oleh aam
Di bawah air terdapat cairan
Yang dapat menyembuhkan penyakit belakang yang fatal
Air mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan semua penyakit
Dapatkan pengetahuan dan kekuatan ini
Bagi kehidupan yang sehat dan bagi semua kebaikan.***

(Reg Weda I.23.19)

Juga dijelaskan bahwa sinar matahari adalah salah satu bahan penyembuh penyakit, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani.

Cahaya matahari mengusir penyakit

Melenyapkan pikiran jahat

Juga menjauhkan kita dari dosa.

(Sama Weda 397)

Weda sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Slogan Weda adalah *bliss through knowledge* (kebahagian melalui ilmu pengetahuan). Weda menekankan adanya pembelajaran, penulisan maupun penjelajahan alam raya.

Jelajahi lautan

Jelajahi angkasa

Dan berbahagialah

(Yajur Weda VI.21)

e. Weda Mengajarkan Kehidupan Bebas Konflik

Filosofi Weda bergerak dan berputar pada inti hidup dalam persaudaraan dan kesederajatan. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih mulia dari yang lain. Tidak ada tuan, tidak ada budak, seluruh manusia memiliki hak yang sama di atas bumi ini. Pencipta alam (Sang Hyang Widhi) memperlakukan mereka sama, apakah mereka kulit putih, kulit merah, kulit kuning, kulit hitam atau sawo matang. Demikian juga apakah mereka pangeran atau yatim piatu. Semuanya hendaknya hidup dalam kesederajatan.

Hendaknya hati kita

Dalam kesederajatan dan persatuan

(Reg Weda X.191.4)

Weda (Hindu) di dasarkan atas prinsip emas *live and let live* (hidup dan biarkan hidup). Eksploitasi dalam bentuk apapun secara keras dilarang dalam Agama Weda. Sang Paramatman (jiwa suci) berada dalam hati seluruh umat

manusia. Weda memerintahkan untuk hidup dan membiarkan yang lain untuk hidup.

***Engkau dapat hidup
Dan biarkan juga aku hidup
(Athawarwa Weda XIX.69.1)***

Weda menyatakan bahwa tidak ada penderitaan di muka bumi ini yang lebih menyakitkan dari pada perbudakan. Seluruh kesulitan dan kesengsaraan, penganiayaan dan kekacauan tampak tidak berarti jika dibandingkan dengan penderitaan perbudakan. Karena tindakan memperbudak atau merendahkan manusia lain hendaknya dimusnahkan.

***Oh Hyang Widhi, yang bersinar cemerlang
Semoga orang yang memperbudak kami, dihancurkan di bawah kaki
Apakah dia dekat atau jauh, semoga Engkau bersama kami
Untuk kemajuan dan kemakmuran kami
(Reg Weda I.79.11)***

Weda tidak menyetujui adanya superioritas dari satu kelompok tertentu terhadap yang lain. Hendaknya tidak ada superior dan hendaknya juga tidak ada inferior. Sema adalah anak-anak yang sama dari Ayah yang sama. Semua manusia adalah anak-anak manis Sang Maha Pencipta (Sang Hyang Widhi). Semua mempunyai hak dan hendaknya hidup saling menolong dan saling menghormati.

***Semua pejalan
Yang melangkah di atas jalan
Memiliki hak yang sama
Atas jalan itu
(Reg Weda II.13.2)***

f. Interaksi Sosial yang Harmonis Berbasis Nilai-Nilai Lokal di Bali

Setiap daerah mempunyai nilai-nilai lokal (*lokal wisdom*) interaksi sosial dalam membina kerukunan antar dan inter umat manusia yang selalu berbeda. Seperti di Maluku dikenal istilah *Pela Gandong, Ain ni Ain*, yang berarti semua

bersaudara itu menjadi pengikat untuk menata kembali persaudaraan di dalam masyarakat Maluku. Ini berhasil mengurai konflik yang berpekanjangan antara umat Islam dan Kristen (Gatra, 2013: 20). Di Bali dikenal adanya ajaran *Tri Hita Karana* yang secara etimologi terbentuk dari kaya; *tri* yang berarti tiga, *hita* yang berarti kebahagiaan, dan *karana* yang berarti sebab atau yang menyebabkan, dapat dimaknai sebagai tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan. Selanjutnya hubungan yang dimaksud adalah *parahyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*. Ketiga hubungan tersebut meliputi:

- 1) Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan (*parahyangan*)
- 2) Hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia (*pawongan*)
- 3) Hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungannya (*palemahan*)

Dari ketiga isi Tri Hita Karana tersebut, khususnya yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia yaitu ranah *pawongan*, masyarakat Hindu dengan konsep *manyama-braya*, *paras-paros sarpanaya*, *salunglung sabayantaka*, dan *Tat Twam Asi* yang berarti “senantiasa ada dalam kebersamaan baik suka maupun duka, baik buruk harga sebagai milik bersama, tahu diri” adalah ungkapan yang sarat makna solidaritas sosial-budaya. Nilai-nilai solidaritas itu terpatri di hati masyarakat dan *krama pekraman* Bali karena nilai-nilai ini senantiasa mengajak manusia untuk mampu mengendalikan diri, hidup rukun, saling menolong antar sesama baik suka maupun duka. Ini semua yang mendasarinya semakin mempertegas eksistensi untuk tetap hidup rukun dengan siapa saja. Lebih-lebih lagi sesuai ajaran Hindu yang sangat yakin terhadap *Hukum Karma Phala* membuat kita semakin aman, damai, dan tenteram. (<http://adnyana-pebantenan.blogspot.com/2012/01>, diakses Kamis 12 Januari 2012). Banyak bentuk yang dilakukan dalam menjaga harmonis hubungan antar manusia, tentu semua itu tergantung pada lingkungan geografis, adat, budaya dan agama yang dianut dari masyarakat bersangkutan. Konsep ini mempunyai makna dalam hidup harmonis karena ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nilai solidaritas sosial-budaya itu memang lebih mengedepankan tali persaudaraan yang akrab diantara sesama manusia. (<http://okanila.brinkster> 2012, diakses 2 Februari 2013).

Tri Hita Karana, khususnya konsep *menyama braya* telah diaplikasikan di seluruh dunia, dalam berbagai bentuk aktivitas baik oleh perorangan, kelompok,

negara bahkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa. Tentu saja tidak menggunakan istilah bakunya. Tetapi yang penting bahwa manusia sedunia telah menyadari bahwa kebenaran konsep itu telah terbukti. Menyama braya berasal dari kata *menyama* berarti bersaudara dekat, sedangkan *braya* berarti saudara jauh. Saudara dekat dan saudara jauh tidak dibatasi oleh agama, suku, etnis dari seseorang, tetapi ada tidaknya hubungan darah atau keluarga dari seseorang. Di jaman yang global ini, bisa saja seorang yang beragama berbeda menjadi saudara dekat karena dalam perjalanan hidupnya saudara dekat tersebut pindah agama atau keyakinan karena sesuatu hal seperti faktor perkawinan. Saudara jauh, bisa tetangga walaupun dilihat dari jarak dekat, tetapi tidak mempunyai ikatan darah, seorang teman seperti saudara dengan segala perbedaannya, tetapi seperti saudara dalam kesehariannya.

Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar manusia, dan dengan lingkungan alam semesta perlu direvitalisasi. Demikianlah berbagai contoh dapat dikemukakan, misalnya manusia tak akan hidup tentram bila keyakinan akan adanya kemahakuasaan Tuhan goyah; manusia juga tidak akan merasa tenteram – damai bila terjadi konflik antar umat manusia baik dalam bentuk peperangan maupun aksi-aksi teror; manusia juga menyadari bahwa apabila ia merusak alam maka ia akan menjadi korban bencana alam. Berbagai organisasi tingkat regional, nasional, dan internasional telah dibentuk untuk mewujudkan *menyama braya* baik secara keseluruhan maupun sektoral. Kita mengenal adanya *WHO*, *Red Cross*, *Green Peace*, Dewan Keamanan PBB. Upaya manusia untuk menjaga kelestarian alam (*palemahan*) tidak mungkin dapat terwujud dengan baik bila ia melupakan bhakti kepada Tuhan (*parhyangan*), dan tidak menebarkan cinta kasih kepada sesama umat manusia (*pawongan*). Oleh karena umat manusia di dunia heterogen dalam artian memeluk berbagai agama dan kepercayaan, maka konsep Tri Hita Karana dapat saja disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kitab suci dari berbagai agama mungkin saja telah menyebutkan hal itu, atau mungkin lebih tegas lagi bahwa: bila manusia merusak alam atau lingkungan, maka alam-pun akan menghancurkan manusia. Ini adalah hubungan sebab – akibat yang sangat logis, dengan mencari berbagai contoh bencana-bencana alam yang disebabkan karena ulah manusia. (<http://stitidharma.org/trihitakarana/> diakses Jumat, 16 maret 2012).

Di Bali ada yang disebut *menyama braya* dan *mepisage*, bagaimana menjalin hubungan dengan sanak-keluarga dan handai taulan. Ada juga yang disebut *nempahan raga*, bagaimana menempatkan diri di antara orang banyak (yang mungkin sekali berbeda). Masih ada lagi yang disebut *desa-kala-patra* yakni manusia tidak bisa lepas dari ruang, waktu, dan suasana. Karena itu berpikir secara diakronis sangat penting sehingga mengetahui jiwa jaman. Dengan demikian diharapkan pemahaman budaya dan agama yang dianut tidak sempit. Budaya dan agama yang lahir di negara tertentu tentu praktiknya tidak dapat disamakan dengan di daerah yang lain dan waktu yang berbeda juga. Dalam konteks ini ada istilah “pribumisasi” yaitu bagaimana budaya dan agama yang lahir di negara tertentu dan tersebar di Indonesia disesuaikan dengan kondisi Indonesia melalui proses akulturasi. Peranan para tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama dsb sangat penting dalam hal ini sehingga kehidupan dapat rukun dan damai. Bila para pemimpin dan pemuka di Indonesia masih tetap lebih mengedepankan kepentingan kelompok, golongan dan pribadinya, dibandingkan dengan kepentingan nasional/bangsa/masyarakat, pluralisme akan menjadi jalan pintas untuk menciptakan kehancuran Indonesia. Pluralisme akan menjadi pembunuhan diri apabila perangkat kuat sakit dan bertindak semena-mena dalam menafsirkan dan menjalankan perangkat lunak. Karena itu sebenarnya banyak yang bisa dipelajari dari kearifan lokal. Untuk itu perlu dilakukan reinterpretasi, reposisi dan kodifikasi, bukan proses dekonstruksi yang berkesinambungan pada kearifan-kearifan lokal di berbagai kawasan Tanah Air. Dengan modal itu diharapkan akan dapat untuk menyehatkan atau meluruskan kembali perangkat keras yang mengalami *konsleuting* sesuai dengan konteksnya masing-masing.

2.11. Wisata dan Toleransi

Bali sebagai daerah tujuan wisata terkenal diseantero jagat bukan semata-mata karena pemandangan alamnya yang menakjubkan, tetapi ada hal-hal yang bersifat psikologis yang menyebabkan menjadi magnet mengga para wisatawan berdatangan. Faktor psikologis diantaranya adalah kenyamanan, keamanan yang semua ini terkait langsung dengan intraksi harmonis warganya walaupun terdiri dari berbagai perbedaan. Mungkin Bali lebih dikenal dari pada Indonesia, sehingga ada

pandangan bahwa "Indonesia sebelah mananya Bali". Karena itu setiap daerah di Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi tujuan wisata kalau mampu menciptakan faktor psikologis tersebut, tentu juga mempertimbangkan keunggulan budaya lokal dan selalu berinovasi diberbagai hal. Tanpanya suau daerah tidak akan menjadi tujuan wisata yang berkompetitif, apalagi sering terjadi konflik yang bernuansa SARA.

Bali dikenal dengan sebutan *Island of one Thousand Temples, Island of God* dan sebagai daerah destinasi wisata dengan penduduknya mayoritas beragama Hindu. Di sisi lain Bali juga menyuguhkan kehidupan yang harmonis dengan pemeluk agama yang berbeda, khususnya Islam terbukti dengan dikembangkannya wisata Wali Pitu. Inilah salah satu inovasi yang dilakukan untuk menarik wisatawan, khususnya wisatawan domisik. Sebagai daerah destinasi wisata harus mampu menyediakan dan memberikan jaminan para wisatawan merasa amaan dan nyaman. Kehidupan yang harmonis merupakan suatu keharusan ditawarkan dan disajikan kepada wisatawan sehingga mereka dapat mencurahkan segalanya baik perasaan maupun materi. Begitu juga tulisan ini, khususnya yang terkait dengan Bali sangat terkait dengan tujuan wisata sehingga bisa menjadi contoh bagi tempat-tempat lainnya di Indonesia. Begitu juga kantong-kantong harmoni di Malang Raya yang tidak mustahil dapat dikemas sebagai destinasi harmoni di Malang Raya. Destinasi wisata tidak akan terwujud kalau tempat tujuan destinasi tersebut tidak menyuguhkan keamanan, kenyamanan, masyarakat yang menerima perbedaan, singkat kata harus mampu menyuguhkan keamanan, kenyamanan baik secara psikologis maupun materiil.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996:1628) wisata berarti bepergian kemana-mana untuk bersenang-senang (melihat-lihat atau menikmati keindahan alam dsb.) atau untuk mempelajari sesuatu menambah pengetahuan. Dari definisi tersebut terdapat benang merah yang harus ditarik yaitu mengupayakan suatu tempat sedemikian rupa sehingga berfungsi untuk proses jual-beli dan tempat untuk bersenang-senang. Menurut MacIntos (Yoeti, 1996, pp. 85-86) mengatakan ada beberapa faktor pendorong seseorang mengadakan perjalanan wisata yaitu:

1. *Physical Motivations*

Hal ini banyak hubungannya dengan hasrat untuk mengembalikan kondisi fisik, beristirahat, santai, berolah raga, atau pemeliharaan kesehatan agar kegairahan bekerja timbul kembali.

2. *Cultural Motivations*

Motivasi ini erat hubungannya keinginan pribadi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata agar dapat melihat dan mengetahui negara lain, penduduknya, tata cara hidupnya serta adat-istiadatnya yang berbeda dengan negara lainnya.

3. *Interpersonal Motivations*

Disini motivasinya oleh keinginan seseorang untuk mengunjungi sanak keluarga, kawan-kawan, atau ingin menghindarkan diri dari lingkungan kerja, ingin mencari teman-teman baru dan lain-lain. Secara singkat motivasi ini erat hubungannya dengan keinginan untuk melarikan diri dari kesibukan rutin sehari-hari.

4. *Status dan Prestige Motivations*

Disini jelas motivasinya untuk memperlihatkan siapa dia, kedudukannya, status dalam masyarakat tertentu demi prestise pribadinya dan emosional.

Memperhatikan faktor-faktor yang menjadi motivasi orang berwisata lebih banyak pada orientasi kesenangan, wisata yang bersifat niaga belum nampak. Karena itu inisiatif, kreasi dari setiap daerah sangat perlu sehingga mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Dalam hal ini pembaharuan di bidang kepariwisataan sangat penting. Hendaknya *Tour Operator* daerah selaku perencana dan pelaksana *tour* harus memiliki daya khayal, imajinasi tentang lokasi-lokasi tertentu yang ada di daerahnya dikembangkan menjadi tujuan wisata. Wisata niaga yang dikombinasikan dengan wisata kesenangan (*hoby*) merupakan perpaduan yang sangat ideal dikembangkan di suatu daerah.

Munculnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri disegala aspek kehidupan, termasuk disektor pariwisata. Berbeda dengan masa Orde Baru pembangunan di segala bidang masih bersifat sentralistik, termasuk dalam bidang pariwisata. Kuatnya peranan Departemen dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam perencanaan dan implementasinya pembangunan di daerah yang menimbulkan instansi di tingkat lokal lebih banyak mengembangkan jalur interaksi vertikal dengan tingkat di atasnya. Instansi di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tidak mudah membangun inisiatif perencanaan dan implementasi pembangunan kepariwisataan, karena setiap tindakan dapat dipastikan tidak akan pernah berjalan dengan mulus tanpa dukungan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi (Sedarmayanti, 2005, pp. 148-149).

Undang-Undang ini memberikan angin segar dan sekaligus nuansa baru dalam perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Tetapi dilain pihak juga sebagai tantangan bagi Pemerintah Daerah, sebab untuk menyambut dan melaksanakan Undang-Undang ini diperlukan persiapan yang matang, terobosan baru, khususnya dalam upaya mengembangkan industri pariwisata. Pariwisata lokal (*Lokal Tourism*) sudah saatnya dikembangkan wisata semacam ini adalah pariwisata setempat yang mempunyai ruang lingkup relatif sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja misalnya kepariwisataan Kota Bandung, kepariwisataan Kota Surabaya dan

begitu juga kepariwisataan Kota Malang Raya dsb (Yoeti, 1996, p. 120). Kalau wisata ini dikembangkan dan mendapat dukungan dari masyarakat setempat dan pemerintah daerah tidak mustahil akan berkembang menjadi *regional tourism* yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu daerah tertentu tetapi mempunyai daya tarik internasional. Perkembangan ini diharapkan mampu memberikan keuntungan seperti; (1) meningkatkan pendapatan devisa daerah baik pemerintah maupun masyarakat, (2) perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan industri-industri masyarakat, (3) memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan potensi lainnya suatu daerah serta, (4) meningkatkan rasa persaudaraan baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

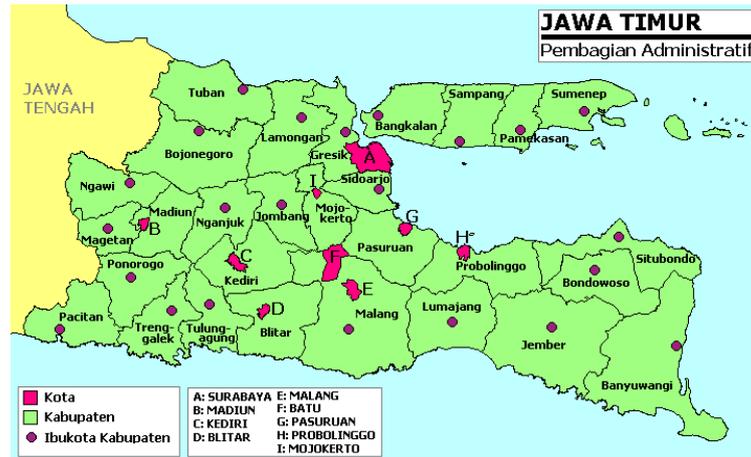
BAB III

HARMONI BERAGAMA DARI DESA DI MALANG RAYA

3.1. Kondisi Geografis Malang Raya

Secara geografis Malang Raya adalah wilayah dataran tinggi yang dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi di Jawa Timur. Gunung-gunung tersebut adalah; Gunung Semeru (di Timur) Gunung Kelud (di Selatan), Gunung Arjuna (di Utara) dan Gunung Panderman dan Kawi (di Barat). Karena itu Malang Raya memiliki udara yang sejuk bahkan pada bulan-bulan tertentu udaranya sangat dingin. Malang Raya secara administratif terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu yang terletak pada ketinggian antara 440-800 meter di atas permukaan air laut. Malang Raya merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklimnya yang menarik. Khusus untuk Kota Batu, kota ini baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Kabupaten Malang.

Secara astronomis Malang Raya terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Kondisi iklimnya selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara $21,7^{\circ}\text{C}$ - $25,1^{\circ}\text{C}$ dan terendah adalah $14,9^{\circ}\text{C}$. Sedangkan suhu maksimum mencapai $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $18,4^{\circ}\text{C}$. Rata kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Malang Raya mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Pebruari, Nopember, Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.



Peta 3.1. Peta Jawa Timur dan Letak Wilayah Malang Raya

Sumber: <https://www.kopi-ireng.com/2017/01/Peta-Jawa-Timur-Lengkap-Dengan-Daftar-29-Nama-Kabupaten-dan-9-Kota.html>

3.2. Bukti Awal Harmonisasi Hubungan Antar Agama di Malang Raya (Dalam Perspektif Historis).

Berbicara mengenai harmonisasi hubungan antar agama di Malang Raya, tentu kita harus merujuk dari struktur Malang Raya dalam bidang agama berdasarkan latar belakang sejarah. Ini sesuai dengan sifat sejarah yang bersifat *diakronis* yaitu segala peristiwa yang terjadi di muka bumi ini tidak hanya dilihat kekinian saja, tetapi hendaknya dilihat dari segi latar belakang historis dan struktur yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Malang Raya, pernah menjadi pusat-pusat kerajaan penting di Jawa Timur baik yang beragama Hindu, Buddha bahkan dalam perkembangan berikutnya bersifat sinkritisme diantaranya mereka dengan kepercayaan setempat. Karena itu pula tidaklah aneh sampai sekarang di Malang Raya masih terdapat wilayah kantong-kantong masyarakat penganut Agama Hindu yang dapat hidup berdampingan dengan umat beragama lain, termasuk umat Muslim.

Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Kanjuruhan. Kedudukan Kerajaan Kanjuruhan di Malang Raya yang secara faktual sampai sekarang masih dapat kita lihat adalah tegarnya Candi Badut di Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, lebih kurang 5 km sebelah barat Kota Malang. Bahkan sampai sekarang kata "Candi Badut" sudah menjadi perbendaharaan kata bagi masyarakat sehari-hari, begitu juga sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat *Arema* (Arek

Malang atau *Kera Ngalam*) sehingga sampai sekarang dua stadion yang berada di Malang Raya (Gajayana dan Kanjuruhan) diambilkan dari perbendaharaan kosa kata yang berhubungan dengan Kerajaan Kanjuruhan. Nama Gajayana, diambil dari nama salah satu raja Kanjuruhan, sementara Kanjuruhan diambil dari nama kerajaan itu sendiri.

Bagi masyarakat Hindu di Malang Raya, Candi Badut sebagai salah satu ikon peninggalan Hindu yang selalu dipakai sebagai tempat peribadatan setiap tahun sekali pada upacara *Ngembak Geni* yaitu berbuka puasa (setelah Hari Raya Nyepi). Masyarakat penganut Agama Hindu berkumpul di Candi Badut melakukan *Ngembak Geni*, sebagai rentetan dari Hari Raya Nyepi setelah mereka melakukan *Catur Tapa Brata Penyepian*. Upacara ini sekaligus menandai berakhir puasa (*amati geni, amati lalangan, amati lelungan dan amati karya*) bagi masyarakat Hindu. Disamping peninggalan monumental dalam bentuk Candi Badut, masih terdapat peninggalan prasasti yang lebih menyakinkan bahwa Kerajaan Kanjuruhan terdapat di Kota Malang yaitu prasasti Dinoyo yang berangka tahun 760 M. Angka tahun ini berdasarkan angka tahun Candra Sangkala *nayana Wasnu Rasa* = 682 Saka (Agung, 1991, p. 53). Bahkan berdasarkan prasasti-prasasti yang ada sebelumnya keberadaan Kerajaan Kanjuruhan yang beragama Hindu aliran Siwa ini merupakan kontinuitas dari pengaruh Hindu yang berada di Jawa Barat, Jawa Tengah yang karena suatu hal melakukan eksodus ke Jawa Timur. Dipilihnya Malang tentu dengan berbagai pertimbangan, diantaranya karena wilayahnya subur (udaranya sejuk) yang memungkinkan hidupnya berbagai jenis tanaman. Selain itu topografi Malang yang bergunung (dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi di Jawa Timur) sangat efektif sebagai benteng pertahanan kerajaan.

Menjelaskan proses pergeseran pengaruh dari Jawa Barat ke Malang, sekilas harus menganalisis beberapa prasasti dan peninggalan tertulis dari Cina (kroniek Cina) diantaranya; prasasti Kota Kapur (686 M). Prasasti ini terdapat di Bangka peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang isinya terkait dengan penyerangan Jawa oleh Sriwijaya. Dalam prasasti ini terdapat kalimat *tatkala bala Sriwijaya kaliwat manapik yang bhumi Jawa karena tida (k) bakti ka Sriwijaya*, artinya; saat pasukan Sriwijaya menyeberang ke Jawa karena Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya (Poerbotjaraka, 1976, pp. 34-36). Dari isi prasasti tersebut

tergambar intervensi Sriwijaya ke Pulau Jawa sehingga Tarumanagara runtuh dan perpindahan terjadi ke arah timur yaitu Jawa Tengah. Di sinilah kemudian muncul kerajaan yang bercorak Hindu yang menyebut dirinya Dinasti Sanjaya yang berdiri tahun 732 M berdasarkan Prasasti Canggal (prasasti yang tertua berangka tahun yang terdapat di Jawa).

Kanjuruhan sebagai bagian (*vasal*) kerajaan berdasarkan peninggalan yang ada sebenarnya sudah terinformasikan sejak Kerajaan Mataram Kuno pada masa Raja Balitung yang beberapa prasastinya memberikan petunjuk tentang nama-nama daerah yang ada di Malang Raya. Seperti Prasasti Kubu-Kubu yang isinya tentang anugrah Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung kepada Rakai Hujung bernama Dyah Mangarak dan *rakryan matuha* bernama Rakai Majuwuntan berupa tanah *tegal*, di Desa Kubu-Kubu untuk dijadikan *sima*. Watak Hujung terletak di Malang dengan wilayah di sebelah utara Sungai Brantas mulai dari wilayah Kota Batu sampai wilayah Malang Timur, dan Watak Hujung bertetangga dengan Kanuruhan (Kanjuruhan) dengan wilayah yang berada di selatan Sungai Brantas.

Prasasti lainnya yang berkenaan dengan nama daerah di wilayah Malang raya adalah prasasti Sangguran tahun 928 M yang dikeluarkan atas perintah Raja Wawa. Prasasti ini diketemukan di Dukuh Ngandat (masuk wilayah Kota Batu) yang memberitakan bahwa raja dan *Mapatih i Hino* Pu Sindok bernazar untuk menjadikan desa Sangguran sebagai wilayah *watak* kanuruhan sebagai *sima kajurugusalyan* di Mananjung. Perkataan *kajurugusalyan* memberi petunjuk bahwa anugrah tanah perdikan diberikan kepada komunitas khusus, yaitu para pandai logam (*gusali*) karena berjasa kepada. Berdasarkan Kroniek Cina tahun 742 M di Jawa Tengah terjadi perubahan yang sangat besar bahwa Ki-Yen memindahkan kota kerajaan ke arah timur yaitu P'olu-ka'a-sze yang diperkirakan nama lain dari Gersik. Tetapi menurut Slamet Mulyana (1981:59) daerah tersebut ada di lembah Sungai Brantas yaitu di Kota Malang yang pernah menjadi pusat-pusat kerajaan Hindu di Jawa Timur. Karena kalau dilihat dari segi geografis dan peninggalan-peninggalan arkeologis daerah ini sangat memungkinkan didirikan kerajaan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah terdapat benang merah bahwa Kanjuruhan sebagai kerajaan yang beragama Hindu tentu pula berasal dari nenek moyang yang beragama Hindu yaitu dari Jawa Tengah karena secara geografis juga

lebih dekat dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan Hindu sebelumnya yaitu Tarumanagara di Jawa Barat dan Kutai di Kalimantan Timur. Persamaan lain adalah bahan dan ornamen Candi Badut yang mengingatkan pada candi-candi di Jawa Tengah (Woyowasito, 1952, p. 33). Peranan Malang sebagai pusat kerajaan semakin mantap setelah munculnya Mpu Sindok sebagai raja pada abad ke-10 (929 M) dengan peninggalan prasastinya sebagaimana besar terdapat di Malang seperti prasasti Turyan (terdapat di Turen, Malang Selatan), prasasti Walandit (Wendit, sebelah Timur kota Malang), prasasti Gulung-Gulung yang menyebutkan sebidang tanah di Bantaran (nama desa di Kota Malang) dsb. Bahkan dilihat dari agama yang dianutnya sudah terjadi percampuran antara Hindu dan Buddha yang berarti benih-benih toleransi dan empati sudah terdapat di bumi Malang. Hal ini dapat dilihat dari buku kuno masa Mpu Sindok yang bernama *Sang Hyang Kamaharikan*.

Buku tersebut adalah buku agama Budha, hal ini terlihat dari kalimat awal yang menyebutkan *Namo Buddhaya* yaitu penghormatan kepada Sang Buddha, tetapi di lain pihak menyebutkan Catur Paramita yang juga disebut Brahma Wihara. Nama Brahma tidak terdapat dalam agama Budha, tetapi ini dikenal dan dipercaya sebagai Dewa Pencipta dalam agama Hindu. Proses sinkritis tersebut nampaknya semakin lama semakin efektif, kemudian dikenal dengan aliran Tantrayana yang merupakan percampuran antara Hindu, Buddha dan kepercayaan setempat. Hal ini nampak kemudian pada masa kerajaan berikutnya baik Singosari maupun Majapahit.

Kitab Pararaton dan Negarakertagama sebuah dokumen yang banyak memberikan informasi tentang kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, termasuk di Malang Raya. Kerajaan besar lainnya yang terdapat di wilayah Malang adalah Kerajaan Singosari yang bersifat sinkritisme karena pada umumnya raja-raja yang berkuasa bersifat Hindu-Buddha. Seperti pemberitaan Negarakertagama (pupuh XL), pada tahun Saka 1144 (1227) Ken Arok (Sang Girinata) kembali ke Siwa dicandikan di Kagenengan sebagai Siwa dan di Usana sebagai Buddha. Begitu juga dengan Wisnuwardhana dicandikan di Waler sebagai Siwa dan di Jajagu (Candi Jago) sebagai Buddha. Kitab lainnya yaitu Pararaton mengisahkan terjadi perebutan tahta dilakukan dengan jalan menyingkirkan Tunggal Ametung menggunakan senjata keris buatan Mpu Gandring. Semenjak tampil sebagai *akuwu*, penduduk di Timur

Gunung Kawi semakin segan karena kekuasaannya semakin besar. Orang-orang senang kalau Ken Arok menjadi raja karena pada saat itu terjadi sengketa antara Dandang Gendis dengan pendeta Siwa-Buddha. Hal semacam ini masih dapat terlihat di masa Kerajaan Majapahit, seperti raden Wijaya setelah wafat diberi gelar Bhatara Siwa-Buddha.

Beberapa bukti tersebut diatas, membuktikan paling tidak sejak abad ke-8 di Malang sudah terdapat kerajaan Hindu yaitu kerajaan Kanjuruhan yang dalam beberapa sumber disebut juga dengan nama Kanuruhan. Sejak abad ke-10 sejak masa Mpu Sindok terjadi sinkritisme yang menghasilkan aliran Tantrayana yang dapat hidup secara bersama-sama antara Hindu, Buddha dan kepercayaan setempat. Bahkan hal semacam ini terjadi di lingkungan keraton dengan diberikannya gelar Siwa-Buddha kepada para raja setelah mereka meninggal dunia baik di masa kerajaan Singosari maupun Majapahit. Pemberian gelar dengan menggabungkan dua agama ini menjadi bukti bahwa hidup berdampingan antara umat beragama sudah ditanamkan sejak awal. Begitu juga dengan kedatangan Islam hal ini masih dipertahankan bahkan sampai saat ini, terlihat keharmonisan hidup antara masyarakat Hindu dan Muslim di beberapa daerah di Malang Raya. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan arkeologis sebuah makam dari Ki Ageng Gribig (Islam) yang berlokasi di Madyo Puro. Nama ini mengingatkan pada nama tempat suci agama Hindu yaitu "Pura", dan di sekitar lokasi ini masih terdapat nama lain seperti Ngadi Pura, Lesan Pura.

3.3.Kiat Para Tokoh Islam dan Hindu dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama

Dari hasil penulisan lapangan diketahui bahwa umat Islam dan Hindu di Malang Raya dapat hidup secara berdampingan secara damai, penuh dengan sikap toleran dan saling menghargai. Dilihat dari jumlah pengikut, penganut agama Hindu di Malang Raya yang tersebar di lima Kecamatan; Pakisaji, Ngajum, Wagir, Sukun dan Kecamatan Bumiaji, adalah minoritas. Namun hal ini tidak menjadikan umat Hindu termajinalisi atau terintimidasi oleh mayoritas umat Islam. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya pembudayaan dan pemasyarakat nilai etis dalam waktu laama dalam masyarakat (Agung, 2015, p. 129). Realitas ini seperti dinyatakan oleh seorang tokoh Hindu dari Pakisaji:

“kami di sini memang minoritas, tetapi hubungan kami tidak ada masalah sejak saya di sini 20 tahun yang lalu, bahkan dengan kedatangan saya di sini masyarakat semakin terbuka, rukun karena mereka mengetahui ada kelompok lain selain muslim. Semua ini tergantung yang membawa diri”.

Senada dengan pernyataan seorang tokoh Hindu asal Kesamben Ngajum, menyatakan:

”sampai saat ini umat Hindu baik-baik saja, tidak ada masalah dengan umat Islam karena saling mencari solusi masing-masing kalau ada masalah. Saya sebagai Pengurus agama harus baik dengan pengurus agama yang lain. Bahkan anak saya salah satu diantaranya tidak beragama Hindu, tetapi dapat berjalan dengan baik dan dapat berdampingan dan saling menghargai”.

Hampir semua informan yang diwawancari mengatakan hal senada. Harmonisasi ini disebabkan adanya prinsip-prinsip kolektivitas universal yang menjadi pedoman dalam berinteraksi. Semua ini hendaknya berawal dari pendidikan harmonis di dalam keluarga yang empati terhadap segala perbedaan di dalam masyarakat. Seperti; “kalau saya mau dihargai hargailah orang lain”, “tatwamasii” aku adalah kamu, kamu adalah saya. Kalau kita dipukul, dicubit terasa sakit kita jangan memukul atau mencubit orang lain. Apalagi ucapan yang menyakiti orang lain, suatu hari juga kamu akan disakiti oleh orang lain. Itu yang selalu disampaikan baik bagi keluarga, jamaat maupun kepada masyarakat. Begitu

juga dengan ajaran “hukum karma”, kalau orang berbuat baik hasilnya baik, begitu juga sebaliknya. Dengan demikian sampai sekarang di Malang Raya belum pernah ada masalah antar agama dan mereka dapat hidup rukun.

Ketua PHDI Kabupaten Malang mempunyai pernyataan yang menarik dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Bahwa warisan nilai-nilai leluhur selalu diperkenalkan kepada umatnya. Lebih lanjut dikatakan, bahwa leluhur kita sudah memberikan warisan nilai, baik itu budaya, adat istiadat harus tetap diteruskan. Orang tua kita dulu, agama bukan nomor satu tetapi hidup guyub rukun, kegotongroyongan, hidup saling toleransi yang diutamakan. Kalau guyub kita menjadi kuat, apa yang kita tidak punya bisa dibantu oleh orang lain, kalau kita punya sesuatu kita bisa membantu tanpa memandang agama, budaya atau suku. Dari sana rupanya terus berkembang sampai sekarang. Interaksi secara terus menerus dalam waktu yang lama, sekali waktu akan terjadi benturan kepentingan, apalagi menyangkut keyakinan dan ini sangat sensitif. Nampaknya hal semacam ini sangat disadari oleh tokoh Hindu maupun Muslim. Karena itu terdapat kesepakatan-kesepakatan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antaranya; kalau umat Hindu ada masalah yang menyelesaikan adalah umat Hindu, begitu juga sebaliknya. Contoh kesepakatan tersebut adalah melakukan kegiatan setiap malam Rabu dan Kamis, kalau umat muslim biasanya malam Jumat melakukan tahlilan.

Peranan lembaga agama sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama, baik dari Hindu (PHDI) maupun Muslim (MUI). Lembaga ini di Malang Raya memberikan pembinaan terhadap umatnya untuk saling menghormati terhadap umat lain. Saling menghormati ini ditanamkan atas dasar hidup bermasyarakat yang berdampingan dengan umat lain. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menciptakan interaksi sosial yang harmonis adalah dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan damai di dalam masyarakat. Perlu selalu diciptakan interaksi sosial yang harmonis, yaitu saling tolong-menolong baik dalam keadaan senang maupun susah dalam segala hal. Kegiatannya tidak selalu secara terprogram, tetapi kiat-kiat tersebut dilakukan dengan spontanitas dan kondisional disesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut.

Hal senada disampaikan juga oleh tokoh-tokoh Muslim, bahwa hubungan antara masyarakat Muslim dengan umat Hindu berlangsung dengan harmonis. Adapun caranya adalah dengan mempertahankan situasi kerukunan yang sudah terjalin, diantaranya secara giat melakukan kerja bakti antar tempat suci, karena kedua umat telah terbiasa untuk saling membantu, baik Muslim maupun Hindu. Selalu memberikan penjelasan secara umum dengan gambaran nyata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, sehingga kurang bijaksana apabila menganggap hanya agamanya sendiri yang paling baik dan mentakan agama yang lainnya jelek. Bahkan tiap tanggal 1 setiap bulan diadakan pertemuan antara pengurus takmir dan pengurus Hindu yang merupakan inisiatif dari tokoh masyarakat. Sebagai tokoh, dalam tahlil kami sering menyerukan dan menyampaikan perdamaian dan sekaligus sebagai perangkat desa. Dalam forum Reboan dan Mingguan di umat Hindu juga menyerukan hal yang sama. Mengadakan pendekatan dan diwujudkan dalam kegiatan bersama, misalnya arisan barang yang dilakukan oleh ibu-ibu, perkumpulan pemuda baik dalam karang taruna maupun komunitas pencinta kesenian yang diadakan tiap tanggal 1 serta olah raga beladiri.

Pernyataan ini dipertegas juga oleh Tokoh Muslim lainnya, bahwa sampai saat ini alhamdulillah tidak ada prasangka, kami hidup rukun, bahkan ada keluarga yang berbeda agama. Kakaknya bangun Sanggar, Pura, adiknya yang lain ada yang bangun Musholla dan Gereja. Masyarakat disini juga guyup, dan saling tolong menolong. Konsep dan Prinsip-prinsipnya sederhana tetapi bermanfaat besar dalam menciptakan kehidupan harmonis seperti yang disampaikan oleh tokoh agama Islam yang lainnya “Iha wong sama hewan piaraan saja sayang *masak* sama makhluknya Allah *mboten* sayang”. Hal ini senada juga dengan pernyataan seorang pemuka agama Hindu, beliau adalah tokoh Hindu dari Karang Tengah, Pakisaji mengatakan;

“Ya.....perlu saling mematuhi kesepakatan, seperti kami melakukan kegiatan setiap malam Rabu dan Kamis, kalau umat Muslim biasanya malam Jumat melakukan tahlilan, pokoknya berdasarkan kesepakatan, andaikata pun ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan. Begitu juga setiap upacara di Pura, saya sampaikan terkait dengan kerukunan antar umat dan yang saya sampaikan kepada para pemuda bahwa yang menjadi

kebanggaan umat Hindu sampai saat ini belum pernah membuat masalah dari lingkungan tingkat bawah sampai atas dan bisa kita banggakan. Hindu cinta damai seperti ajaran Tatwamasi”.

Pemberian ucapan selamat Hari Raya antar umat beragama sudah biasa dilakukan, semua itu nampaknya sudah warisan leluhur. Tokoh Hindu, Ketua PHDI Kecamatan Ngajum mengatakan;

“Saling memberikan ucapan selamat hari raya baik bagi yang Muslim maupun Hindu. Karena disini tidak melihat orang agama apa, yang penting niatnya baik. Dan saya sebagai tokoh selalu menyampaikan kepada umat, hilangkan sekat agama, tetapi bukan berarti menghilangkan agama”.

Begitu juga dengan pernyataan Ketua PHDI Kota Batu;

“Ya.....saling betegur sapa, terasa tidak berbeda dengan agama kita sendiri sehingga rukun-rukun saja. Kalau ada undangan dari umat lain kita berusaha dating sebagai wujud hubungan yang baik. Dalam kegiatan seperti Idul Fitri, halal bihalal, mauludan keliling kampung mengucapkan selmat hari raya, begitu juga agama yang lain saling mengucapkan selamat hari raya. Ini kan memperluas jaringan kerukunan itu (Pariyanto). Pada saat ada kematian semua umat saling membantu. Bentuk lain adalah acara bersih desa, arak tumpeng keliling kampung dilakukan scara bersama-sama tidak melihat agamanya apa. Acara kenduri, selamatan, tahlilan saling mengundang bentuk kebersamaan. Odalan di pura umat selain Hindu juga datang melihat hiburan, bahkan mereka ikut main gambelan, mempersiapkan”.

Pernyataaan ini diperkuat juga oleh tokoh Hindu Dusun Codo, Petungsewu, bahwa:

“ kami sepakat melakukan program sosialisasi interaksi sosial yang harmonis, pendekatan yang dilakukan dengan memberikan penjelasan secara umum dengan gambaran nyata bahwa semua agama mengajarkan kebaikan yang notabene dengan ajaran yang berbeda pula. Sehingga kurang bijaksana apabila menganggap hanya agamanya sendiri yang paling baik. Berangkat dari adanya pertanyaan tersebut membina komunikasi yang baik antar umat perlu dilakukan”.

Sekretaris PCNU Kabupaten Malang, mengatakan:

“ Ya..Idul adha kegiatan sosial di basis umat lain, seperti di Tengger itu, dan murni kegiatan sosial, hal itu kami lakukan bersama umat Hindu disana. Memberikan stressing pada pengurus MWC NU untuk melakukan hubungan yang harmonis dengan umat lain untuk diteruskan kepada wilayah ranting NU dengan memberikan arahan untuk membangun kerjasama yang baik dengan umat lain”.

Ketua PCNU Kota Batu, mengatakan:

“ Kiat-kiat secara khusus tidak ada, karena secara otomatis dengan mengoptimalkan lembaga dakwah yang dimiliki hal itu sudah merupakan kiat juga. Selain itu dengan adanya perwakilan NU di FKAUB maka disana juga merupakan media yang tepat untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan agama lain, dan menunjukkan bahwa Islam Ahlus Sunnah (NU) menjunjung tinggi kebhinekaan”.

Tokoh Muslim di Karang Tengah, Pakisaji, mengatakan:

“ Yaniku mas, melalui tahlil dan kegiatan keagamaan di lingkup orang Islam saya menyampaikan pentingnya kerukunan. O ya, dalam kegiatan kerja bakti kami selalu bersama-sama termasuk seperti tadi dalam peringatan HUT RI, kami juga lakukan bersama-sama”.

Sekretaris PCNU Kota Kota Malang, mengatakan:

“ Saling mengundang dalam acara sosial dan mengadakan even sosial. Misalnya peringatan harlah atau hari besar nasional, dan pada peringatan wafatnya Gus Dur kemarin dari umat lain sangat luar biasa yang hadir, ini juga bukti jika NU mampu menampakkan wajah Islam yang bisa diterima oleh berbagai pihak”.

3.4.Bentuk-bentuk Interaksi Sosial Antara Umat Muslim dan Hindu di Malang Raya Dalam Menciptakan Integritas Bangsa

Dari hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara kepada informan, ternyata terdapat bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama

yang menyebabkan terbangunnya perilaku harmoni antara umat Muslim dan Hindu di Malang Raya. Karena itu di bawah ini secara berturut-turut akan dipaparkan hasil penulisan berupa bentuk kegiatan yang menyebabkan mereka bisa hidup harmonis yaitu; (1) kegiatan desa, (2) kegiatan kenegaraan, (3) kegiatan keagamaan, dan (4) kegiatan pelestarian budaya lokal.

1. Kegiatan Desa

Prinsip bahwa desa merupakan rumah bagi seluruh warganya telah menjadi prinsip yang mengakar bagi masyarakat Muslim dan Hindu Malang Raya yang hidup secara berdampingan. Mereka berfikir bahwa seluruh hal yang berhubungan dengan desa menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga desa tanpa melihat perbedaan agama. Semua warga desa mempunyai hak dan kewajiban bersama terhadap desa, baik yang berhubungan dengan pembangunan, pemeliharaan dan keamanan aset-aset desa. Membangun jalan, kerja bakti, membangun balai desa, musyawarah desa adalah sekian contoh kegiatan desa yang selama ini kegiatan bersama antara umat Muslim dan Hindu.

Komitmen kebersamaan yang tinggi di atas, didukung oleh keberadaan para tokoh agama yang juga berposisi sebagai pengurus desa, sehingga walaupun muncul persoalan yang menyangkut hubungan kemasyarakatan dan keagamaan di masyarakat dapat segera diselesaikan secara baik. Selain itu pentingnya keberadaan Peranan Badan Pengawas Desa (BPD), dimana para anggotanya rata-rata diambilkan dari penganut agama yang beragam. Forum ini disamping dijadikan sebagai media untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kepentingan komunitas desa, BPD seringkali dijadikan forum untuk membahas hal-hal yang terkait dengan hubungan antar agama. Sebab tidak dipungkiri bahwa terkadang muncul riak-riak kecil yang dapat mengganggu harmonisasi hubungan antarumat beragama yang telah terbentuk sejak lama.

Sebagai contoh, suatu ketika ada sebagian kecil komunitas Muslim (kelompok fundamentalis) mendakwahkan kepada umat Islam untuk melakukan pembatasan berinteraksi sosial dengan umat lain. Ketika muncul gerakan ini BPD melakukan pertemuan untuk membahas persoalan ini. Hasilnya semua anggota BPD menolak dan menganjurkan kepada warga desa untuk tetap berpegangan kepada prinsip-prinsip yang telah dibangun sebelumnya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Akhirnya gerakan tersebut tidak dapat berlangsung lama karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat, sehingga mereka menyesuaikan dengan kondisi setempat atau mereka pindah. Kondisi semacam ini menarik karena dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya tidak tinggi, tetapi mereka mempunyai kesadaran yang tinggi untuk hidup Bersama, saling menghormati

dalam perbedaan. Hal ini memperkuat bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak berbanding paralel dengan kedewasaan berpikir apalagi yang terkait dengan interaksi agama.

Kegiatan desa yang dapat mempersatukan dua komunitas yang berbeda adalah kegiatan “bersih desa”. Kegiatan ini hampir merata dilakukan oleh masyarakat yang berada pada kantong-kantong umat Hindu di Malang Raya. Bersih desa merupakan kegiatan desa yang dilakukan dan diikuti oleh semua warga desa guna berdoa bersama agar seluruh warga desa diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Biaya untuk menyelenggarakan upacara bersih desa ditanggung oleh semua warga masyarakat. Acara bersih desa puncaknya adalah pagelaran wayang kulit, namun di daerah tertentu seperti di Sukodadi (Wagir) acara puncaknya adalah tayub yang tempat pelaksanaannya di punden. Baik MUI maupun PHDI sebenarnya tidak mempunyai program khusus yang diintegrasikan dengan kegiatan desa dalam proses harmonisasi antar umat beragama. Bisa jadi hal tersebut disebabkan karena sampai saat ini belum pernah ada masalah yang berarti di Malang Raya antara umat Muslim dengan Hindu. Namun semua kegiatan desa yang menyangkut kepentingan masyarakat, tokoh-tokoh agama selalu dilibatkan, sehingga muncul saling memiliki dan tanggungjawab terhadap segala kegiatan desa.

Selain kegiatan bersih desa, kegiatan desa lainnya yang selama ini mampu mempersatukan umat Muslim dan Hindu adalah “gotong royong”. Gotong royong ini dilakukan misalnya untuk perbaikan sarana umum seperti perbaikan jembatan, saluran air, dll. Hal yang lainnya adalah dalam rangka bersih desa setahun sekali. Ketika dilakukan kegiatan gotong royong, semua warga ikut serta dalam kegiatan tersebut, tidak ada yang merasa lebih mulia karena perbedaan agama yang dianutnya, yang ada adalah kesejajaran sebagai warga desa. Tokoh Muslim dari Desa Banaran, Kecamatan Ngajum secara tegas juga mengatakan, bahwa selain bersih desa dan gotong royong terdapat kegiatan desa yang dapat menjadi media untuk meningkatkan kebersamaan dan harmonisasi antar umat Muslim dan Hindu, yakni kegiatan kematian. Semua warga, baik Muslim maupun Hindu melakukan iuran untuk pengadaan *pendoso* (tempat untuk membawa mayat dari rumah duka ke makam) berasal dari umat Muslim maupun Hindu.

Tidak jauh berbeda dengan gambaran di Desa Banaran, hal serupa juga terjadi di Desa Petungsewu. Tokoh Muslim dari Desa Petungsewu, Kec. Wagir, Kab. Malang menyatakan bahwa kegiatan kematian bisa menjadi kegiatan yang dapat merekatkan persaudaraan antara umat Muslim dan Hindu. Salah satu contohnya, jika ada diantara umat Hindu yang meninggal, pengurus takmir tidak segan-segan mengumumkan kematiannya melalui pengeras suara masjid. Kebersamaan lain bisa dilihat dari penggunaan peralatan kematian. Hampir dapat dipastikan, apa yang dipakai oleh umat Islam juga dipakai oleh umat Hindu, kecuali *lurup* (kain penutup pandosa), yang Islam bertuliskan huruf arab.

Khusus untuk kegiatan yang dilakukan oleh kaum Ibu, kegiatan arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mempersatukan dua komunitas ini. Seperti yang dikatakan oleh tokoh Hindu dari Desa Kesamben, bahwa arisan PKK dengan istilah *Reboan*, arisan dilakukan di masing-masing rumah ibu-ibu anggota PKK yang mendapatkan arisan, apapun agamanya. Hal senada juga disampaikan oleh tokoh Masyarakat/Ketua Ta'mir Masjid An-Nur, bahwa pada saat pihak desa mempunyai acara, seperti *suroan*, bersih desa, kematian, kerja bakti, semua unsur di desa terlibat dalam acara tersebut. Dalam kesempatan ini para tokoh agama memberikan arahan tentang pentingnya saling menghargai, saling menghormati dan tidak saling menyalahkan serta menyinggung keyakinan masing-masing agama. Sebagai contoh umat muslim hendaknya tidak lagi mempertanyakan mengapa umat Hindu menggunakan *sesajen*.

Kiat lain untuk keharmonisan beragama dilakukan dengan cara menyelenggarakan kegiatan sosial bersama. Sebagai contoh, sebagian masyarakat muslim yang diwakili oleh organisasi Anshor (organisasi otonom NU) melakukan bakti sosial bersama-sama dengan umat Hindu, bahkan sampai di Tengger dan daerah-daerah lainnya. Dalam hal ini ada baiknya dicermati pernyataan Ketua PCNU Kota Batu.

“Di tempat ini juga kami memberikan *stressing* pada pengurus MWC NU untuk melakukan hubungan yang harmonis dengan umat lain untuk diteruskan kepada wilayah ranting NU dengan memberikan arahan untuk membangun kerjasama yang baik dengan umat lain. Semua ini dapat dilakukan melalui pendekatan dan memfungsikan lembaga-lembaga desa

yang menekankan saling komunikasi dan menghargai yang dicontohkan oleh para pemuka agama baik Islam maupun Hindu. Untuk yang di internal ummat Islam, kami lakukan pendekatan pemahaman akan pentingnya kerukunan dan hidup berdampingan dengan agama lain”

Upaya lainnya juga dilakukan melalui media pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh tokoh Muslim dari Desa Petungsewu, Kec. Wagir, Kab. Malang bahwa di desa Petungsewu didirikan sekolah TK (Taman Kanak-Kanak Mentari) dari yayasan Islam. Pihak yayasan tidak membatasi muridnya dari kalangan Islam, tetapi umat Hindu pun diperbolehkan sekolah di sana. Hal serupa juga dilakukan oleh umat Hindu di Dusun Banaran, desa Babadan. Menurut tokoh Hindu setempat, di dusun tersebut juga didirikan sekolah TK Bhakti Persada (yayasan Hindu), yang membangun bukan saja orang Hindu tetapi semua masyarakat di sini, apapun agamanya baik Hindu maupun Islam, bantuan yang diberikan juga baik bentuk moril maupun materiil sehingga muridnya juga bukan saja yang beragama Hindu, bahkan banyak dari yang beragama Islam.



Foto 3.1: TK Bhakti Persada (Yayasan Hindu)

Sumber: Dokumen Pribadi

2. Kegiatan Kenegaraan

Sudah menjadi kelaziman bahwa kegiatan kenegaraan seperti memperingati hari-hari besar nasional (HUT RI dsb.) sudah tentu dilaksanakan secara bersama-sama seluruh warga negara sebagai wujud kesadaran akan satu-kesatuan bangsa. Biasanya masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik sebagai panitia ataupun partisipan, terdiri dari masyarakat lintas agama. Perilaku ini menunjukkan bahwa semua warga negara apapun agamanya, yang mayoritas atau minoritas, memiliki kepedulian yang sama terhadap bangsa dan negara.

Gambaran di atas, juga berlaku di wilayah kantong-kantong umat Hindu di Malang Raya. Setiap melakukan kegiatan HUT RI tokoh-tokoh keagamaan baik dari umat Muslim maupun umat Hindu diundang untuk bersama-sama membicarakan susunan acara serta pembentukan panitia dalam upaya memeriahkan hari kemerdekaan tersebut. Jadi, dari masing-masing ketua kelompok agama saling mengkoordinir anggotanya untuk bergerak dan berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Tidak hanya itu, ada pula kegiatan yang dilakukan bersama-sama misalnya perbaikan sarana umum yang nyata sekali membutuhkan banyak orang untuk melakukannya. Seperti yang disampaikan oleh tokoh Islam dari Desa Karang Tengah, Kecamatan Pakisaji bahwa dengan kegiatan bersama, misalnya kerja bakti, peringatan hari besar nasional dan bertukar pendapat dengan umat lain secara baik dan alhamdulillah mengedepankan musyawarah, hubungan antar umat Muslim dan Hindu berjalan dengan baik sampai saat ini.

Melalui kegiatan bersama kepemudaan seperti kesenian, olah raga, kerja bakti, kadang juga ada penyuluhan bersama, di kerja bakti dan yang utama adalah shilaturahmi itu, karena dapat meningkatkan persaudaraan dan kerukunan.



Foto 3.2: Perayaan HUT RI di Dusun Junggo, Kota Batu

Sumber: Dokumen Pribadi

3. Kegiatan Keagamaan

Di wilayah kantong-kantong Hindu di Malang Raya, umumnya penduduknya adalah masyarakat asli setempat (*native*) sehingga di antara mereka apapun agamanya sudah terbentuk proses interaksi yang positif. Bahkan dalam satu keluarga terdapat perbedaan agama, ada yang beragama Hindu dan Islam.

Andaikatapun terdapat penduduk baru biasanya hanya berasal dari dusun atau desa tetangga yang masih mempunyai kesamaan *sosio-cultural*. Oleh sebab itu interaksi mereka masih mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur yang mengedepankan kerukunan dan keguyuban. Bahkan terdapat pandangan bahwa sebagian dari mereka melihat agama bukan nomor satu, tetapi yang lebih penting adalah kerukunan dan keguyuban antar warga.

Keguyuban kerukunan tersebut bukan saja dalam kegiatan-kegiatan sosial, tetapi juga keagamaan. Salah satu tokoh Hindu menjelaskan:

“Saling memberikan ucapan selamat hari raya bagi masyarakat sini adalah hal biasa, bahkan setiap Hari Raya Nyepi mereka (umat Muslim) semua datang mengucapkan Hari raya Nyepi baik muda, tua maupun para ibu-ibu. Begitu juga pada malam setelah tahlilan umat Muslim semua datang memberikan ucapan Hari Raya Nyepi, karena umat Islam di sini termasuk kelompok yang moderat. Sebaliknya kalau Idul Fitri saya juga datang bersama keluarga, ke semua warga Muslim di sini, begitu juga kalau tahlilan selamatan seperti orang mati dari 7 hari, 40 hari dst saya juga diundang dalam rangka selamatan itu. Kalau ada kegiatan keagamaan seperti malam Idul Fitri, terdapat proses keliling membawa oncor anak-anak saya ikut juga berpartisipasi. Begitu juga kalau Nyepi atau Galungan saya undang *selamatan/kenduri* melakukan *ngujub* dengan doa bahasa Jawa, mereka juga dari masyarakat muslim hadir semua. Pada saat pembangunan masjid atau langgar saya juga membantu seperti semen secara ikhlas demi kebersamaan, mereka juga menerima tanpa ada perasaan apa-apa. Ini buktinya masyarakat muslim disini terbuka”.

Pengakuan tokoh Hindu tersebut kiranya tidak berlebihan, Ibu-ibu tohoh Hindu dari Kecamatan Wagir mengatakan, bahwa “kami di RT sudah terbiasa dengan kegiatan buka bersama untuk menghormati saudara-saudara yang muslim bahkan ibu-ibu PKK yang beragama Hindu memasak untuk warga muslim yang sedang berpuasa”.

Hal senada juga disampaikan oleh tokoh Hindu di Banaran, bahwa menjelang datangnya Hari Raya, baik hari raya umat Hindu atau Islam selalu dibicarakan pada pada tingkat desa.

“Pada perayaan Nyepi supaya kusuk melaksanakan Dharma Santi, kami mengundang umat lain dan saya memberikan sambutan sepatah dua patah kata, dalam kesempatan ini pula waktu yang baik (terutama umat Hindu) menyampaikan pentingnya hidup rukun antar sesama . Misalnya saya mempersiapkan Dharma Santi maka tenaganya dibantu oleh umat muslim, membatu materiil seperti membuat joglo, terop, panggung hiburan, walaupun tetap dipandu oleh umat Hindu. Mereka datang memberikan ucapan Hari Raya Nyepi (selamat nyepi pak !). Sama dengan mereka, saya juga datang kepada mereka, tetangga yang meyarakan Idul Fitri mengucapkan selamat Idul fitri”.

Ketua PHDI Kabupaten Malang, yang bermukim di Pakisaji menjelaskan bahwa di desa tempat beliau, tinggal masyarakat masih tetap melakukan ritual seperti *selamatan*, *kajatan*, *mitoni*, *manusia yadnya* atau yang lain. Upacara seperti ini tidak hanya diikuti oleh umat Muslim saja tetapi juga oleh umat Hindu

“Apabila kami mempunyai acara selamatan, biasanya kami menggunakan cara-cara agama Hindu, umat Islam yang kita undang ikut menyesuaikan saja tidak apa-apa. Sebaliknya yang muslim mengadakan *tahlilan* yang Hindu diundang, walaupun tidak bisa bahasanya tetapi tetap diam yang penting bisa datan. Di sinilah kami umat Hindu harus menunjukkan kerukunan dan itulah yang menyebabkan orang-orang masih tetap melihat agama tidak ada yang minoritas dan mayoritas. Islam yang mayoritas, Hindu yang minoritas, tetapi yang diutamakan kerukunan, maka kehidupan kami disini *akor-akor* (rukun) saja”.

Saling pengertian, itulah kuncinya. Seperti yang disampaikan oleh tokoh Adat Desa Jedong, Kecamatan Wagir, bahwa pada rangkaian upacara peringatan hari raya Nyepi, untuk melaksanakan prosesi *Taur Agung/Taur Kasanga*, umat Hindu meminta ijin kepada umat Muslim karena pelaksanaannya bersamaan dengan waktu umat Muslim beribadah shalat maghrib. Karena pernah pada suatu waktu ketika dilaksanakan “*kirab ogoh-ogoh*”, umat Muslim banyak yang melihat acara tersebut, sehingga lalai melaksanakan shalat. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari umat Muslim apakah perlu dilakukan *kirab ogoh-ogoh*. Umat Hindu memberikan pengertian kepada umat Muslim bahwa acara tersebut bukan

merupakan acara tontonan, melainkan sebuah prosesi rangkaian yang benar-benar harus dilaksanakan dengan ke hikmatan.

Dan hal ini dapat dimengerti oleh umat Muslim sehingga tidak sampai menimbulkan perselisihan. Mungkin karena hidup dalam komunitas yang berbeda dalam waktu yang lama, pasti terdapat gesekan, tetapi dapat diselesaikan secara arif. Seperti yang dikatakan oleh tokoh Muslim Desa Petungsewu, Kecamatan Wagir bahwa pernah terjadi sedikit masalah yaitu pada hari Minggu umat Islam mengadakan istiqhotsah dan diolok-olok oleh umat selain Islam. Hal ini dapat diselesaikan dengan mengatakan “jangan memperlakukan hari tertentu untuk kegiatan keagamaan, lihat itu seorang tokoh agama saja mempunyai agama yang berbeda dengan istrinya”, tetapi mereka bisa hidup rukun dan tidak pernah bertengkar. Dengan analogi seperti itu permasalahan dapat diselesaikan sampai saat ini.

Bentuk kerja sama yang lain menurut tokoh Hindu Desa Gondowangi, Kecamatan wagir, bahwa interaksi masyarakat Gondowangi berjalan harmonis terlihat pada saat pembangunan pura. Umat Muslim tanpa diminta datang untuk membantu, baik bantuan materi maupun tenaga. Begitu pula sebaliknya, umat Hindu juga membantu ketika umat Muslim melaksanakan kerja bakti untuk memperbaiki atau membangun masjid. Tidak ada program khusus yang dilakukan untuk menjalin dan menumbuhkan interaksi yang harmonis antara umat Muslim dengan umat Hindu. Karena pada dasarnya masing-masing masyarakat sadar bahwa mereka hidup berdampingan satu dengan yang lain dan saling membutuhkan. Jadi bila ada salah satu warga yang mengalami kesusahan, mereka tanpa pandang bulu ikhlas untuk membantu. Jadi aktivitasnya bersifat spontanitas saja yang terjadi di masyarakat.

Pengalaman menarik dalam hubungannya dengan toleransi ini bisa dilihat di Desa Sukodadi. Tokoh Hindu setempat menuturkan bahwa beberapa tahun yang lalu pernah terjadi Hari Raya Idul Fitri bersamaan dengan Hari Raya Nyepi sehingga ketika umat Muslim merayakan hari raya Idul Fitri, setelah melakukan shalat ied umat Muslim datang ke rumah orang-orang Hindu untuk meminta maaf. Hal ini juga terjadi sebaliknya. Umat Hindu kemudian datang ke umat Muslim untuk memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Hal seperti ini juga dilakukan oleh

umat Muslim, diantaranya disampaikan oleh tokoh Muslim dari Desa Banaran, Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum. Umat Muslim dan Hindu selalu bekerja sama dalam kerja bakti, bahkan bangun Musholla maupun Pura kami juga saling membantu. Waktu takbir, umat Hindu pun juga ikut takbir keliling dan *melekan*, yang penting tidak saling mengganggu. *Nggih* itu tadi, dengan menanamkan aqidah dan bermasyarakat yang baik di jamaah tahlil, masjid, musholla dan kumpul-kumpul dengan umat Hindu untuk saling berkoordinasi. Menyampaikan *mau'idloh* dalam *tahlil*, khutbah dan memberi contoh berhubungan yang baik dengan sesama. Secara umum sebagai manusia harus saling baik dan saling menghormati sesama manusia. Lebih lanjut beliau katakan kalau ada umat Hindu yang meninggal yang memeberikan doa juga umat Muslim, dan itu sudah biasa dilakukan.

Tokoh Pemuda Hindu di Kecamatan Wagir menegaskan bahwa segala kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga tidak selalu disikapi negatif. Misalnya, doa sampai malam bahkan pagi hari tidak disikapi sebagai kegiatan yang mengganggu, tetapi sebagai anugrah. Melalui program kegiatan tahlilan atau kegiatan rutin yang ada, kami mengedepankan rasa kekeluargaan, persaudaraan, mengutamakan kebersamaan, jiwa saling bantu. Kerja sama dalam bidang keagamaan juga terlihat dalam proses pembangunan rumah ibadah. Hal ini seperti dikatakan oleh Tokoh Masyarakat/ Ketua Takmir Masjid, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji,

"Inggih rumaos kulo sae-sae mawon, harmonis, mboten wonten masalah (Ya, menurut saya baik-baik saja, harmonis, tidak ada masalah). Malah masjid depan ini(menunjuk di depan rumahnya) waktu ngecor banyak dari ummat Hindu yang ikut membantu. Termasuk juga waktu ada hajatan di rumah orang Hindu, yang datang juga banyak yang muslim.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua PHDI Batu dan Tokoh Hindu di Dusun Junggo, bahwa pembagunan pura Giri Arjuna di Dusun Junggo, Kec, Bumiaji, Kota Batu pada saat pembagunan pura tersebut banyak mendapat bantuan dari umat Muslim setempat. Bantuannya dalam bentuk tenaga, maupun penggunaan mobil pribadi untk mengangkut materiil pura. Begitu juga pembuatan *ogoh-ogoh* sampai pengusungan ke tempat tujuan pada saat Hari Raya Nyepi dibantu oleh para pemuda umat Muslim.



Foto 3.3 : Umat Hindu dan Muslim bersama-sama membangun Pura Giri

**Arjuna di Dusun Junggo, Kota Batu
Sumber: Dokumen Pribadi**

Untuk membina kerukunan yang sudah ada, segala kegiatan di desa selalu dilandasi dengan kesepakatan antara umat Muslim dengan Hindu seperti yang terjadi di Dusun Codo, desa Petungsewu Kecamatan Wagir, misalnya:

- a. Hari Minggu sore adalah waktu bagi umat Hindu, khususnya WHDI untuk melaksanakan kegiatan rutinnnya, yaitu sarasehan Minggu.
- b. Sarasehan umum umat Hindu dilakukan setiap malam Minggu
- c. Hari Jumat sore adalah waktu yang diberikan kepada umat Muslim Ibu-ibu untuk melaksanakan tahlil.
- d. Malam Jumat adalah tahlil untuk Bapak-bapak, dsb.

Dari penjelasan terdahulu dapat dikatakan bahwa pimpinan umat, baik Hindu maupun Muslim terlihat ada komitmen yang konsisten untuk membangun kebersamaan. Di setiap kegiatan desa kedua tokoh umat selalu memberikan arahan yang sifatnya menggiatkan umatnya untuk lebih selalu bersemangat dalam menjalankan ajaran agama dan demi meningkatkan kebesamaan dan harmonisasi. Posisinya sebagai tokoh agama, masyarakat dan kedudukannya sebagai perangkat desa adalah sangat strategis di dalam masyarakat berkaitan dengan program harmonisasi hubungan antar agama. Dalam hal inilah para tokoh berusaha memperlakukan umat Muslim dan umat Hindu seadil-adilnya, hal ini dapat dibuktikan dalam program pembangunan sarana ibadah, kedua umat saling

bekerjasama untuk saling membantu proses pendiriannya. Intinya, para tokoh berusaha mendorong kedua agama ini untuk saling maju berjalan beriringan.

Pemerintah selalu menekankan kehidupan yang rukun antar pemeluk agama, melalui FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama), kegiatan-kegiatan yang menyangkut kebersamaan selalu mengedepankan kompromis, dialog. Melalui pertemuan rutin yang sering dibahas adalah terkait dengan pendirian rumah ibadah, kegiatan-kegiatan kebersamaan yang lainnya termasuk kegiatan kenegaraan, bukan substansi ajaran agama, tetapi termasuk pelaksanaan ajaran agama yaitu *dharma agama*.

4. Kegiatan Pelestarian Budaya Lokal

Di Malang Raya, khususnya di daerah kantong-kantong umat Hindu, hubungan dengan umat Muslim dapat hidup dengan rukun, harmonis. Pemahaman ajaran agama yang baik sangat nampak dalam praktik kehidupan mereka. Kehidupan yang harmonis, rukun tanpa masalah yang berarti dalam waktu yang lama adalah bukti dari hubungan yang harmonis antara umat Muslim dan Hindu. Melaksanakan budaya warisan leluhur ikut memberikan andil akan hal itu, walaupun terkadang praktik budaya tersebut tidak terdapat dalam ajaran agama yang mereka anut. Ritual bersih desa atau *nyadran*, masih mereka lakukan. Kegiatan ini dilakukan di *punden* (dipercaya tempat bersemayamnya tokoh pendiri desa tersebut), mereka datang membawa *encek* berisi tumpeng setiap Senen Pahing (satu tahun sekali), yang dipimpin oleh juru kunci walaupun mereka agamanya Islam atau Hindu. Mereka adalah orang yang dituakan di desa tersebut. Begitu juga dengan bersih desa yang dilaksanakan oleh semua agama setiap setahun sekali. Ritual ini dilaksanakan pada bulan besar, biasanya tidak jauh waktunya dengan Idul Adha atau bagi yang beragama Hindu melaksanakannya sebelum Hari Raya Nyepi.

Karena ini untuk keselamatan desa, semua orang yang ada di desa apapun agamanya, Hindu, Islam dan Kristen ikut melaksanakannya. Akhir-akhir ini pemimpin kegiatan ini adalah dari umat Hindu, tetapi juga dari umat muslim karena mantranya bukan mantra agama, tetapi mantra Jawa. Mereka membawa sesaji, pisang, hasil bumi lengkap dengan lauk pauknya sebagai sesaji dengan dupa atau

menyan. Puncak dari acara ini adalah pagelaran wayang kulit, namun di Sukodadi, Kecamatan Wagir acara puncaknya adalah *tayub* yang bertempat di punden. Kegiatan lainnya adalah sunatan massal, pengobatan gratis diikuti oleh semua warga tanpa melihat dari agama yang dianutnya walaupun yang menyelenggarakan dari agama yang berbeda. Hindu dan Muslim selalu saling menyesuaikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pada umumnya mereka mempunyai prinsip saling mengalah, kalau mereka percaya dengan Hindu silakan beragama Hindu begitu juga yang percaya dengan Muslim silahkan memeluk agama Islam. Seperti yang dikatakan oleh tokoh Hindu, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, di desa masih tetap dilakukan selamatan atau *kajatan*, *mitoni*, *manusia yadnya*, mereka saling mengundang, kemudian menggunakan cara-cara agama yang dianutnya yang lain menyesuaikan. Pelaksanaan ruwatan, mitoni itu bukan Islam, tetapi budaya nenek moyang. Bahkan dapat dikatakan di Malang Raya ritual semacam ini tetap dilaksanakan sampai saat ini. Seperti selamatan anak masih di dalam kandungan *tingkeban*, setelah lahir *mitoni*, walaupun agamanya Hindu atau Islam karena tujuannya sama yaitu supaya menjadi anak yang *soleh* dan *soleha*, *seputro* dan *seputri*.

Pada prinsipnya semua itu tujuannya baik yaitu mereka tetap hadir dan melaksanakan tanpa melihat dari agama apa yang melatar belakangi pelaksana upacara itu. Cuma yang muslim biasanya tidak tahu prosesnya seperti apa, sarananya apa, tetapi tetap dilakukan sehingga kami yang Hindu diajak urun rembuk sehingga upacara itu bisa dilaksanakan. Kalau ruwatan disini pasti ada wayang kalau tidak dilaksnakan, kurang *marem* atau mantap walaupun mereka bergama Islam. Tetapi karena mereka sudah mantap mereka lakukan, bahkan ada perasaan berdosa kalau itu tidak dilakukan, karena ada perasaan tidak lengkap kewajiban orang tua terhadap anaknya. Tentang waktunya biasanya malam hari, padahal seharusnya siang hari/pada saat matahari diatas kepala kita. Semua ritual itu dilakukan oleh masyarakat, ini bukan berarti tidak fanatik terhadap agamanya, tetapi kefanatikan itu tidak ditempatkan didepan atau diperlihatkan pada orang lain, tetapi yang dikedepankan adalah sifat toleransi dan melaksanakan ajaran leluhur.

Mata pencaharian mereka di wilayah-wilayah kantong umat Hindu pada umumnya adalah petani, mereka lakukan ritual secara bersama-sama mulai dari

membajak sawah, menanam sampai panen. Walaupun mereka muslim, mereka tidak berani meninggalkan budaya itu, begitu juga pada saat sunatan juga masih menggunakan sesajen itu. Kalau upacara di sawah yang memimpin upacara di sawah oleh *sesepuh* atau *tukang metik* (orang sudah mempunyai cucu), bisa dari orang yang bergama Hindu atau Islam. Sesepeuh disamping sudah ada umur juga menguasai tata cara upacara *kejawen*. Kalau mantra-mantranya dari bahasa Jawa (menggunakan kata *pikulun*), walaupun mereka agamanya Islam. Kegiatan petik padi ini biasanya dilakukan sore pk.16.00 dan malamnya melaksanakan kenduri mengundang tetangga.



Foto 3.4: Sesepeuh Dusun Karang Tengah Mepimpin upaca petik padi

Sumber: Dolumen Pibadi

Upacara petik padi, masih dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Muslim, mereka merasa ini bukan ajaran Hindu tetapi ajaran leluhur, sebagai ungkapan rasa terima kasih karena bisa panen kepada Dewi Sri (padi), Sri Kuncung (jagung) dan Sri Manis (tebu). Untuk melaksanakan ritual ini dipimpin oleh seorang *sesepuh* desa (orang yang dituakan), menggunakan konsep Jawa dengan doa-doa ditujukan kepada Dewi Sri. Kalau ada orang Islam yang melakukan petik padi, mereka juga memanggil *sesepuh* desa. Tidak setiap orang berani menjadi pemimpin ritual tersebut, mereka takut keliru kalau keliru bisa kesurupan. Sama seperti bersih desa dilakukan oleh orang-orang khusus walaupun mereka beragama Islam. Mereka sangat menyadari sesama orang Jawa yang berasal dari leluhur yang sama sehingga ajaran leluhur wajib dilaksanakan dan diwarisi. Tukang metik tidak sama dengan dukun, kalau dukun melayani orang untuk pengobatan, mintak hari-hari baik dan tukang petik bisaberfungsi keduanya sebagai *dukun* dan *tukang petik*. Dukunnya

juga umat Hindu, yang mintak hari baik bukan saja orang Hindu, tetapi juga umat yang beragama Islam.

Ritual padi lainnya yang tetap dipertahankan adalah upacara “*pari meteng*” yang masih dilaksanakan masyarakat Gondowangi (Kecamatan Wagir) sampai saat ini. Ritual ini dilaksanakan di *punden* oleh semua umat, setiap *Suro ahad wage*, begitu juga dengan upacara bersih desa. Melalui acara desa tersebut, interaksi yang harmonis memang benar-benar terjadi karena seluruh warga desa berkumpul bersama-sama, melakukan gotong royong demi terselenggaranya acara tersebut. Lebih lanjut dikatakan oleh tokoh Islam Dusun Karang Tengah, dalam selamatan panen sering kali disuruh memimpin doa oleh tetangganya, walaupun beragama Hindu. Hal ini tidak masalah karena sudah biasa serta menurutnya bukan kegiatan keagamaan, tetapi aktivitas yang bersifat budaya. Pada saat umat muslim mau berangkat haji, saya mengajak semua warga untuk membuat air minum, dan semuanya terlibat. Seperti acara bedah rumah, kami tidak pandang bulu apa agamanya, arisan bahan bangunan untuk warga miskin. Dan di kegiatan-kegiatan tadi kami juga menyampaikan pentingnya kerukunan, meskipun secara santai dan *guyon* (bergurau).



Foto 3.5: Setelah upacara petik padi masyarakat (Hindu dan Islam) bersama-sama menikmati hidangan di sawah

Sumber: Dokumen Pribadi

Gotong royong adalah bentuk interaksi yang dipertahankan, merupakan tradisi warisan leluhur, sehingga apapun kegiatan desa dilandasi oleh kebersamaan.

Seorang tokoh muslim, dari Dusun Banaran, Desa Babadan, Kecamatan Ngajum mengatakan, apapun yang dilakukan yang penting kita baik dengan sesama, kekeluargaan dan mengedepankan musyawarah. Utamanya adalah warganya rukun, gotong royong dijunjung tinggi dan dalam menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Misalnya melakukan gotong royong membangun rumah yang dilakukan tanpa pandang bulu apa agamanya. Ya! sebagai tokoh atau panutan harus bisa memberi contoh. *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. Dalam acara peringatan kematian, biasa menyembelih sapi ataupun kambing termasuk umat Hindu. Kedua jenis hewan ini netral (tidak diharamkan) bisa dikonsumsi oleh umat Hindu maupun Islam sehingga dapat menyatukan umat Islam maupun Hindu. Ini sebagai wujud upaya bersama untuk melestarikan budaya setempat.

Tokoh Masyarakat/Ketua Ta'mir Masjid An-Nur, dari Dusun Junggo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu ; pelestarian budaya lokal dilaksanakan melalui acara selamatan yang ada, karena masyarakat disini sangat suka selamatan, makanya hal itu saya gunakan untuk menyampaikan hal-hal tentang keagamaan dan kerukunan, karena yang diundang juga umat Hindu. Lebih lanjut beliau mengatakan, pada dasarnya masyarakat di batu berawal pada kayakinan yang berakar dari animisme dan dinamisme, oleh karena itu di Batu hampir setiap desa memiliki *punden* sebagai tempat untuk memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Hal ini terjadi secara turun temurun, termasuk di Dusun Junggo. Dan salah satu ciri khas yang ada di masyarakat Junggo dalah sangat senang selamatan. Dalam satu musim panen bisa sampai 3-4 kali selamatan. Diawali dengan selamatan *tandur* (menanam) dan diakhiri pada selamatan penen. Dalam kegiatan tersebut tidak pandang bulu, apapun agamanya baik Islam maupun Hindu, mereka melakukan bersama-sama sampai acara selamatan (*kenduri*). Mereka sangat menyakini bahwa semua itu berakar dari akar budaya yang sama yang dilakukan oleh masyarakat yang pada umumnya masih bersaudara, walaupun agamanya berbeda.



Foto 3.6: Salah satu jenis sesajen yang ditancapkan di sudut sawah

Sumber: Dokumen Pribadi

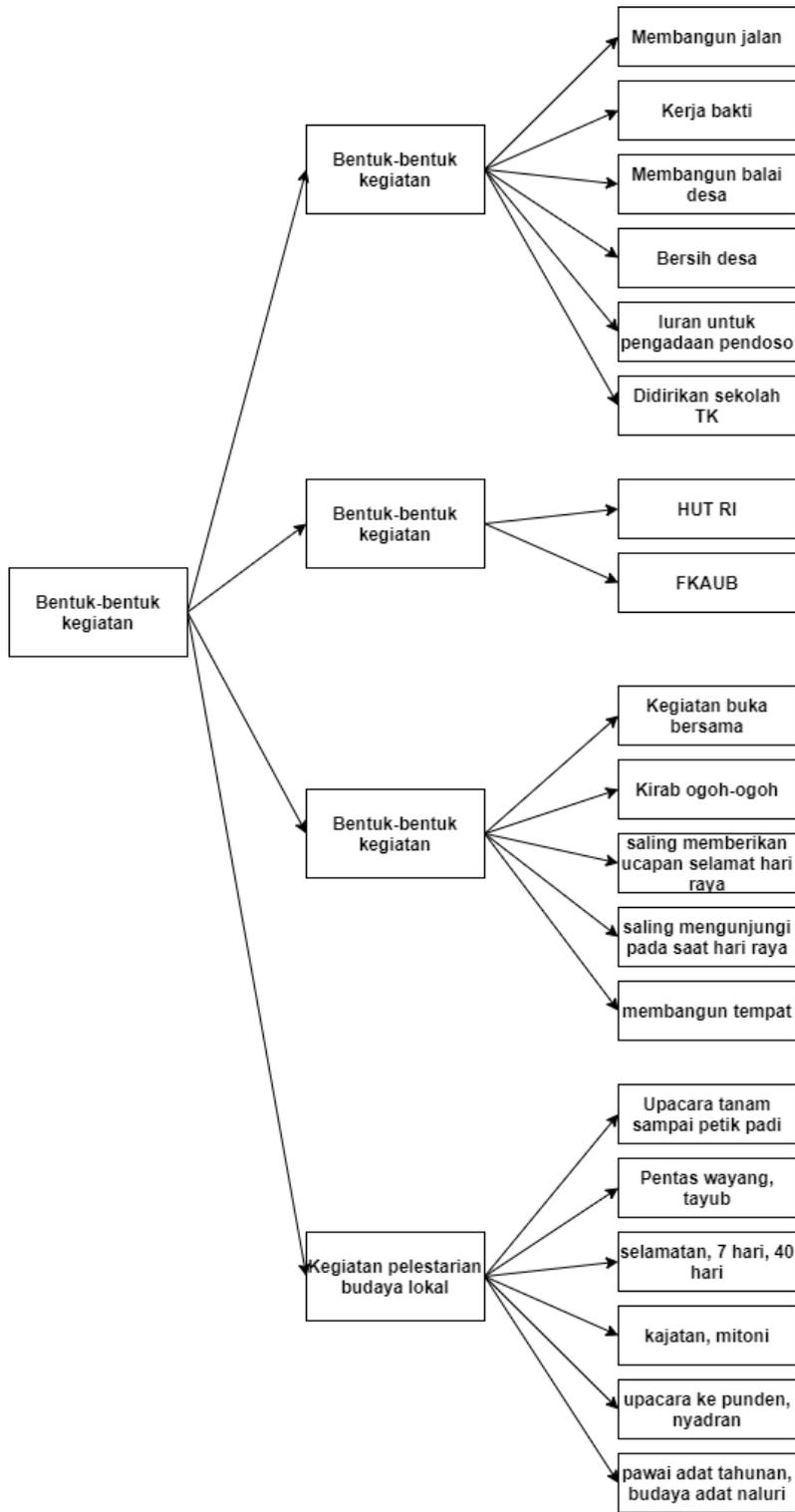
Memberikan pengertian tentang sejarah agama-agama di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Sekretaris PCNU Kab. Malang, bahwa materi kotbah yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama sangat penting untuk hidup harmonis. Bahwa hubungan harmonis disebabkan karena sejarah Hindu- Budha, dakwah Islam dengan bentuk tanpa kekerasan, dengan pendekatan *kultur*, melakukan *akulturasi* budaya. Prinsip *kejawen* juga sangat strategis seperti yang dikatakan oleh Tokoh Masyarakat/ Ketua Takmir Masjid, dari Desa Karangpandang, Kecamatan Pakisaji; keharmonisan itu bisa terjaga prinsipnya asal kita bisa baik dan menghargai orang lain pasti orang itu juga akan baik kepada kita. Rasa kekeluargaan yang diwariskan oleh nenek moyang perlu dilestarikan. Karena dalam hidup beragama kita harus baik dengan sesama manusia, apapun agamanya.

Upaya pelestarian budaya lokal terus diupayakan, seperti yang diampaikan oleh Ketua PHDI Kota Batu dan tokoh Hindu di Desa Junggo, bahwa di Dusun Junggo hal ini dilakukan melalui acara tahunan bernama “budaya adat naluri”. Dalam acara ini ditampilkan berbagai budaya lokal seperti tari-tarian, pakaian adat dsb.



Foto 3.7: Upacara Bersih Desa sebagai pelaksanaan “budaya adat naluri”

Sumber: Dokumen Pribadi



BAB IV

HARMONI BERAGAMA DARI DESA DI KABUPATEN BANGLI, BALI

4.1. Kondisi Geografis Kabupaten Bangli, Bali

Kabupaten Bangli adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Pulau Bali, terletak 400 meter di atas permukaan laut. Terletak di sebelah timur laut kota Denpasar kota beriklim sejuk berjarak 40 kilometer atau satu jam perjalanan dari Kota Denpasar. Merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak mempunyai wilayah laut, meski demikian Kabupaten Bangli menyimpan sejumlah potensi wisata yang menjanjikan seperti keindahan panorama gunung dan danau Batur di Kintamani. Kabupaten Bangli berbatasan dengan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Klungkung dan Karangasem di timur, dan Kabupaten Klungkung, Gianyar di selatan serta Badung dan Gianyar di sebelah barat. Kabupaten Bangli terletak diantara 1150 13' 48" sampai 1150 27' 24" Bujur Timur dan 80 8' 30" sampai 8 31' 87" Lintang Selatan. Posisinya berada ditengah-tengah Pulau Bali, sehingga merupakan satu-satunya Kabupaten yang tidak memiliki pantai/ laut.



Peta 4.1: Pulau Bali dan Letak Kabupaten Bangli

Sumber: <https://www.google.com/search?q=peta+bali&safe=active&client=firefox-beta&hs=Zjr&rls, 2013>

Bila dilihat dari penggunaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada sekita 2.890 Ha merupakan lahan sawah, 29.087 Ha merupakan lahan kering, 9,341 Ha merupakan hutan Negara, 7.719 Ha merupakan tanah perkebunan dan sisanya

seluas 3.044 Ha merupakan lahan lain-lain (jalan, sungai dan lain-lain). Luas wilayah Kabupaten Bangli mencapai 520,81 kilometer persegi atau 52.081 hektar secara administratif Kabupaten Bangli dibagi menjadi 4 kecamatan 4 kelurahan dan 56 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 197.210 jiwa. Menempati bagian tengah pegunungan dan dataran tinggi Pulau Bali suhu udara di daerah bangli cukup sejuk bahkan dingin di malam hari untuk wilayah Kintamani dengan cuaca sejuk khususnya daerah pegunungan kintamani bangli menjadi daerah penghasil buah-buahan yang berkualitas baik. Berada pada ketinggian di atas 400 meter di atas permukaan laut daerah pegunungan di Bangli Utara menjadi penghasil bambu terbesar di Bali bangunan-bangunan tradisional di hampir semua daerah Bali menggunakan bambu dari Bangli sebagai bahan struktur atap.



Foto 4.1: Tugu Masuk Kota Bangli

Sumber: Dokumen Pribadi

Posisi Kabupaten Bangli berada ditengah-tengah Pulau Bali. Kabupaten Bangli sebagian besar daerahnya merupakan dataran tinggi, hal ini berpengaruh terhadap keadaan iklim di wilayah ini. Keadaan iklim dan perputaran atau pertemuan arus udara yang disebabkan karena adanya pegunungan di daerah ini yang menyebabkan curah hujan di daerah ini setiap tahun relatif tinggi. Hal ini terjadi pada bulan-bulan Januari, Maret, April dan Desember. Hal ini berpengaruh terhadap keadaan iklim di wilayah ini yang relatif sejuk.

Kabupaten Bangli memiliki iklim tropis, suhu udara relatif rendah berkisar antara 150 –300 C, semakin ke utara suhu semakin dingin. Angka

curah hujan rata-rata tahunan terendah adalah 900 mm dan tertinggi 3.500 mm. Penyebaran curah hujan relatif tinggi (2.500-3.500mm) meliputi bagian utara (lereng Gunung Batur) dan semakin rendah ke arah selatan wilayah. Curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember –Maret dan terendah pada bulan Agustus. Daerah Bangli juga termasuk daerah vulkanik yaitu bekas letusan Gunung Batur dan Gunung Agung. Di daerah semacam inilah padi dapat tumbuh dengan subur sebagai daerah pertanian menetap yang paling intensif seperti daerah Indonesia lainnya (Kertopermono, 1989, p. 5). Disamping kondisi geologis tersebut, faktor iklim juga cukup besar pengaruhnya terhadap penggunaan tanah. Curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 162,70mm. Berdasarkan kriteria hujan, bahwa apabila curah hujan lebih kecil dari 60mm termasuk bulan kering.

4.2. Kondisi Sosial-Budaya

Kondisi geografis daerah Kabupaten Tingkat II Bangli yang lebih terisolir, sehingga mobilisasi penduduk tidak seperti penduduk daerah lainnya. Mobilisasi penduduk tersebut nampaknya sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengaruh wisatawan dan sebagainya yang memberikan keterbukaan berpikir bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Masyarakat Kabupaten Bangli masih memegang aturan-aturan secara tradisional yang belum terkontaminasi dengan sifat-sifat kehidupan perkotaan yang modern seperti sifat individual, materialis dan sebagainya.

Terlepas dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, keluarga (geneologis), secara sosiologis mereka terhimpun dalam organisasi yang bernama Desa Adat. Didalamnya terdapat empat sistem sosial yang mengikat mereka yaitu sistem klan (*Dadia*), sistem tingkatan (*Kasta*), sistem masyarakat (*Banjar*) dan sistem kelompok dalam minat dan pekerjaan yang dikenal dengan nama *Seka* (Jensen & I.K., 1996, p. 14).

Sistem *Dadia* adalah gabungan keluarga besar yang mengakui berasal dari leluhur yang sama. Dalam hubungan ini anggota keluarga secara berkala bertemu bersama pada suatu tempat upacara yang bernama *Sanggah* atau *Pemerajan*. Organisasi ini bukan semata-mata bergerak dalam bidang sosial, ekonomi, tetapi

juga politik. Menurut Geertz, Dadia adalah unit dasar dari negara di Bali, sehingga terbentuknya Dadia terkait dengan proses perkembangan politik (Geertz, 1975, pp. 118-119). Sedangkan Banjar adalah sub-unit dari Desa, sering juga kehidupan sosial ini diidentikkan dengan Desa Adat. Seka adalah suatu kelompok sosial dibentuk berdasarkan kriteria yang tunggal dan eksklusif, kriteria keanggotaan yang dicurahkan untuk mencapai tujuan sosial yang tertentu dan biasanya agak khusus, misalnya keagamaan, politik, ekonomi. Secara gampangnya tipe Seka dapat dibagi atas lima kategori utama yaitu; (1) jemaah kuil, (2) kesatuan tempat tinggal (3) masyarakat pengairan dan pertanian, (4) kelompok kekerabatan, dan (5) perkumpulan yang bersifat sukarela (Geertz, Penjaja dan Raja, Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia, 1989, pp. 89-90). Menurut Freek L. Bakker, inilah organisasi kemasyarakatan yang paling kecil di Bali (Bakker, 1987).

Desa Adat merupakan lembaga pemerintahan tradisional yang diselenggarakan menurut aturan-aturan adat yang bersifat otonomi. Desa adat ini menciptakan kaidah-kaidah sendiri baik berupa aturan-aturan tidak tertulis maupun tertulis (*awig-awig*) sehingga dapat dikatakan komunitas yang memiliki otonomi sehingga berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Desa adalah lembaga yang komplis dengan hak dan kewajiban yang sama dari setiap warganya yang disatukan oleh persembahan terhadap para dewa di tiga pura (Pura Puseh, Dalem dan Pura Desa), sehingga diibaratkan sebagai republik yang kecil (Covaarubias, 1974, p. 73). Suatu sistem dari organisasi kemasyarakatan merupakan bagian kebudayaan yang bersifat universal. Sistem ini di dalam organisasi kemasyarakatan di Bali terwujud dalam bentuk desa adat, banjar, subak, seka, tempekan dan kelompok sosial lainnya yang berdasar pada latar belakang keturunan yang sama. Memang tidak diketahui secara pasti, kapan berdirinya desa adat tersebut sebagai satu kesatuan yang homogen tetapi kompleks. Desa adat ini lebih dikenal dengan nama Banjar yang dipimpin oleh Klian Banjar. Sebuah banjar adalah sub-unit dari sebuah desa yang meliputi wilayah geografis tertentu yang terdiri dari sekitar 50-100 keluarga. Dan anggota setiap banjar harus saling membantu dalam urusan perkawinan, pesta keluarga, kematian, membangun rumah, memperbaiki pura dan mengurus pesta desa (Astawa, 1982, p. 218). Nampaknya desa adat merupakan

perkembangan dari desa perdikan atau sima, merupakan desa khusus, bersifat otonomi berdasarkan pada Agama Hindhu. Desa adat yang berarti tempat kejujuran (desa= tempat, adat= kejujuran) dalam rangka mencapai keselamatan lahir dan bathin. Untuk mewujudkan semua ini, ada tiga keseimbangan yang harus dipenuhi yaitu; keseimbangan hubungan antar manusia (pawongan), dengan alam (palemahan), dan dengan Tuhan (parhyangan) yang dilandasi oleh sifat kejujuran. Konsep ini dikenal dengan nama Tri Hita Karana. Konsep ini menjadi pedoman kerja khusus bagi setiap orang di Bali, teristimewa pada organisasi Subak yang berbeda dengan pedoman Desa Adat yang berdasar pada Khayangan Tiga.

Ada beberapa istilah yang mempunyai hubungan dengan istilah desa adat yaitu; Sima, pada mulanya berarti patok atas batas suatu wilayah atau juga berarti wilayah. Dan kemudian berubah arti menjadi patokan-patokan atau ketentuan-ketentuan tidak tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dresta, yang pada mulanya berarti pandangan, kemudian bertambah luas pengertiannya menjadi pandangan suatu masyarakat mengenai suatu kejadian di masyarakat, dan Paswara, berarti suatu keputusan raja mengenai suatu masalah dalam masyarakat. Dari sekian istilah yang ada, yang masih lasim dipakai sampai sekarang di Kabupaten Tingkat II Bangli adalah sima, merupakan ciri khas aturan adat yang membedakan dengan aturan adat dari daerah lain, dan krama, yang berarti kumpulan orang atau masyarakat. Munculnya desa adat di Bali, sering dikaitkan dengan tokoh Mpu Kuturan yang diperkirakan bersal dari Pulau Jawa. Beliau ini disebut-sebut sebagai tokoh yang terkenal dalam sejarah Pulau Bali yang hidup pada masa Sri Udayana Warmadewa pada abad X. Beliau adalah tokoh pendiri Khayangan Tiga (Tri Khayangan) yaitu Pura Puseh, Dalem dan Pura Desa sebagai simbol dari siklus hidup. Pura Puseh, sebagai simbol kelahiran yaitu untuk pemujaan Dewa Brahma (pencipta), Pura Desa, sebagai simbol pemeliharaan untuk pemujaan Dewa Wisnu, dan Pura Dalem, sebagai simbol penguasa maut untuk pemujaan Dewa Siwa. Ketiga pura tersebut mutlak adanya dalam desa adat dan menjadi pemujaan (sungsungan) dari setiap warga masyarakat adat. Karena itu di ketiga pura ini juga sekaligus menjadi tempat berinteraksinya warga masyarakat sebagai wujud kehidupan sosial dengan mengaplikasikan hak dan kewajibannya, terutama pada saat dilaksanakannya upacara keagamaan. Berdasarkan Lontar Usana Bali,

didirikannya Khayangan Tiga tersebut oleh Mpu Kuturan sebagai upaya untuk menyatukan berbagai sekte yang ada, sehingga dengan cara ini merupakan upaya sosiologis dan religius untuk mengikat masyarakat Bali. Dalam lontar ini juga disebutkan, bahwa kedatangan dan kebijaksanaan Mpu Kuturan dapat memberikan kebahagiaan orang Bali, sehingga setiap tanaman dapat hidup dengan subur, harga barang murah dan hubungan antar sekte sangat rukun (Soebandi, 1983, pp. 99-100) Inilah yang menyebabkan setiap orang Bali patuh terhadap ajaran Mpu Kuturan tersebut, sehingga secara organisatoris sangat mengikat terhadap setiap orang Bali yang beraga Hindhu dalam segala sendi kehidupannya (Geertz, 1980, p. 33). Sejak itulah mulai dikenal dan diterapkan desa adat di Bali, termasuk di Kabupaten Bangli. Karena itulah terkesan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari sangat sulit dibedakan antara aturan adat dan agama, karena seorang melanggar aturan adat berarti juga melanggar aturan agama, begitu juga sebaliknya. Kerja sama yang lebih populer dengan nama gotong-royong sangat nampak disini, dengan hak dan kewajiban yang jelas dari setiap anggotanya. Kewajiban, melaksanakan ayahan desa (tugas-tugas krama desa) seperti; (1) kerja bakti memperbaiki atau membangun pura-pura milik desa adat, (2) menyelenggarakan upacara Dewa Yadnya (ngodalin) di pura milik desa, (3) melaksanakan mecaru (upacara Butha Yadnya), dan (4) melaksanakan pembangunan-pembangunan lainnya untuk kepentingan desa adat. Hak-haknya, diantaranya; (1) memilih kepala desa adat, (2) ikut dalam rapat (sangkepan) desa adat, (3) ikut dalam pemerintahan desa adat bersama-sama dengan prajuru (pengurus) lainnya, (4) berhak dipilih menjadi prajuru dan sebagainya (Raka, 1990, pp. 10-11).

Gotong-royong atau kerja sama saling membantu dan menguntungkan, awalnya muncul dari konsep kerjasama dalam keluarga, akhirnya meluas dalam kehidupan masyarakat dengan seorang pemimpin. Perkembangan ini dirasakan akibatnya yaitu menguntungkan, menyenangkan dan mempermudah dalam mencapai tujuan. Walaupun pada mulanya terbatas pada upaya kerja sama untuk mencapai tujuan, tetapi karena manfaat yang dirasakan sangat positif, maka gotong-royong masuk dalam pemerintahan desa (Grand, 1964, pp. 96-97). Di Bali gotong-royong nampak dalam kehidupan krama adat, terutama dalam masyarakat pedesaan. Kota Bangli seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah sebuah

kota kecil yang terpencil, kehidupan gotong- royong masih nampak, bukan saja di daerah-daerah pedesaan tetapi juga di daerah perkotaan. Sifat gotong royong dilandasi oleh filsafat *segilik*, *seguluk* dan *sebayan taka*, artinya sebagai warga masyarakat harus bersatu, mempunyai tujuan yang sama dan suka duka dirasakan bersama. Dan cita-cita tolong menolong, merupakan dasar kebersamaan (kolektivitas) dan dasar perekonomian berkoperasi. Adanya suatu corak kerakyatan yang berciri kekeluargaan dalam masyarakat desa adat, merupakan suatu realita adanya. Dalam desa adat, setiap anggota mempunyai kemerdekaan (*liberty*), persamaa (*equality*) dan persaudaraan atau kekeluargaan (*fraternity*). Dan ini merupakan dasar pokok pada kehidupan persekutuan dalam masyarakat desa adat (Widya, 1981, p. 13).

Terdapat juga pandangan lain, bahwa Desa Adat ibaratkan tubuh manusia, sebagai satu sistem yang saling terkait dan membutuhkan. Manusia dalam hal ini yang hidup dalam Desa Adat terkait dengan berbagai aturan-aturan yang ada. Seperti aturan akan batas-batas desa yang ditetapkan dengan upacara sebagai sumber kehidupan, pura (khayangan tiga) sebagai kepalanya, teritorial adalah badannya, nafasnya adalah gerak dari warganya, dan jantungnya adalah para prajuru Desa Adat. Pembentukan semua ini dilakukan dengan upacara, disucikan atau diberi jiwa. Kalau ada penambahan karang desa, tanah sawah menjadi rumah warga atau tanah desa diambil untuk dialih fungsikan dan sebagainya, harus diawali dengan upacara. Tingkah laku manusia dalam Desa Adat di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli sangat ditentukan oleh dilaksanakan atau tidaknya aturan-aturan tersebut yang berakibat terhadap sangsi sosial. Bahkan dengan tidak dilaksanakan aturan-aturan adat tersebut dipercaya bukan saja berakibat terhadap si pelanggar saja, tetapi juga terhadap warga adat yang lain. Seperti yang sudah disebutkan diatas, bahwa Desa Adat bagaikan tubuh manusia, satu bagian tidak melaksanakan fungsinya dengan baik maka akan berakibat pula bagi fungsi-fungsi lainnya, sehingga akan menjadi manusia tidak normal (Putera, 1981, pp. 105-106). Selain itu Bangli juga mengembangkan wisata desa adat tradisionial yang terkenal yaitu Desa Panglipuran. Desa ini menduduki posisi desa terbersih di dunia sehingga sampai sekarang menjadi tujuan wisata budaya.

Kehidupan sosial lainnya adalah dikenal dan dilaksanakannya strata sosial yang umum dikenal dengan nama sistem kasta. Cara hidup dengan aturan-aturan klasifikasi ini masih terasa sekali, terutama dalam tata kehidupan masyarakat. Praktik kehidupan semacam ini dapat dimaklumi karena mayoritas penduduknya beragama Hindhu. Istilah kasta, bagi para cendekiawan Hindhu tidak dapat diterima, kasta seperti yang terdapat di India identik dengan pemisahan yang tegas dan ekstrim antara kelas yang satu dengan yang lain. Untuk itu di Bali lebih cocok disebut warna yang yang dianggap lebih condong pada pembagian tugas (Putera, 1981, pp. 105-106). Pandangan semacam ini dipertegas oleh Manawa Dharma Sastra I.87 yang mengatakan; tetapi untuk melindungi alam ini, Tuhan Yang Maha Cemerlang menentukan kewajiban yang berlainan terhadap mereka yang lahir dari mulut-Nya, dari lengan-Nya, dari perut-Nya dan dari kaki-Nya. Perbedaan golongan dalam masyarakat justru akan memperlancar mekanisme untuk tercapainya kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kehidupan masing-masing individu dalam masyarakat (Titib, 1981, p. 13).

Dalam masyarakat Bangli, istilah ke empat kasta (catur warna) tidak dikenal secara utuh, tetapi yang lebih populer adalah Tri Warna yaitu Brahmana, Ksatria dan Jabe (orang luar). Kasta Waisya dan Sudra sangat sulit diidentifikasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka lebih dikenal dengan sebutan jabe yaitu orang yang berada di luar Brahmana dan Ksatria atau diluar keraton. Mungkin ini sebagai salah satu bukti aculturasi, bahwa tidak semua budaya yang berasal dari India diterima secara utuh, namun sudah disesuaikan dengan kepribadian setempat. Namun demikian peranan orang Jabe ini sangat penting di masa kerajaan, terutama menjadi tenaga andalan dalam segala jenis pekerjaan, budak, keamanan maupun masukan kerajaan. Istilah Jabe ini diperkirakan baru dikenal pada abad XVII-XVIII (Nordholt, 1996:41).

Ketiga kelas ini mempunyai aturan-aturan dalam berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun berbicara. Kasus yang sering muncul adalah proses perkawinan di kelas yang berbeda. Apabila seorang wanita berasal dari kelas yang lebih tinggi dipersunting oleh laki-laki dari kelas yang lebih rendah, maka status kastanya harus ditinggalkan dan mengikuti kasta sang suami. Bahkan tidak jarang terjadi dalam kasus seperti ini, mereka (wanita) dikeluarkan

atau tidak diakui lagi sebagai anak, saudara dari keluarga semula. Akibatnya dalam pergaulan kemudian, terlihat ada jarak ibaratkan orang yang baru kenal dan ini perlu waktu yang panjang untuk menormalisir proses interaksi dalam proses hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kasus lain adalah dalam kedinasan, dimana kedudukan seseorang tidak ditentukan oleh faktor geneologis (kasta), tetapi tingkat pendidikan atau kepangkatan. Seperti seorang pemimpin instansi pemerintahan tertentu berasal dari golongan *Jabe*, tetapi bawahannya, bahkan tukang kebun dari kelas Brahmana atau Ksatrya karena pendidikan atau kepangkatan mereka lebih rendah, kasus ini banyak dijumpai di instansi-instansi pemerintahan sampai saat ini di Bali termasuk di Kabupaten Bangli. Namun demikian kehati-hatian dalam bertindak, berbeicara tetap dipegang oleh seorang pemimpin, termasuk dalam memberikan instruksi-instruksi lisan sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu tidak mustahil akan muncul sifat serba salah dan terkesan kaku dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasannya. Kalau seorang pemimpin instansi tersebut tidak memperhatikan aturan-aturan yang sudah mentradisi tersebut pasti akan kena sanksi sosial, seperti dikatakan congkak, sombong, tidak tahu adat dan sebagainya. Kasus sosial seperti ini, andaikata dianggap keterlaluhan menyinggung perasaan dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan tuduhan sebagai penghinaan, sehingga dapat diberi sanksi yang tegas. Tentu ini dilakukan apabila seseorang tidak peduli lagi dengan sanksi sosial yang bersifat tegas, karena sanksi sosial biasanya hanya berlaku pada orang-orang yang mengakui tradisi itu sehingga hanya bersifat normatif. Kasus semacam ini pernah terjadi, mungkin ini satu-satunya sampai saat ini yang pernah terjadi di Kabupaten Tingkat II Bangli . Kasus ini terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 1949 di Desa Banjarangkan, yaitu sebuah desa yang berbatasan antara Kabupaten Bangli dengan Kabupaten Klungkung. Kasus ini berawal dari Tjokarde Rai adik raja Klungkung diberi kata-kata yang tidak sopan dengan cacian oleh Anak Agung Gde Alit. Kalau dilihat dari kasta, Tjokorde Rai dianggap lebih tinggi dari pada Anak Agung Gde Alit, karena di-anggap Anak Agung Gde Alit berkata tidak sopan atau tidak pantas pada orang yang berkasta lebih tinggi, maka dia dilaporkan kepada Punggawa dengan tuduhan penghinaan dan makian. Dalam laporannya, Tjokorde Rai mintak kepada pengadilan supaya terdakwa Anak Agung Gde Alit dihukum (*Inventaris van*

Het Archiep van de Algemene Secretarie en Het Kabinet van De Gouverneur-General, 1944-1950, bendel 1367).

Protes terhadap kondisi sosial ini sebenarnya sudah pernah ada sejak tahun 1925, melalui organisasi yang bernama Surya Kanta. Organisasi ini didirikan oleh orang-orang Bali, terutama dari golongan Jabe yang sudah menamatkan pendidikannya di Pulau Jawa. Gerakan organisasi ini dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam bidang sosial, ingin mengadakan pembaharuan dalam bidang adat-istiadat yang dianggap tidak sesuai lagi keadaan jaman dan menciptakan terwujudnya persamaan hak antar golongan Tri Wangsa dalam bidang perlakuan dan hukum. Misalnya dalam sistem perkawinan, diberlakukan aturan yang disebut *Asu Pundung* dan *Alangkahi Karang Hulu*. *Asu Pundung* berarti, dilarangnya perkawinan terhadap laki-laki dari kasta Ksatria kebawah dengan seorang wanita kasta Brahmana. Sedangkan *Alangkahi Karang Hulu*, adalah dilarangnya suatu perkawinan terhadap laki-laki dari kasta yang lebih rendah terhadap gadis yang kastanya lebih tinggi. Apabila terjadi pelanggaran, mereka dapat dikenakan hukuman buang. Begitu juga dalam bidang pemerintahan, organisasi ini menginginkan setiap orang yang duduk dalam pemerintahan, tidak berdasarkan pada kasta. Dalam bidang ekonomi, ingin mengadakan penyederhanaan dalam segala bentuk upacara yang memerlukan biaya banyak seperti; ngaben (bakar mayat), karena dianggap pemborosan yang menyebabkan kemelaratan. Aturan pergaulan tersebut disamping diatur berdasarkan stratifikasi secara tradisional tersebut, juga terdapat aturan antara saudara tua dengan saudara muda. Dalam masyarakat Bali pada umumnya, nama sudah menunjukkan dari kasta mana mereka berasal atau dari urutan saudara keberapa mereka berasal. Misalnya anak sulung diawali dengan nama wayan, gede, putu, anak nomor dua; made, nengah, anak nomor tiga; nyoman, komang, dan anak nomor empat; ketut. Banyak sudah terjadi pergeseran aturan-aturan tradisional sejalan dengan perkembangan jaman dan pola pikir masyarakat Bali. Seperti istilah wangsa, sudah ditinggalkan karena wangsa berarti juga bangsa, sehingga kalau ini tetap dipertahankan akan muncul istilah bangsa Brahmana, bangsa Ksatria dan sebagainya yang berarti akan memperlebar jurang pemisah antara kelas yang satu dengan yang lain. Namun demikian masih ada

yang berusaha untuk mempertahankan dan memberlakukan konsep Catur Wangsa, bukan Tri Warna yaitu masyarakat di Kabupaten Gianyar (Howe, 2009, pp. 48-49).

4.3. Kondisi Ekonomi

Sejak PELITA I, model pembangunan Indonesia berkisar pada sektor pertanian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai secara umum oleh pemerintah adalah; (1) peningkatan pendapatan dari sebagian terbesar rakyat Indonesia yang hidup di desa-desa, (2) tumbuh dan berkembangnya permintaan akan barang-barang bukan pertanian, sehingga dengan demikian landasan pada tahanan industrialisasi sudah diletakkan, (3) pemulihan dan perluasan bahan-bahan ekspor kita, (4) menciptakan lowongan kerja dalam waktu singkat, (5) memenuhi kebutuhan pokok Indonesia, sehingga dengan demikian meniadakan ketergantungan kita mengenai pangan pada pasaran dunia (Alfian, 1971, p. 74).

Berlandaskan analisis geografis dan pemanfaatan lahan Kabupaten Bangli, sangat memungkinkan pencapaian semua ini, walaupun mungkin pada awalnya diprioritaskan pada kepentingan masyarakat daerah setempat karena mata pencaharian utama penduduknya adalah pertanian sawah dan perkebunan. Ini dapat dilihat dari perbandingan luas wilayah kecamatan dan pemanfaatan tanah tersebut. Kecamatan Bangli dengan luas wilayah 5.626 Ha, sebagai tanah pertanian dan perkebunan adalah 4.343 Ha, yaitu 77,19% dari luas keseluruhan. Kecamatan Susut dengan luas wilayah 4.931 Ha, sebagai tanah pertanian dan perkebunan adalah 4.211 Ha, yaitu 85,40% dari luas keseluruhan. Kecamatan Tembuku dengan luas wilayah 4.832 Ha, sebagai tanah pertanian dan perkebunan adalah 4.171 Ha, yaitu 86,38% dari luas wilayah keseluruhan, dan Kecamatan Kintamani dengan luas wilayah 36.392 Ha, sebagai wilayah pertanian dan perkebunan adalah 22.310 Ha, yaitu 60,80% dari luas keseluruhan. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tingkat II Bangli yaitu 52.081 Ha, maka 67,27% berfungsi sebagai tanah pertanian dan perkebunan, dan sisinya 32,73% adalah sebagai tanah kering, tanaman kayu-kayuan, perikanan, pekarangan rumah dan sekitarnya. Karena itulah, andaikata kita berjalan-jalan di setiap daerah pedesaan Kabupaten Bangli yang terlihat adalah hamparan tanah pertanian atau perkebunan, sekan-akan

menyatunya tempat tinggal, aktivitas mereka dengan alam apalagi dengan paduan udara yang sejuk. Kedua jenis komoditi ini (pertanian dan perkebunan) menjadi andalan masyarakat setempat. Hasil pertanian yang utama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai dan sayur-sayuran. Hasil perkebunan diantaranya adalah; kopi arabika, kopi robusta, tembakau, kelapa dan buah-buahan. Karena itu usaha untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan terus diupayakan, mengingat jumlah penduduk dan untuk memnuhi kebutuhan hidupnya senantiasa bertambah, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam rangka meningkatkan produktivitasnya, maka kegiat-an-kegiatan pendukung seperti perbaikan sistem pembenih-an, tata air, penggunaan pupuk, pengendalian hama dan penyakit, tetap merupakan prioritas dalam penanganannya. Dengan demikian kelestarian swasembada pangan dapat di-pertahankan, disamping pengembangan sektor lainnya guna menunjang perkembangan pertanian dan disektor lainnya.

Dari keempat kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Kintamani orientasi ekonominya berbeda, hal ini disebabkan oleh faktor geografis dan topografisnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa Kecamatan Kintamani disamping sebagai daerah pegunungan sehingga sulit akan air yang barakibat tidak mungkinnya pengadaan lahan pertanian sawah, juga wilayahnya paling luas yaitu 70,45% dari seluruh wilayah Kabupaten Bangli. Karena itu dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakatnya, pertanian sawah bukan andalam utamanya, perkebunan dan pariwisata. Berdasarkan Keputusan Kepala Kabupaten Bangli No.115 Tahun 1993 tentang Penetapan Obyek-obyek Wisata Kabupaten Kabupaten Bangli, pasal 1, terdapat 6 (enam) obyek wisata yang menjadi perhatian khusus. Dari keenam tersebut 4(empat) buah berada di Kecamatan Kintamani dan 2 (dua) di Keca-matan Bangli. Inilah yang menyebabkan mengapa para wisatawan lebih mengenal nama Kintamani dari pada Bangli, seperti halnya lebih dikenalnya Bali dari pada Indonesia. Perbandingan lainnya adalah sarana akomodasi, khususnya penginapan (hotel), secara keseluruhan di Kabupaten Bangli terdapat 25 buah, 19 buah di Kecamatan Kintamani dan 6 buah di Kecamatan Bangli. Ini berakibat juga terhadap kunjungan wisatawan di Kecamatan Kintamani.

Peredaran hasil bumi (pertanian dan perkebunan) masih bersifat lokal, artinya memanfaatkan pasar setempat dan lebih berorientasi pada kepentingan

sehari-hari (primer). Bahkan berdasarkan pengamatan penulis, masih terdapat sistem barter di pasa-pasar tradisional, sehingga situasi krisis moneter seperti sekarang tidak begitu nampak terasa bagi masyarakat setempat. Mungkin masyarakat pada umumnya sudah biasa dengan pemanfaatan hasil alam untuk hidup dan tidak tergantung dengan jenis makanan tertentu saja, atau sudah terbiasa dengan pola hidup subsisten. Sebagai contoh, walaupun beras sebagai makanan pokok tetapi tidak sulit bagi mereka mengkonsumsi jenis makanan lain seperti ketela rambat, ketela pohon atau jenis ubi-ubian yang lain untuk menyambung hidupnya. Begitu juga dengan penggunaan minyak kelapa, mereka pada umumnya tidak biasa menggunakan hasil pabrik seperti; bimoli, dorang dan sebagainya, tetapi menggunakan minyak buatan sendiri dari kelapa. Adapun alasannya antara lain; kelapa mudah didapatkan dan minyak hasil pabrik tidak dapat dipertanggungjawabkan kesuciannya sehingga tidak layak dipakai memasak untuk persembahan kepada Tuhan.

Dengan segala kendala yang dihadapi sasaran pembangunan ekonomi pemerintah Kabupaten Bangli adalah tercapainya laju pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu perlu diupayakan peningkatan ketersediaan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi, meingkatkan peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat tercapainya lapangan kerja, serta untuk meningkatkan sumbangan kepada ekonomi daerah. Sasaran selanjutnya adalah, mendukung pertumbuhan penduduk sehingga pendapatan perkapita masyarakat secara riil diha-rapkan dapat meningkat. Sasaran perekonomian pertanian ditekankan pada peningkatan produksi padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan dan produksi perkebunan seperti; kelapa, cengkeh, fanili, kakau dan jahe gajah. Nampaknya semua ini sebagai wujud diversifikasi, yaitu keragaman proses penanaman dengan kegiatan-kegiatan land-use planning, produksi, tetapi melupakan kegiatan-kegiatan prosesing dan pemasaran. Karena itu kegiatan-kegiatan tersebut juga harus ada kerja sama antara instansi terkait seperti Departemen Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan sebagainya. Begitu juga dalam bidang industri, direncanakan untuk dapat menambah jumlah usaha unit industri kecil dan diharapkan dapat menampung tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Untuk mengantisipasi berbagai kendala dalam mewujudkan kegiatan-kegiatan

pembangunan tersebut tiatas, maka sektor pertanian sebagai landasan perekonomian harus tetap dipertahankan. Pembangunan tetap berorientasi pada upaya mempertahankan swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi serta meningkatkan pendidikan masyarakat terutama anak-anak usia sekolah.

Intensifikasi melalui pelaksanaan panca usaha tani, perbaikan pemasaran, menghilangkan waste (penyusutan) karena penyimpanan serta pengolahan yang benar. Ekstensifikasi, dengan memanfaatkan sumber-sumber alam (lahan) yang difungsikan menjadi tanah pertanian. Dengan cara ini diharapkan dapat; (1) meningkatkan produksi pangan untuk mencapai swasembada pangan, (2) meningkatkan hasil devisa dan menghemat penggunaan devisa, (3) menambah lapangan kerja, (4) memelihara dan meningkatkan potensi-potensi kekayaan alam, dan (5) meningkatkan pengasilan dan kesejahteraan rakyat. Disamping peranan pemerintah sebagai promotor dan pelopor, peranan jasa swsta sangat besar yang harus tampil kemuka dengan memanfaatkan segala sumber alam dimiliki demi kemakmuran bersama.

4.4.Kiat para tokoh Hindhu dan Muslim di Kabupaten Bangli, Bali Dalam Membangun Kehidupan "*menyama braya*"

Dari hasil penelusuran di lapangan diketahui bahwa umat Islam dan Hindu di Kabupaten Bangli dapat hidup secara berdampingan dan damai, penuh dengan sikap toleran dan saling menghargai. Hal ini tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan melalui pertemuan rutin dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB). Dilihat dari jumlah pengikut, penganut agama Islam di Kabupaten Bangli tersebar terutama di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bangli (Desa Sidembunut dan Bebalang), di Kecamatan Kintamani (Desa/Kampung Sudihati dan Desa Kutuh).

Terjadinya Bom Bali tahun 2002 dan 2005 sangat besar pengaruhnya terhadap kerukunan interaksi antara umat Hindu dan Muslim di Bali, hal senada juga dirasakan di Kabupaten Bangli, namun berkat upaya pemerintah dari pusat sampai tingkat desa, aparat keamanan, FKUB sehingga konflik tidak sampai maluas. *Menyame braya* adalah nilai yang bersifat universal, pluralisme,

multikultural dan inklusif yang dianut juga oleh masyarakat Bali karena menyentuh kehidupan budaya, sosial dan keagamaan (Gatra, Agus 2013:38). Namun demikian bom Bali yang terjadi tahun 2002 dan 2005 sempat memberikan pengaruh buruk terhadap interaksi positif yang lama telah dibangun antara Umat Muslim dan Hindu di Bali. Ini adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri dan sudah terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bangli:

“Bom Bali mempunyai pengaruh secara psikologis antar umat Muslim dan Hindu tetapi dengan kesigapan para tokoh agama masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Justru akhirnya kasus Bom Bali ini dirasakan semakin meningkatkan kerukunan antara Umat Islam dan Hindu di Bangli. Cara mengatasi masalah melalui mediasi oleh tim mediator (tokoh agama, pemerintah dari Bupati sampai Kepala Desa). Meningkatkan peran FKUB dengan melakukan pertemuan rutin untuk mengetahui atau memantau perkembangan kehidupan beragama. Untuk mengatasi persoalan kedua umat ini, di wilayah Bangli kita mempunyai Tim Mediasi dan FKUB. Semua hal yang berpotensi merusak hubungan umat beragama kita bicarakan dalam forum FKUB dan Tim Mediasi. Untuk tim mediasi ini terdiri dari FKUB ditambah dengan *stake-holder* terkait: pimpinan wilayah mulai bupati, wakil bupati, camat, kepala desa/perbekel. Di samping itu, tim FKUB juga beranggotakan penanggung jawab keamanan: aparat Kodim, Koramil, Polres dan Polsek. Apabila ada permasalahan yang dianggap potensial mengganggu kehidupan beragama yang harmonis, biasanya mereka melakukan pertemuan dulu untuk menentukan langkah-langkah penting baru kemudian turun ke masyarakat. Di samping menangani kerawanan yang bisa terjadi secara insidental, dua forum ini menyelenggarakan pertemuan rutin bulanan, sebab kita juga diminta laporan oleh provinsi mengenai perkembangan kehidupan beragama di Bangli. Sebagai seorang Ka Kemenag Kabupaten Bangli dan saya sendiri kata orang adalah Ka Kemenag yang sangat sering masuk masjid. Kalau ada kegiatan umat Islam saya sarankan di masjid saja, di samping biar efektif sekaligus murah”.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Islam Kementerian Agama Kabupaten Bangli yaitu:

“Munculnya Bom Bali, cara mengatasinya dengan diadakan pengajian-pengajian terutama anak-anak muda sehingga tidak terpropokasi oleh informasi yang salah. Menurut Pak Nyoman Asmuni “bom Bali bukan untuk menghancurkan Bali, tetapi menghancurkan orang Islam”. Dampak diantaranya; periksa KTP di pelabuhan masuk Bali, koperasi khusus untuk karama Bali, Ajeg Bali dsb. Semua ini berakibat terhadap leberadaan orang Islam di Bali. Begitu juga dengan munculnya orang-orang yang radikal, tetapi hal tidak direspon oleh umat muslim sehingga tidak berlanjut. Untuk mengatasi ini dengan diadakan pengajian-pengajian, terutama anak-anak muda sehingga tidak terpropokasi oleh informasi yang salah”.

Selain bom Bali, gangguan yang bersifat intoleransi terkadang muncul juga dari dalam Umat Muslim. Hasil wawancara dengan informan salah seorang pegawai Kementerian Agama Kabupaten Bangli mengatakan:

Toleransi yang telah di bangun sangat baik selama ini tidak berarti tanpa ada kerikil-kerikil yang merintang. Gangguan itu justru berasal dari dalam umat Islam sendiri. Sebagian umat Islam mempersoalkan beberapa perilaku yang dianggap cenderung ke arah “syirik”, seperti membuat sesaji atau ritua-ritual yang lain. Dalam hal ini, kami selalu memberikan pencerahan dan penjelasan kepada masyarakat muslim bahwa dalam batas-batas tertentu selama tidak masuk dalam urusan aqidah dan peribadatan, maka hal itu masih dapat ditoleransi karena dalam rangka membangun hubungan sosial sesama umat manusia. Selain itu, ada upaya dari kelompok-kelompok Islam “garis keras” yang selalu mencoba memasukkan fahamnya kepada masyarakat islam di Bangli. Alhamdulillah, selama ini hal itu dapat dideteksi dan dapat diatasi. Karena itu dari dalam diri umat Islam perlu mewaspadaai upaya pemecah belahan ini. Begitu juga di Kintamani pernah terjadi perbedaan persepsi tentang punia untuk pembangunan Pura (ada yang mengatakan dilarang dan diperbolehkan) tetapi dapat diselesaikan dengan adanya perubahan istilah yaitu “dana untuk pembangunan dan keamanan”. Kementerian agama Kabupaten Bangli memiliki kiat untuk

menjaga kehidupan beragama yang harmonis dari sisi umat Islam. Misalnya diperlihatkan ketika menunaikan ibadah sholat Jumat, atas permintaan takmir, yang bertindak sebagai khatib dan imam adalah pegawai Kemenag atau KUA. Substansi khutbah biasanya dipilih materi yang menyejukkan, menenteramkan, bukan yang menyerang, mempersalahkan pemeluk agama lain. Kami juga mencoba menggabungkan musik rebana dengan musik khas Hindu. Rupanya memang Tuhan mentakdirkan kami (umat Hindu dan muslim Bali) tidak boleh bercerai berai, dan harus membangun Bali secara bersama-sama. Salah satu buktinya adalah koperasi yang dulu dibentuk oleh masyarakat Bali khusus umat Hindu pasca bom Bali sampai hari ini juga tidak berjalan dengan baik. Akhirnya sekarang diperuntukkan kepada masyarakat umum sebagaimana hal itu terjadi sebelum bom Bali.

Seorang Perbekel (Kepala Desa) yang di Desa Kutuh, juga tidak mengingari pasca Bom Bali mempengaruhi hubungan antara Umat Muslim dan Hindu. Namun dapat diselesaikan dengan baik sehingga sampai sekarang hubungan antar agama berjalan dengan baik. dikatakannya bahwa:

Memang pernah terjadinya hubungan antara umat Hindu dan Islam kurang harmonis setelah Bom Bali, muncul sikap saling mencurigai. Tetapi hal cepat dapat diselesaikan dengan adanya pertemuan-pertemuan rutin untuk menanamkan pengertian kepada kedua pihak sehingga tidak meluas sehingga sekarang normal kembali. Apalagi dengan kedatangan orang-orang yang tyidak dikenal yangmemberikan kotbah-kotbah keagamaan. Untuk itulah dilakukan kesepakatan supaya para pendatang melaporkan diri sehingga status dan keperluannya jelas. Potensi konflik yang lain adalah munculnya pengaruh luar, terutama dari orang-orang baru atau massmedia spt TV akan adanya larangan bagi umat Islam melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam rangka berinteraksi dengan umat Hindu yang sebelumnya biasa dilakukan spt. “saling mengucapkan selamat hari raya”, tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena masyarakat setempat sangat menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah merupakan struktur sosio-budaya yang mereka warisi secara turun temurun dan tidak berdampak negatif. Justru mereka akhirnya menyesuaikan diri.

4.5. Bentuk-bentuk Kehidupan "Menyama Braya" Antara Masyarakat Hindu Dan Muslim Dalam Membangun Toleransi Beragama

Dari hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara kepada informan, ternyata terdapat bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang menyebabkan terbangunnya perilaku *menyame braye* antara umat Hindu dan Muslim di Kabupaten Bangli. Ajaran Tri Hita Karana sebagai dasar interaksi mereka sehingga bisa hidup harmonis. Karena itu di bawah ini secara berturut-turut akan dipaparkan hasil penulisan berupa bentuk kegiatan yang menyebabkan mereka bisa hidup harmonis yaitu; yaitu (1) parahyangan, (2) pawongan, dan (3) palemahan. Dalam pelaksanaan dalam konteks tri hita karana sebagai wilayah (ruang), melalui awig-awignya dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok yang diatur, yaitu (1) sukerta tata agama, artinya menata tertib hidup beragama yang mengatur kegiatan manusia dalam melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam wujud upacara keagamaan; (2) sukerta tata pawongan, artinya menata hubungan harmonis antarkrama (manusia); sebagai perwujudan hubungan manusia dengan sesamanya dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan (3) sukerta tata palemahan, artinya menata wilayah desa (tata ruang desa) agar tercipta lingkungan yang seimbang, wilayah berupa perwujudan hubungan manusia dengan alam yang menjadi tempat pemukiman dan sumber kehidupan masyarakat (Sukarma, <http://sukarma-puseh.blogspot.com/2011/05/desa-pakraman.html>, Diakses 11 Nopember 2013). Karena itu berdasarkan hasil penulisan terdapat tiga hal inilah yang mengikat sebagai bentuk interaksi kehidupan yang harmonis antara Umat Muslim dan Hindu di Kabupaten Bangli, Bali.

1. Kegiatan Parahyangan

Di Kabupaten Bangli kegiatan *parahyangan* yang paling nampak adalah terdapat masjid yang cukup besar dan megah yang berada di tengah-tengah kota, bernama Masjid Agung Bangli. Masjid ini sebagai tempat beribadah Umat Muslim yang ada di Kabupaten Bangli, baik peribadatan saat hari-hari besar bagi Umat Muslim dan bersifat rutin sehari-hari. Begitu juga di tempat yang lain seperti Di Desa Sidembunut, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli dan Desa Sudihati dan Desa

Kutuh di Kecamatan Kintamani. Bahkan di Desa Sidembunut, Kecamatan Bangli terdapat Mushola dengan menggunakan ukiran khas Bali.



**Foto 4.2: Mushola di Desa Sidembunut
Sumber: Dokumen Pribadi**

Bukti lain yang menunjukkan adanya sentuhan *parahyangan* antara Umat Muslim dan Hindu adalah keberadaan Pura Langgar atau dikenal juga dengan Pura Jawa yang terdapat di Desa Bunutin. Seperti yang dikatakan oleh pengampu Pura Jawa atau Pura langgar di Desa Bunutin mengatakan;

“Pura ini dipercaya sebagai tempat peribadatan bukan saja oleh umat Hindu, tetapi juga oleh umat Muslim. Pura ini dalam waktu-waktu tertentu dikunjungi oleh umat Muslim bukan saja yang berasal dari Bali, tetapi juga dari luar Bali. Mereka disini sembahyang/sholat dan bagi saya tidak apa-apa karena itu bagian dari sifat saling menghargai. Kami sediakan tempat untuk sembahyang, meskipun ada perbedaan arah. Mereka (umat Islam) sembahyangnya menghadap ke barat (baca: kiblat) sehingga harus membelakangi pura. Kalau kami sembahyangnya menghadap ke timur. Bahkan pernah terdapat orang Islam yang datang membawa sesaji dan berpakaian adat layaknya orang Bali. Bagi saya tidak apa-apa yang saling menghargai dan menghormati”

Bahkan berdasarkan kunjungan penulis di pura ini wujud toleransi dan keberterimaan umat Muslim oleh umat Hindu yaitu diperbolehkan sholat di pura

ini. Begitu juga disediakan tempat sholat bagi Umat Muslim dan tempat wudlu seperti terlihat pada foto di bawah ini.



Foto 4.3: Tempat Wudlu di Pura Langgar
Sumber: Dokumen Pribadi

Senada dengan pernyataan pengampu pura di atas, perwakilan umat Islam di Desa Sidembunut mengatakan:

“hubungan kami sampai saat ini (kami datang di desa ini tahun 1998) baik-baik saja, kami saling menghormati. Kami umat muslim yang minoritas selalu ikut mensukseskan kegiatan yang bersifat keagamaan disini. Setiap kegiatan kebanjaran spt hari raya nyepi dalam pembuatan *ogoh-ogoh* (maksudnya, media dalam bentuk orang atau makhluk hidup lainnya yang mencerminkan sifat-sifat jelek yang harus dihilangkan dari muka bumi) kami selalu berpartisipasi dalam bentuk memberi sumbangan uang semampunya demi suksesnya perayaan tersebut.

Penulis juga sempat mewawancarai seorang ibu di Kintamani (istri seorang Kepala Dusun), seharusnya yang kami wawancarai adalah bapak kepala dusun, tetapi karena yang bersangkutan tugas dinas dan penulis tidak ingin kehilangan kesempatan sehingga penulis harus mewawancarainya. Setelah ditanya terkait dengan hubungan antar umat Hindu dan Muslim di Desa Kintamani beliau mengatakan;

“hubungan kami sampai saat ini sangat baik (mereka, maksudnya umat muslim sudah lama disini skitar tahu 1950-an) tidak pernah ada masalah, bahkan mereka juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ke pura, walaupun tidak sembahyang. Partisipasi mereka misalnya *ngaturang atos* (semacam sesaji/persembahan kepada yang punya hajat, bisa ke pura/anggota

masyarakat yang berisi beras, gula, kain putih/titron dan dupa) ke Pura Puseh, Dalem dsb bila upacara tertentu/*memlaspas*, menyerahkan ke panitia, tetapi tidak ikut sembahyang”.

Hal ini senada dengan pernyataan Kasi Islam Kabupaten Bangli mengatakan:

“Sebagai bentuk rasa kebersamaan antara Umat Muslim dan Hindu di Kintamani adalah adanya kebiasaan *ngaturang atos*, sumabangan moril atau materiil untuk kegiatan di Pura”.

Perbekel Desa Kutuh memperkuat pernyataan ini, bahwa hubungan antara Umat Muslim dan Hindu di Desa Kutuh sangat baik, terkait dengan kegiatan *parahyangan* yaitu:

“Di musim panas di daerah ini terdapat upacara “permohonan air” kepada yang maha kuasa yang dilakukan secara bersama-sama. Begitu juga ada upacara untuk keselamatan dilaksanakan bersama-sama dengan doa Hindu atau Islam. Bagi umat Hindu wanita yang kawin dengan laki-laki Islam diawali dengan upacara di *sanggah/mrajan* sebagai bentuk *mepamit*/mohon pamit kepada leluhur bahwa mereka akan ikut suami sehingga harus beragama Islam. Memang pada awalnya terjadi perbedaan pendapat, tetapi dengan saling pengertian dapat diselesaikan dan tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan dengan prinsip “tujuan agama sama hanya caranya yang berbeda”. Sebaliknya wanita Islam yang kawin dengan laki Hindu saat Idul Fitri juga membawa sesajen/banten layaknya orang Hindu ke masjid, hanya saja bedanya tidak ada *canang* (rangkaian janur yang berisi bunga). Terdapat upacara *mlaspasin* di pura/mrajan saling membantu seperti memasak/mebat, tetapi disediakan khusus masakan khusus untuk muslim. Pembangunan Pura dan Masjid mereka saling membantu baik tenaga maupun dana/*mepunia* sebagai bentuk rasa gotong royong dan itu tidak dilarang.

Penggunaan pengeras suara tidak dilarang sampai saat ini baik itu kegiatan di Pura maupun di Masjid”.

Berdirinya Mushola di Desa Bebalang bisa dikatakan bentuk adanya harmoini di sektor *parahyangan*, hal ini senada dengan pernyataan Kepala Desa Dinas Bebalang yang mengatakan:

“Di Bebalang ada mushola berarti *secara parahyangan* umat hindu yang mayoritas sudah memberikan penghormatan kepada minoritas, dan sebagai bentuk saling menghormati mereka kalau sembahyang (umat muslim) tdk menggunakan pengeras suara dari moshola”

Kasi Islam Kemenag Kabupaten Bangli mengatakan hubungan yang terkait dengan kegiatan ritual tidak ada masalah seperti pernyataan di bawah ini:

“Hubungan antara umat Muslim dan Hindu di Bali dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari pemberian ruang yang cukup longgar bagi umat Islam untuk menjalankan rangkaian ibadahnya. Misalnya dalam rangkaian shalat jama’ah di masjid, umat Islam diberi kelonggaran untuk mengumandangkan suara adzan dengan pengeras suara luar. Tidak hanya itu masyarakat muslim juga bisa menyuarakan khutbah jumat dengan pengeras luar. Bahkan sampai saat ini jumlah majlis ta’lim di wilayah Bangli berjumlah 23 lembaga dan semuanya aktif tidak hanya papan nama. Dapat dipastikan untuk wilayah Bangli kalau ada anak berumur lebih dari 15 tahun mereka tergabung dalam majlis ta’lim. Sejauh pengamatan saya majlis taklim di Bangli banyak diikuti oleh kalangan muda, ini sangat berbeda dengan daerah lain yang banyak diikuti oleh kalangan tua”.

Seorang tokoh Muslim di Desa Bebalang juga mengatakan hubungan antara umat Hindu dan Muslim sampai saat ini dapat berjalan dengan baik, termasuk juga hubungannya dengan *parahyangan* yaitu:

“Peranan pecalang besar dalam menjaga kemanan, terutama saat Hari Raya Nyepi yang bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Para *pecalang* yang mengantarkan umat Muslim pergi ke mesjid saat sholat id yang bersamaan saat itu umat Hindu tidak boleh keluar rumah (amati geni, amati lelungan, amati karya dan amati lelungan). Saat nyepi umat muslim juga tidak keluar rumah, spt umat hindu lainnya. Begitu juga kalau ada kegiatan di pura Umat

Muslim ikut meramaikan spt. jualan di bazar, sumbangan materiil semampunya”.

Pada saat penulis berkunjung ke rumah salah satu umat Muslim di Desa Bebalang diantar oleh warga setempat yang beragama Hindu dengan pasih sekali dia mengucapkan “asalamwalaikum”. Bagi umat Muslim mengucapkan salam tersebut ada yang mengatakan bagian dari melaksanakan ibadah/unsur *parahyangan*. Tetapi ini dilakukan juga oleh orang Hindu sebagai wujud mengakuan dan menyesuaikan diri dengan pemilik rumah yang beragama Islam sehingga salam yang digunakan juga salam menurut pemilik rumah yang beraga Islam. Begitu juga bagi umat Islam yang bersanjang ke rumah tetangga yang beragama Hindu sudah terbiasa mengucapkan “Om Swastuyastu”.

Suatu ketika, bertepatan dengan hari Idul Adha, penulis datang ke Desa Kintamani untuk melihat secara dekat aktivitas umat Muslim dan Hindu. Dalam kesempatan ini penulis bertemu dengan seorang hanji tokoh Muslim setempat, beliau mengatakan:

“Saat Hari Korban terdapat bantuan dari umat Hindu berupa kambing atau sapi (penulis lihat saat hari Korban memang ada seekor sapi sumbangan dari Wakil Bupati Bangli dan masyarakat Hindu setempat. Pak Haji mengatakan hari korban identik dengan upara *mecaru* di Bali (upara korban untuk bersih desa dan persembahan untuk buta menurut umat Hindu untuk menjaga keseimbangan antara bhuwana agung dan ali/makro kosmos dan mikro kosmos)”.



Foto 4.4: Sumbangan Sapi oleh Wakil Bupati

Sumber: Dokumen Pribadi

Sebagai bentuk riil dari harmoni antara umat Muslim dan Hindu yang terkait dengan *parahyangan* di Kabupaten Bangli, tepatnya di Desa Bunutin terdapat Pura Langgar atau Pura Jawa yang sampai sekarang masih berfungsi sebagai tempat peribadatan baik oleh Umat Hindu maupun Islam. Karena itu penulis sertakan profil dari pura tersebut diambil dari internet dengan sedikit modifikasi terutama dengan tampilan gambarnya dan sedikit tambahan dari hasil wawancara dengan pemangku pura tersebut beberapa informan lainnya. (lihat, <http://sagungwidya.blogspot.com/2012/09/harmonisasi-agama-hindu-dan-islam-dalam.html>)

Toleransi antaragama di Indonesia sebenarnya sudah berakar sejak berabad-abad yang lalu. Para pemeluk agama yang berbeda saling menghormati satu sama lain, bahkan hidup berdampingan secara damai. Salah satu jejak yang membuktikan hal ini adalah Pura Langgar, di Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, Bali.



Foto 4.5: Papan nama Pura Dalem Jawa

Sumber: Dokumen Pribadi

Sebenarnya, pura ini bernama Pura Dalem Jawa, namun lebih dikenal dengan nama Pura Langgar. Seperti kita ketahui, pura adalah tempat ibadah umat Hindu, dan langgar (masjid kecil) adalah tempat ibadah umat Islam.

2. Sejarah Pura Langgar

Sekitar abad ke-16 terjadi perselisihan dan kesalah pahaman antara Dalem Waturenggong di Gelgel Bali dengan Kerajaan Blambangan Jawa Timur akibat penolakan Raja Blambangan (Dalem Sri Juru) untuk memberikan putrinya Ayi Ayu Mas yang akan dipersunting sebagai istri oleh Dalem Waturenggong. Kemudian terjadilah pertempuran yang dipimpin oleh patih dari kerajaan Gelgel yang bernama Ki Patih Ularan. Setelah pertempuran berakhir, Ki Patih Ularan membawa penggalan kepala Raja Blambangan dihadapan Raja Gelgel. Karena perbuatan tersebut dianggap tidak berprikemanusiaan maka, Ki Patih Ularan diusir oleh Raja Gelgel.

Setelah pertempuran tersebut daerah kerajaan Blambangan dikuasai oleh kerajaan Gelgel (1489 M). Namun tidak berlangsung lama Raja merebut kekuasaan kerajaan Blambangan dan akhirnya Raja Mataram mampu menduduki Kerajaan Blambangan. Peristiwa ini tidak berlangsung lama dan dapat direbut kembali oleh Panji Sakti Raja Buleleng. Meskipun Blambangan sudah menjadi daerah kekuasaan kerajaan Bali, namun pimpinan pemerintahan tetap dijabat oleh keturunan Raja Blambangan yaitu Pangeran Mas Sepuh dan dibantu oleh saudaranya yang bernama Wong Agung Willis (Pangeran Willis) dengan jabatan Patih Agung. Pemerintahan dua orang bersaudara ini mengalami persengketaan akibat selisih persoalan penganutan agama yang menyebabkan dipecatnya Wong Agung Willis sebagai Patih Agung.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya Wong Agung Willis meninggalkan Blambangan dan menghadap Raja Mengwi Bali. Selama tinggal di Kerajaan Mengwi beliau banyak mendapatkan bimbingan nasehat dari seorang Pendeta Lingsir Geria Denkayu. Mengenai kepergian Wong Agung Willis bersama keluarganya menimbulkan kegelisahan Pangeran Mas Sepuh karena dapat membahayakan kedudukannya sebagai penguasa Blambangan. Akhirnya Pangeran Mas Sepuh berangkat ke Bali menuju Kerajaan Mengwi bersama 80 pasukan dan beberapa orang yang sudah masuk Islam. Setelah keduanya bertemu, Wong Agung Willis dan Pangeran Mas Sepuh saling memaafkan dan berniat berangkat bersama bertemu dengan raja Gelgel untuk bersilahturahmi dan memohon maaf atas

kejadian masa lalu. Keinginan tersebut pun disambut baik oleh Raja Gelgel. Kemudian kedua bersaudara ini singgah ke Kerajaan Mengwi dan pada sore harinya menuju ke Blambangan, namun dalam perjalanan pulang perahu yang ditumpangi oleh Pangeran Mas Sepuh dan Wong Agung Willis tidak kunjung datang akhirnya beliau bermalam di rumah penduduk. Dikelarutan malam kedua pangeran diserang oleh Laskar Mengwi atas perintah Raja Mengwi yang berakibat wafatnya Pangeran Mas Sepuh. Akhirnya beliau di makamkan di desa Seseh yang blakangan ini dikenal dengan sebutan Pura Keramat Ratu Mas Sepuh.

Selanjutnya Wong Agung Willis berhasil menyelamatkan diri dan berniat pergi ke Kerajaan Gelgel. Ketika dalam perjalanan menuju Puri Gelgel tiba-tiba beliau sampai di pelemahan Blahbatuh. Kemudian kembali melakukan perjalanan dan akhirnya tiba di pelemahan Desa Bunutin dan menceritakan semua peristiwa yang dialaminya, sehingga penduduk Bunutin merasa iba dan terpesona dan memohon agar Wong Agung Willis tetap tinggal di Bunutin.



Foto 4.6: Pura Langgar dari arah Timur Laut

Sumber: Dokumen Pribadi

Pada tahun 1580 M oleh Raja Gelgel yang masih memilih trah keluarga Kerajaan Blambangan ini kemudian menghadiahkan tanah lungguh di Bunutin diiringi 300 pengiring. Wong Agung Willis lalu dinobatkan Raja Gelgel sebagai penguasa Puri Bunutin dengan gelar I Dewa Mas Willis dan membangun pemerajan Agung menurut cara-cara dresta. Diceritakan dari istri permaisuri yang merupakan anak dari Raja Mengwi beliau berputrakan Ida I Dewa Mas Blambangan dan Ida I Dewa Mas Bunutin. Sedangkan dari istri penawing I Dewa Mas Willis memiliki tiga putra yaitu I Dewa Wayan Mas, I Dewa Made Mas, I Dewa Nyoman Mas.

Dikisahkan kemudian Ida I Dewa Mas Blambangan jatuh sakit sangat berat dan lama serta tidak mempan dengan segala pengobatan apapun. Kemudian Ida I Dewa Mas Bunutin melakukan yoga semadhi dan diberikan pewisik sebagai berikut :

‘‘Wahai Mas Blambangan, mas Bunutin dan semuanya ada disini. Aku Dewaning Selam yang bernama Tuhan Allah. Aku minta supaya dibuatkan pelinggih Langgar tempatmu sembahyang kepadaKu. Jikalau tidak membuat sebagaimana permintaan ku. Maka terus menerus secara turun temurun akan menderita sakit parah tapi tidak mati (Gele-gele). Penyakitnya tidak akan sembuh oleh macam-macam obat apapun. Sebaliknya kalau mau membuat pelinggih Langgar sudah pasti sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan dan terus berbahagia serta penuh kebahagiaan serta penuh kewibawaan. Bila ada yang menolak sudah pasti tidak akan mampu bertahan menghadapi penderitaan lahir dan batin malahan akan sampai jatuh ke wangsan keluar dari *Puri atau Jaba*’.

Pandangan di atas diperkuat juga dengan hasil wawancara di lapangan yaitu Bapak Kepala Kemendag Kabupaten Bangli dan Mangku pengampu Pura Langgar. Berdasarkan hasil wawancara, pernyataan ini ada kesamaan dengan sejarah Islam di Dusun Angan Sari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani yang mengatakan:

‘‘Pada awalnya Islam berkembang di Angansari berawal dari kondisi ayah saya yang kala itu sakit menahun. Banyak dukun dan orang pintar didatangi agar bisa menyembuhkannya, tetapi yang terjadi semua dukun yang didatangi angkat tangan. Sampailah pada dukun yang terakhir (beragama Hindu) yang menyarankan agar ayah memeluk agama para leluhurnya. Setelah ditelusuri ternyata leluhur kakek ada di Karangasem dan Lombok. Ayah mendapatkan informasi bahwa para leluhurnya beragama Islam. Selanjutnya ayah memutuskan untuk masuk Islam diikuti oleh 3 saudaranya, sementara 4 saudaranya yang lain tetap menjadi pemeluk Hindu, dan sejak saat itu penyakitnya langsung sembuh. Setelah masuk Islam nama ayah berganti Abdul Ibrahim. Hal ini terjadi kurang lebih tahun 1978 an. Setelah kepindahan ayah ke islam masyarakat belum bisa menerima dengan baik,

bahkan kakak saya juga tidak serta merta berpindah ke agama Islam. Mereka masih memeluk agama Hindu. Lambat laun banyak keluarga saya yang berpindah ke Islam. Sekarang penganut Islam di Angansari berjumlah 24 KK”.

Akibat dari pewisik tersebut Ida I Dewa Mas Blambangan memanggil adik dan ibunya untuk berunding sehubungan dengan pewisik tersebut. Akhirnya beliau memutuskan untuk membuat Pura Langgar. Namun adik tiri Beliau menolak dengan tegas pembangunan Pura Langgar karena dianggap berbaur Islam. Sehingga ketiga saudara tiri Beliau meninggalkan Puri Agung Bunutin dan pergi menghadap Raja Dalem Segening di Puri Gelgel untuk menceritakan kejadian di Puri Bunutin dan diperkenankan tinggal di Puri Gelgel. Setelah Pura Langgar selesai didirikan akhirnya Ida I Dewa Mas Blambangan sehat kembali seperti sediakala tanpa pengobatan apapun.

Sekelumit cerita itulah yang menyingkap pertalian sejarah Hindu dan Islam di Pura Langgar tadi. Unikny, pura merupakan rumah persembahyangan umat Hindu. Sementara langgar sama artinya dengan rumah ibadah umat Islam. Namun, Pura Langgar tetap difungsikan sebagai tempat persembahyangan umat Hindu hingga kini.

3. Keunikan Pura Langgar

Keunikan Pura Langgar yaitu bangunan utama (*utamaning mandala*) Pura Langgar berbentuk segi empat. Ada dua undakan dan empat pintu di bangunan yang dikenal pula sebagai Bale Agung ini. Atapnya bertingkat dua. Dua tingkat atap dan undakan ini syahdan melambangkan syariat dan tarekat dalam Islam. Namun, dalam Bale Agung ini ditempatkan Pelinggih Pendeta Sakti Bawu Rauh. Sementara sisi utara Pura Langgar dikenal sebagai bangunan *kaler* (utara) yang berfungsi sama dengan bale agung. Namun, bagi umat Hindu jika ada warga yang meninggal di Desa Pakraman ini biasanya tidak boleh memasuki areal suci ini, kecuali pemangku pura tersebut. Sisi timur ada bangunan Pura Pajenengan. Bangunan suci ini diyakini menjadi tempat leluhur yang sudah diupacarai secara Hindu. Upacara khusus di bangunan ini dilakukan saat tiba *pagarwesi*.

Menariknya, tiga bangunan tempat suci di Pura Langgar ini dipercayai memiliki kedekatan sejarah dengan leluhur pengempon Pura Langgar dari Blambangan yang beragama Islam. Jika ada upacara biasanya sesajen di tiga bangunan suci ini tak memakai daging babi. Sesajen tidak boleh menggunakan daging babi, karena daging babi diharamkan oleh umat Islam. Karena itu diganti dengan daging ayam atau itik. Sesajen berisi daging babi hanya boleh dipersembahkan di bangun suci yang berada di sisi selatan Pura Langgar. Bangunan suci ini disebut Pura Dalem yang fungsinya sama dengan Pura Pajenengan di sisi timurnya. Umat Hindu di pura ini juga mengenal kurban, seperti kurban yang dilakukan umat Muslim di hari raya Idul Adha. Namun kurban yang dilakukan umat Hindu ini dilakukan sekali pada bulan Februari/Maret, sebelum hari raya Nyepi. Upacara ini dikenal sebagai *titi mamah* atau *mapekelem*. Kurbannya berupa seekor sapi yang ditenggelamkan di kolam Taman Pura Langgar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku pura, sapi yang disembelih sebagai korban menyerupai dengan hari korban (maksudnya. Idul Adha) bagi Umat Muslim, kemudian daging sapi dibuang ke kolam dan dibagikan kepada tetangga terdekat.



Foto 4.7: Kolam yang terdapat disekitar Pura Jawa
Dokumen Pribadi

Menariknya, kurban sapi yang ditenggelamkan di kolam tersebut biasanya hilang tak berbekas. Begitu pula dengan persembahan sesaji (*canang*). Padahal, kolam tersebut tak bermuara. Namun, warga di Pantai Lebih, Gianyar, biasanya memastikan sisa upacara yang terdapat di pantai adalah hasil upacara di Pura Jawa tersebut, dibuktikan dengan sesajen upacara justru ditemukan warga muncul di

pantai tersebut. Kolam di Taman Pura Langgar itu pun menyimpan cerita unik. Air kolam tak pernah habis terkuras. Ada mata air yang justru berada di tengah kolam yang mengitari bangunan Pura Langgar itu. Kasi Islam Kemenag Kabupaten Bangli mengatakan, di Bali melalui Dinas Kepariwisata dan MUI Bali telah ditetapkan tujuh tempat peninggalan Islam sebagai tujuan wisata religi. Tempat ini kemudian sebagai salah satu tempat ziarah bagi umat Islam, selain Wali Pitu dan diantaranya juga sebagai tempat peribadana bagi Umat Islam dan Hindu, seperti makam Siti Khotijah dan Amangkuningrat (Agung, 2015, p. 43) Selengkapnya dikatakan sebagai berikut:

“Dalam hal keterlibatan membangun pariwisata Bali, umat Islam telah mencanangkan adanya wisata religi ziarah “wali pitu” yang ada di Bali. Pertama kali, situs ini hasil penulisan dari mahasiswa Udayana mengenai ulama’-ulama’ yang berpengaruh dalam penyebaran Islam di Bali. Hasil temuan itu selanjutnya dicanangkan oleh MUI Bali dan kemudian ditangkap oleh pemerintah Bali. Dampaknya, situs-situs tersebut dan sarana prasarannya diperbaiki oleh pemerintah Bali. Sekarang banyak umat Islam dari Jawa mengunjungi makam ini dengan berbondong-bondong”.

4. Kegiatan Pawongan

Kegiatan *pawongan* yang dimaksud adalah segala kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung bersifat horizontal sebagai manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, ini berarti terkait dengan pelaksanaan nilai-nilai gotong royong. Hal ini dilakukan oleh Umat Muslim di Kabupaten Bangli sebagai wujud dari sikap *menyame braya*. Sesuai dengan pandangan Widnya (1981:13), sifat gotong royong dilandasi oleh filsafat *segilik*, *seguluk* dan *sebayan taka*, artinya sebagai warga masyarakat harus bersatu, mempunyai tujuan yang sama dan suka duka dirasakan bersama. Dan cita-cita tolong menolong, merupakan dasar kebersamaan (kolektivitas) dan dasar perekonomian berkoperasi. Adanya suatu corak kerakyatan yang berciri kekeluargaan dalam masyarakat desa adat, merupakan suatu realita adanya. Dalam desa adat, setiap anggota mempunyai kemerdekaan (*liberty*), persamaa (*equality*) dan persaudaraan atau kekeluargaan (*fraternity*). Dan ini merupakan dasar pokok

pada kehidupan persekutuan dalam masyarakat desa adat di Bali, khususnya di Kabupaten Bangli. Memberikan ucapan hari raya bagi masyarakat setempat menyikapi sebagai relasi social. Karena itu terdapat spanduk ucapan hari seperti fotodi bawah ini.



Foto: 4.8: Spanduk Ucapan Hari Raya Idul Fitri oleh PHDI Bali di Depan Masjid Agung Bangli

Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kepala Dusun Desa Kintamani mengatakan;

“Hubungan sampai sekarang sangat baik, saling menghormati sebatas kegiatan-kegiatan kemanusiaan, seperti kegiatan kematian/ngaben, mereka datang (*mejenukuan*) begitu juga kalau ada yang meninggal kami yang hindu ikut datang mengucapkan ikut bertduka cita. Bentuk saling menghargai terlihat juga saat mereka sembahyang tidak menggunakan pengeras suara/dikecilkan bila masyarakat Hindu ada upacara di pura, begitu juga saat mereka sembahyang/sholat hari-hari besar kami yang tidak menggunakan pengeras suara/dikecilkan sehingga saling pengertian. Seperti tahun lalu kebetulan umat Hindu ada upacara *ngaben* dan saat itu juga Idul Fitri. Kami yang Hindu tidak menggunakan pengeras suara, begitu juga kalau umat Hindu melakukan upacara, mereka yang mengecilkan pengeras suaranya. Saling mengucapkan selamat hari raya selalu dilakukan, bahkan

saling antar mengantar makanan */ngejot* bila hari raya baik saat Idul Fitri maupun Hari Raya Nyepi. Kebersamaan terlihat juga saat kegiatan desa adat Kintamani melakukan Dasa Wisma, lomba-lomba, menyambut bupati, bahkan mereka diberikan kesempatan pertama. Kesenian Islam */terbangan* diberikan kesempatan pertama baru diikuti oleh kesenian Bali/gong.

Pemuka Umat Muslim di Desa Sidembunut juga mengatakan hubungan antar umat Muslim dan Hindu sangat baik;

“Di tempat kami sudah terjadi kawin campur antara Umat Muslim dengan Hindu. Terdapat perkawinan campur dengan masyarakat setempat, begitu juga sebaliknya. Untuk menjaga hubungan kamitetap baik, kami masih tetap menggunakan nama desa kamim mengikuti nama asli yaitu Desa Sidembunut. Pernah ada keinginan untuk memberi nama Kampung Suka Damai, tetapi telah dipikirkan dengan baik bahwa dengan nama tersebut dikhawatirkan ada kesan sebagai masyarakat tertutup dan tidak mau membaaur dengan masyarakat setempat (masyarakat eksklusif). Sehingga kami sepakat dengan nama lama sebagai bagian dari anggota masyarakat Desa Sidembunut”.

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Perbekel Desa Kutuh, proses kawin campur sudah biasa terjadi tidak masalah, lengkapnya sebagai berikut:

“Perpindahan agama di kalangan masyarakat Kutuh sekarang bukanlah hal yang luar biasa. Dulu orang berpindah agama karena pernikahan bisa menjadi besar dalam keluarga, tetapi sekarang karena perkembangan jaman hal itu menjadi sesuatu yang biasa. Masing-masing orangtua tidak keberatan lagi, sebab yang penting keduanya saling mencintai. Orang yang mau pindah agama biasanya ada upacara pelepasan agama”

Senada dengan yang pernyataan Ibu Kepala Dusun Desa Kintamani bahwa dari proses sejarah kedatangannya saja sudah diawali dengan benih-benih harmonis antar pendahulunya baik pendatang yang Muslim maupun masyarakat setempat yang Hindu. Beliau mengatakan;

“Tidak diketahui secara pasti kedatangan mereka diperkirakan tahun 1950-an dan tanah yang mereka tempati sampai sekarang diberikan oleh

pendahulu orang Hindu yang ada di sana/tidak dengan cara membeli, ini sebagai wujud rasa toleransi antara Hindu dan Muslim. Karena daerah ini adalah hutan sehingga orang tua/penglingsir memberikan tanah tersebut pada orang muslim yang pendatang. Berawal dari itulah sampai sekarang kami berdampingan dan sudah seperti saudara desa, apalagi dengan perjalanan waktu terjadi perkawinan antara Umat Muslim dengan Hindu”

Sempat juga penulis bertemu dengan umat Muslim dari Desa Bebalang saat Sholat Id, beliau mengatakan:

“Di Desa Bebalang terdapat 6 kk orang muslim masuk sebagai anggota banjar “istimewa” mereka tidak ikut masalah ritual, tetapi ada kewajiban rutin setiap 6 bulan sekali spt. iuran banjar, kegiatan bazar , biasanya warga muslim nyumbang hidangan sate sesuai dengan keahlian mereka (kesehariannya sebagai penjual sate) begitu juga dengan warga yang lain yg mempunyai keahlian memasak capcay, mie goreng dsb. Kegiatan 17-an mereka selalu berpartisipasi membaaur dengan masyarakat setempat sejak mempersiapkan sampai dengan pelaksanaan memperingati HUT RI”

Hal ini senada dengan seorang anggota Kodim Bangli yang sempat penulis wawancara saat bertugas di Masjid Agung Bangli, mengatakan:

“sampai saat ini hubungan antar Umat Muslim dan Hindu tidak bermasalah, mereka saling membantu disegala kegiatan baik yang bersifat keagamaan maupun non keagamaan seperti HUT RI, kegatan desa. Seperti saat dilaksanakan lomba MTQ di Kabupaten Bangli peran serta masyara dan *pecalang* pada saat adanya lomba MTQ besar untuk mensukseskan acara tersebut”

Hubungan yang harmonis antara umat Muslim dan Hindu juga sangat baik di Desa Bebalang, seperti penuturan salah seorang informan Muslim, intinya adalah saling pengertian disegala kegiatan kemasyarakatan. Bentuk kerukunan itu diantaranya:

“Kegiatan kematian, saling menjenguk karena sudah masuk pada *desa pekraman* yang dilandasi oleh Tri Hita Karana. Kegiatan HUT RI, bahkan

dalam kegiatan hari raya saling mengunjungi dan saling mengucapkan hari raya (Idul Fitri atau Hari Raya Nyepi, Galungan dan Kuningan). Kalau Idul Fitri banyak umat muslim yang mudik sehingga mereka menitipkan rumah dan harta benda lainnya kepada tetangganya yang hindu sampai datang kembali. Gotong royong, perbaikan jalan secara bersama sama, spontanitas sesuai dengan kemampuan”.

Kepala Desa Dinas Bebalang juga mempertegas bahwa secara *pawongan*, hubungan antara Umat Muslim yang minoritas dan Hindu yang mayoritas sampai sekarang sudah berjalan dengan baik. Walaupun perluantisipasi ke depan dengan segala kebijakan bersama sehingga tidak terjadi konflik yang bernuansa SARA di kemudian hari. Bentuk interaksi dan kebijakan-kebijakan yang perlu dipikirkan ke depan diantaranya:

“Saling memeberikan ucapan selamat hari raya mulai terlihat kemunduran tidak seperti sebelumnya, karena itu harapannya ada FKUB di tingkat kelurahan tidak di tingakt kota saja dalam rangka mengatasi masalah toleransi antar umat beragama karena yang tahu perisis tentang hal tsb adalah masyarakat yang paling bawah yaitu desa/kelurahan. Ini berarti membantu pemerintah kota dlam mengatasi masalah-masalah yang tidak diinginkan yang menyangkut SARA. Dengan kemajemukan dibicarakan dengan PHDI, ini menyangkut kegiatan silahturahmi. Perkawinan umat Muslim melalui KUA, tetapi sosial kemasyarakatan mereka berkordinasi dengan tokoh adat setempat (Hindu) sebagai permakluman. Ini negara NKRI sehingga tidak boleh diskriminatif yang penting aturan yang dibuat oleh pemerintah harus ditaati. Kalau ada hal-hal yang mengarah pada SARA kami memanggil sebagai upayaantisipasi dan berkoordinasi dengan kordinator lingkungan supaya tidak menjadi masalah besar, walaupun awalnya masalah oknum tetapi nantinya akan menjadi SARA. Kita harus saling menyadari sebagai mayoritas dan minoritas, sebagai minoritas tidak selalu berpikir diskriminatif tetapi apa seharusnya dilakukan sebagai warga minoritas, *dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung*. Kalau ada kegiatan-kegiatan desa mereka juga dimitak berpartisipasi spt; dana *seka*

taruna, membuat ogoh-ogoh. Semua kegiatan *bersifat sentral* untuk menyatukan semua perbedaan sehingga masyarakat bisa bersatu.

Hubungan Umat Muslim dan Hindu sangat nampak juga di Desa Kintamani, ucapan selamat hari raya bukan saja saat Hari Raya Idul Fitri dan Galungan. Korban kambing dan sapi kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar, termasuk yang beragama Hindu, seperti dikatakan oleh Bapak Haji tokoh Islam di desa Kintamani:

“Korban sapi/kambing kemudian dibagikan bukan saja untuk umat Muslim, tetapi juga umat Hindu sekitarnya, terutama para tokoh adat spt. Klian Adat, Kepala Desa, Mandesa Adat dsb sebagai bentuk kebersamaan antar umat”.

Sebagai bentuk keharmonisan antara umat Muslim dan Hindu yang terkait dengan kegiatan antar manusia/*pawongan* sehari-hari adalah ikut melestarikan kesenian setempat yaitu kemampuan Umat Muslim bermain gamelan Bali/gong bersama-sama dengan Umat Hindu ketika upacara di Pura. Hal ini disampaikan oleh tokoh Islam di Dusun Angan Sari, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani sebagai berikut:

“Kepindahan ayah menjadi Islam tidak membuat beliau melupakan tradisi yang selama ini dilakukan. Kebetulan ayah adalah seorang seniman yang dianugerahi kemampuan memainkan gamelan tradisional Bali. Setelah memeluk Islam ayah masih sering memainkan gamelan itu dalam berbagai kesempatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berbekal keahlian itu hubungan ayah dengan saudara dan masyarakat Hindu di Agansari tetap terjaga dengan baik. Keahlian ayah diteruskan oleh anak-anaknya. Meskipun tidak semahir ayah saya (mustakim) juga terkadang memainkan gamelan Bali. Dengan tidak membuang tradisi leluhur, maka komunikasi kami (umat Islam) dengan yang lain tetap terjaga dengan baik. Sebagai masyarakat minoritas di Angansari, kami (umat Islam) selalu berbuat baik dengan umat Hindu. Ini sudah menjadi tabiat masyarakat di sini, di samping bahwa masyarakat di dusun ini hampir semuanya masih mempunyai ikatan kekerabatan. Kehidupan kami dalam hal sosial kemasyarakatan tak ubahnya masyarakat Bali pada umumnya. Kami saling memberi dan membantu jika ada keluarga besar kami punya acara. Alhamdulillah, di masyarakat sini

sudah tumbuh kesadaran bahwa umat islam akan diberi sajian makanan yang non babi. Untuk memasak makanan non babi biasanya dari keluarga muslim menyediakan diri untuk menyiapkan masakan tersebut”.

Perbekel Desa Kutuh selalu terjun ke umat Muslim dalam rangka melakukan pendekatan dan sekaligus mengetahui kondisi di lapangan hubungan antar umat beragama. Hal ini dimaksudkan mencegah terjadinya konflik lebih besar dan meluas. Dalam wawancara dengan penulis mengatakan:

“Sebagai kepala desa selalu melakukan kunjungan/silahturahmi ke umat muslim terutama ke masjid-masjid bagi umat minoritas sebagai bentuk menerima keberadaan mereka yang minoritas yang berada di dalam mayoritas. Kawin campur sudah lama terjadi, walaupun sangat manusiawi kalau akan terjadi ketidak setujuan dari kedua belah pihak apalagi masalah agama, tetapi dapat diselesaikan dengan baik. Memberikan ucapan selamat hari raya sampai sekarang masih mereka lakukan, bahkan diantara umat muslim “saling gradag-grudug” disegala kegiatan. Bahkan umat muslim ada yang menjadi “seka gong” karena mereka menganggap kesenian ini adalah miliknya dan sudah menyatu dengannya. Perpindahan agama di kalangan masyarakat Kutuh sekarang bukanlah hal yang luar biasa. Dulu orang berpindah agama karena pernikahan bisa menjadi besar dalam keluarga, tetapi sekarang karena perkembangan jaman hal itu menjadi sesuatu yang biasa. Masing-masing orangtua tidak keberatan lagi, sebab yang penting keduanya saling mencintai. Orang yang mau pindah agama biasanya ada upacara pelepasan agama”.

5. Kegiatan Palemahan

Menurut Warta Hindhu Dharma (1980:15), nampaknya desa adat merupakan perkembangan dari desa perdikan atau sima, merupakan desa khusus, bersifat otonomi berdasarkan pada Agama Hindhu. Desa adat yang berarti tempat kejujuran (desa= tempat, adat= kejujuran) dalam rangka mencapai keselamatan lahir dan bathin. Untuk mewujudkan semua ini, ada tiga keseimbangan yang harus dipenuhi yaitu; keseimbangan hubungan antar manusia (*pawongan*), dengan alam (*palemahan*), dan dengan Tuhan (*parahyangan*) yang dilandasi oleh sifat kejujuran.

Konsep ini dikenal dengan nama Tri Hita Karana. Konsep ini menjadi pedoman kerja khusus bagi setiap orang di Bali.

Pada umumnya Umat Muslim yang ada di Kabupaten Bangli bermata pencaharian sebagai pegadang karena pada umumnya mereka pendatang terutama yang terdapat di Kecamatan Bangli. Namun demikian masih ada yang bermata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan tanah sebagai lahan dan perkebunan, terutama di Kecamatan Kintamani. Berdasarkan ceritra setempat yang sempat penulis rekam bahwa kedatangan orang muslim diperkirakan di tahun 1950-an. Mereka terlantar sehingga oleh sesepuh setempat/Kintamani mereka dibantu dan diberilah sebidang tanah untuk ditempati. Tanah yang mereka tempati adalah tanah adat yang sampai sekarang secara turun temurun. Tanah yang ditempati sebagai tempat tinggal termasuk untuk tempat ibadah/mesjid adalah tanah adat Desa Kintamani. Sebagai kompensasi akan hal tersebut mereka mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang yang sangat ringan kepada desa adat setempat.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis, mereka juga melakukan proses pengolahan tanah sampai panen mengikuti langkah-langkah seperti Umat Hindu yang ada disekitarnya yaitu menggunakan waktu-waktu yang tepat berdasarkan sistem penanggalan Bali. Ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara makrokosmos (alam sekitar) dengan mikrikosmos (manusia). Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang seimbang sehingga tercipta keselamatan lahir dan batin.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dusun Kintamani;

“Kebersamaan Umat Muslim terlihat juga saat kegiatan desa adat Kintamani seperti ikut dalam lomba Dasa wisma, ngaturang *atos* ke Pura Puseh, Dalem dsb bila upacara ada upacara *memlaspas*, tetapi tidak ikut sembahyang”

Dari hasil wawancara ini terlihat bahwa kegiatan Dasa Wisma terkait juga dengan pemanfaatan alam sekitar untuk kesejahteraan dan keselamatan hidup dengan demikian akan terjadi proses sedemikian terkait dengan melestarian lingkungan atau alam semesta. Kegiatan *memlaspas* adalah ritual yang dilakukan oleh Umat Hindu terkait dengan pembersihan alam semesta atau tempat dimana

dibangun pura. Keterlibatan Umat Muslim berarti secara psikologis sudah ada keterlibatannya dalam upacara ini dengan membawa *atos/sesaji*, walaupun tidak ikut sembahyang. Bapak Perbekel Desa Kutuh juga mengatakan hal yang senada terkait dengan penggunaan kalender Bali (*ayuning dewasa*) dalam beraktifitas di kebun dari pengolahan tanah sampai dengan panen. Pertanyaannya sebagai berikut:

“Umat Muslim yang menjadi petani mereka juga menggunakan penanggalan Bali seperti mencari hari baik /dewasa dengan sistem ritual tertentu dalam pengolahan tanah sampai dengan panen layaknya umat Hindu setempat”

Penentuan lokasi untuk pembangunan tempat ibadah sebagai tempat suci baik bagi Umat Muslim maupun Hindu pasti berdasarkan pertimbangan tertentu. Bukan saja karena letak yang strategis, tetapi juga faktor keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos dengan harapan tempat itu mendatangkan ketenangan dan keseimbangan lahir dan batin. Karena pertimbangan itu tidaklah menjadi masalah walaupun tempat ibadah Umat Muslim (Masjid Agung) dan Pura sebagai tempat ibadah Umat Hindu. Hal ini terjadi di Banjar Blungbang dan Desa Kintamani terdapat Masjid dan Pura/Mrajan yang berdekatan, bahkan hanya dibatasi oleh tembok saja. Mereka dapat hidup dan beribadah dengan kusuk dalam rangka mencapai keselamatan lahir dan bathin.

Di Dusun Angansari Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani terdapat juga Langgar yang berdekatan dengan Pura yang memperlihatkan hubungan yang sangat baik antar agama seperti foto di bawah ini.



**Foto: 4.9: Langgar dan Pura yang berdekatan di Dusun Angan Sari Desa Kutuh
Sumber: Dokumen Pribadi**

Dalam pengamatan penulis, hal yang cukup membuat harmonisasi dua agama berjalan dengan baik, karena pengikut kedua agama ini dapat menjaga komunikasi dengan baik dan saling membantu dan menghargai. Salah satu yang tampak bahwa keberadaan Masjid Jami' Nurul Iman sebagai pusat kegiatan keagamaan di wilayah Angansari terletak di tengah-tengah pemukiman hindu. Bahkan lokasi masjid ini berhimpitan dengan rumah orang Hindu. Sebelah selatan dan utara masjid Nurul Iman adalah rumah orang Hindu.

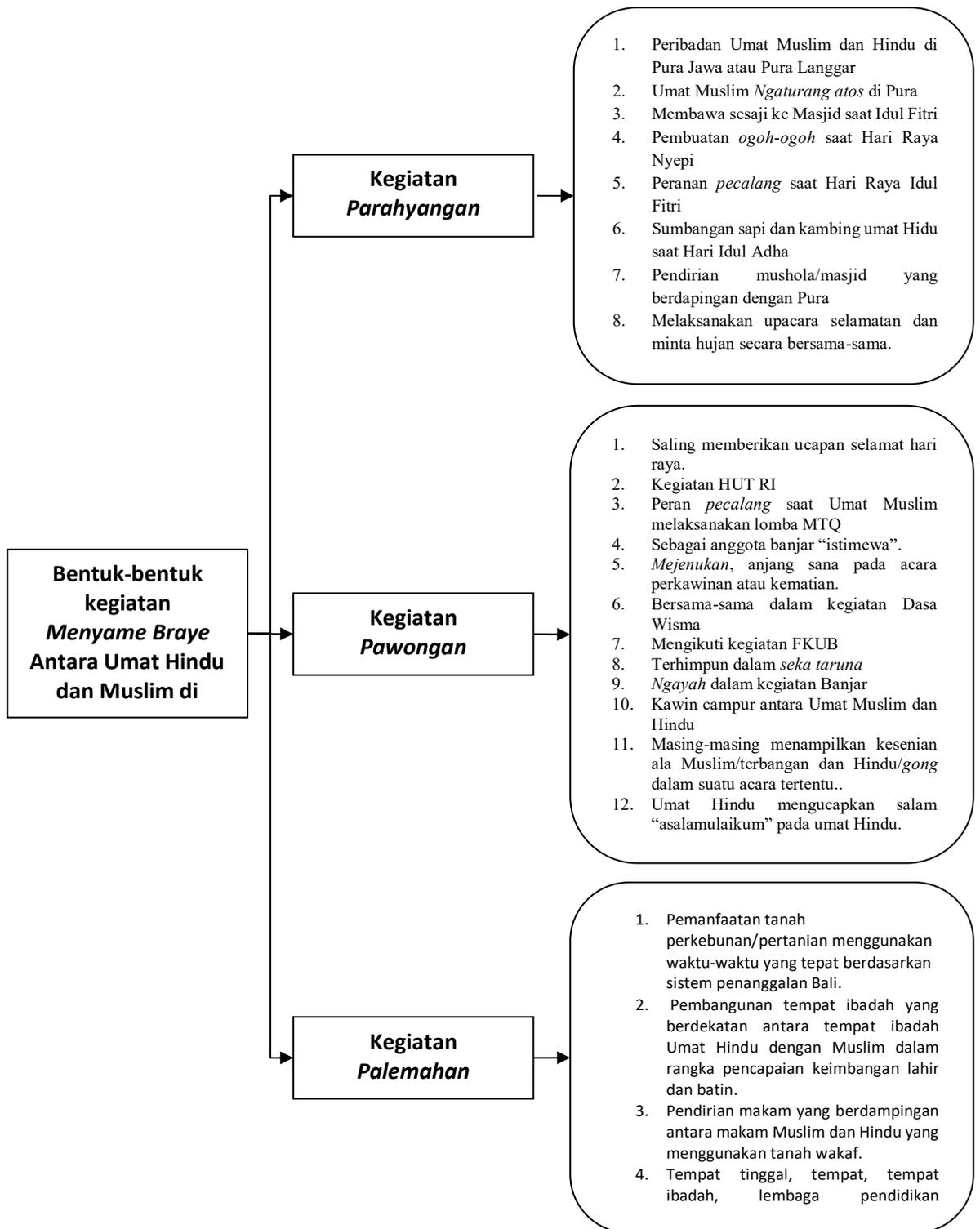
Kegiatan *palemahan* nampak juga dengan adanya kuburan khusus untuk Umat Muslim seperti di Desa Bebalang. Kuburan Umat Muslim berdampingan seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Bebalang:

“Makam muslim juga ada berdampingan dengan makam hindu. Kalau ada kematian masyarakat hindu ikut berpartisipasi dan umat muslim wajib berkordinasi karena tanah itu adalah *tanah wakaf*”



Foto 4.10: Makam Umat Muslim berdampingan dengan Umat Hindu di Desa Bebalang

Sumber: Dokumen Pribadi



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan keteranga di atas dapat disimpulkan bahwa umat Islam dan Hindu di Desa Malang Raya dan di Kabupaten Bangli, Bali dapat hidup secara berdampingan, rukun dan sampai saat ini saling pengertian. Penganut agama Hindu di setiap daerah kantong di Malang Raya (Kecamatan Pakisaji, Ngajum, Wagir, Sukun dan Kecamatan Bumiaji) adalah minoritas, sebaliknya penganut agama Islam di Kabupaten Bangli adalah yang minoritas. Kondisi semacam ini tidak berarti termajinalisaikan atau terintimidasi oleh mayoritas. Kehidupan harmonis ini sudah terpatrun dan diwariskan oleh para leluhur mereka, sehingga menjadi semacam nilai kebersamaan yang harus dilakukan secara bersama-sama apapun agama yang mereka anut. Secara umum dikedua wilayah tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama tanpa memperhatikan agama yang dianutnya, diantaranya:

Kegiatan desa, Prinsip bahwa desa tanggung jawab bersama sudah menjadi komitmen semua unsur desa dengan tidak melihat perbedaan yang ada. Semua warga desa mempunyai hak dan kewajiban bersama terhadap desa, baik yang berhubungan dengan pembangunan, pemeliharaan dan keamanan aset-aset desa. Seperti membangun jalan, kerja bakti, membangun balai desa, musyawarah desa, apalagi diantara tokoh agama juga menjadi pengurus desa. Semua kegiatan itu selalu dibicarakan kepada semua warga di tingkat desa. Kegiatan kenegaraan seperti memperingati hari-hari besar nasional (HUT RI dsb.) sudah tentu dilaksanakan secara bersama-sama sebagai wujud kesadaran akan satu-kesatuan bangsa. Semua warga ikut berpartisipasi, begitu juga kepanitiaannya lintas agama sehingga tidak nampak sekat-sekat agama yang ada. Pemerintah selalu menekankan kehidupan yang rukun antar pemeluk agama, melalui FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama), kegiatan-kegiatan yang menyangkut kebersamaan dibicarakan. Di Kabupaten Bangli, Bali kegiatan desa merupakan interaksi antar manusia dengan manusia sehingga dikenal dengan kegiatan *pawongan* yang dimaksud adalah segala kegiatan yang berhubungan langsung maupun tidak

langsung bersifat horizontal sebagai manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, ini berarti terkait dengan pelaksanaan nilai-nilai gotong royong. Hal ini dilakukan oleh Umat Muslim dan Hindu di Kabupaten Bangli sebagai wujud dari sikap *menyame braya*. Sifat gotong royong dilandasi oleh filsafat *segilik, seguluk* dan *sebayan taka*, artinya sebagai warga masyarakat harus bersatu, mempunyai tujuan yang sama dan suka duka dirasakan bersama.

Kegiatan keagamaan. Di wilayah kantong-kantong Hindu di Malang Raya, umumnya penduduknya adalah asli setempat (*native*) sehingga di antara mereka apapun agamanya sudah terbentuk proses interaksi yang positif. Bahkan dalam satu keluarga terdapat perbedaan agama, ada yang beragama Hindu dan Islam. Andai kata pun terdapat penduduk baru biasanya hanya berasal dari dusun atau desa tetangga yang mempunyai kesamaan *socio-cultural*. Oleh sebab itu interaksi mereka masih mempertahankan yang diwariskan oleh leluhur yang mengedepankan kerukunan, kegotongroyongan. Bahkan terdapat pandangan bahwa sebagian dari mereka melihat agama bukan nomor satu, tetapi yang lebih penting adalah kerukunan, kegotongroyongan antar warga. Adapun bentuk interaksi dalam kegiatan keagamaan adalah; (1) saling memberikan ucapan selamat hari raya, (2) pada saat pembangunan masjid atau langgar saling membantu seperti semen secara ikhlas demi kebersamaan, mereka juga menerima tanpa ada perasaan apa-apa, (3) mengadakan *tahlilan* yang Hindu diundang, walaupun tidak bisa bahasanya tetapi tetap diam yang penting bisa datang dan dipersilahkan berdoa sesuai dengan agama yang dianutnya, (5) berbuka puasa bersama, bahkan ibu-ibu PKK yang beragama Hindu memasak untuk umat Muslim yang sedang berpuasa. Begitu juga di kabupaten Bangli, Bali. Kegiatan yang bersentuhan dengan keagamaan apa yang disebut dengan *parahyangan*. Kegiatan ini dalam bentuk kerja bakti di masing-masing tempat ibadah yang dihadiri juga oleh anggota masyarakat dari agama yang berbeda. Seperti pembangunan masjid dibantu oleh umat Hindu, begitu juga sebaliknya. Sebagai bentuk riil dari harmoni antara umat Muslim dan Hindu yang terkait dengan *parahyangan* di Kabupaten Bangli, tepatnya di Desa Bunutin terdapat Pura Langgar atau Pura Jawa yang sampai sekarang masih berfungsi sebagai tempat peribadatan baik oleh Umat Hindu maupun Islam, termasuk sudah biasa di antara mereka selalu memberi ucapan selamat hari raya.

Dan kegiatan lainnya adalah terkait dengan pelestarian budaya lokal.

Melaksanakan budaya warisan leluhur ikut memberikan andil akan hal itu, walaupun terkadang praktik budaya tersebut tidak terdapat dalam ajaran agama yang mereka anut. Di Desa-desa Malang Raya, ritual bersih desa atau *nyadran*, masih mereka lakukan. Kegiatan ini dilakukan di *punden* (dipercaya tempat bersemayamnya tokoh pendiri desa tersebut), mereka datang membawa *encek* berisi tumpeng setiap *Senen Pahing* (satu tahun sekali), yang dipimpin oleh juru kunci walaupun mereka agamanya Islam atau Hindu. Mereka membawa sesaji, pisang, hasil bumi lengkap dengan lauk pauknya sebagai sesaji dengan dupa atau menyan. Mata pencaharian mereka di wilayah-wilayah kantong umat Hindu pada umumnya adalah petani, mereka lakukan secara bersama-sama mulai dari membajak sawah, menanam sampai panen. Walaupun mereka muslim, mereka tidak berani meninggalkan budaya itu, begitu juga pada saat sunatan juga masih menggunakan sesajen itu. Kalau upacara di sawah yang memimpin upacara di sawah oleh *sesepeuh* atau *tukang metik* (orang sudah mempunyai cucu), bisa dari orang yang bergama Hindu atau Islam. Sesepeuh disamping sudah ada umur juga menguasai tata cara upacara *kejawen*. Kalau mantra-mantranya dari bahasa Jawa (menggunakan kata *pikulun*), walaupun mereka agamanya Islam. Melakukan selamatan atau *kajatan*, *mitoni*, *manusia yadnya*, tetap dilaksanakan karena tujuannya supaya menjadi anak yang *soleh* dan *soleha* (bagi umat Muslim), *seputro* dan *seputri* (bagi umat Hindu). Di Kabupaten Bangli umat islam dan Hindu dalam berinteraksi berdasarkan pada budaya *menyame braye* yaitu bersaudara dengan tidak memperhatikan perbedaan agama yang dianutnya. Begitu juga dalam pengolahan tanah sampai panen mengikuti langkah-langkah seperti umat Hindu yang ada disekitarnya yaitu menggunakan waktu-waktu yang tepat berdasarkan sistem penanggalan Bali. Ini dilakukan sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara *makrokosmos* (alam sekitar) dengan *mikrikosmos* (manusia). Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang seimbang sehingga tercipta keselamatan lahir dan batin.

5.2. Saran

1. Kehidupan harmonis antara umat beragama (Islam dan Hindu di Malang Raya dan Kabupaten Bangli, Bali bisa dipakai acuan oleh masyarakat lain di

Indonesia. setiap masyarakat mempunyai nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur yang perlu direvitalisasikan selain untuk menghidupkan kembali budaya lokal, juga sebagai media untuk berinteraksi dalam perbedaan.

2. Konflik horizontal di Indonesia masih sering terjadi. Begitu juga sentiment antar perbedaan yang bersifat SARA juga masih sering kita saksikan di media massa yang berpengaruh munculnya ketegangan secara psikologis. Karen itu diperlukan penulisan-penulisan sejenis dengan menggali kembali budaya-budaya lokal yang semakin berusaha ditinggalkan karena agama yang dianut. Bertentangan dengan agama, itulah yang sering dipakai alasan sehingga budaya lokal harus ditinggalkan, padahal tidak semuanya seperti itu.

Di Indonesia berbicara toleransi masih sebatas retorika, belum ada langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkannya. Bukan saja dalam bentuk hasil-hasil penelitian, referensi yang kemudian menumpuk di almari saja, tetapi diperlukan “media pluralisme” yang secara empirik dapat dilihat, dinikmati yang akhirnya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti media film, buku-buku cerita anak-anak dan sebagainya, dengan demikian sejak dini anak-anak sudah terbiasa berinteraksi dalam perbedaan.

Daftar Rujukan

- Agung, D. A. (1991). *Sejarah Indonesia Lama I*. Malang: Proyek OPF.
- Agung, D. A. (2015). Hindu – Islam Harmonization in Bali, Case Study on the Graves of Raden Amangkuningrat and Ratu Ayu Agung Rai. *Research on Humanity and Social Sciences*, 43.
- Agung, D. A. (2015). *Perilaku Etis Dalam Praktek Sosial*. Malang: UM Press.
- Al-Alusi. (tth). *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa sab'u al-Matsani*. Mktabah Syamilah Versi 2.
- Alfian. (1971). *Menghadapi Dasa Warsa Modernisasi Untuk Membangun 1971-1981*. Jakkarta: LIPI.
- Ankersmit, F. (1984). *Refleksi tentang Sejarah, Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. Jakarta: Pustaka Sinar harapan.
- Asghar, A. (2008). *Surga Bukan Monopoli Muslim*. Jakarta: Tempo.
- Astawa, I. (1982). *Sistem Banjar. Organisasai Masyarakat Bali Tradisional Sebagai Suatu Sarana Pembinaan Keluarga Berencana dan Gizi. Dalam, Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah Pendekatan terhadap Anthropologi Terapan di Indonesia*. Jakarta: yayasan Obor.
- Badudu, & Zain. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bahar, S., & Tangdililing, A. (1996). *Integrasi Nasional, Teori Masalah dan Srtategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakker, F. (1987). Balinese Hindhuism and The Indonesian State Recent Develeompent. Dalam, *Bijdragen tot de taal, Land en Volkenkunde*, Deel 153. *Journal of The Royal Institute of linguistics and Anthropology*.
- Bulac, A. (1998). *The Medina Document, dalam Charles Kurzman Liberal Islam*. New York: Oxford University.
- Chang, W. (2003). *Berkaitan dengan Konflik Etnis-Agama*. Leiden: INIS.
- Covaarubias, M. (1974). *Island of Bali*. Oxford: Oxford University Press/Indira.
- Geertz, C. (1975). *Kinship of Bali. Chicago*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Geertz, C. (1980). *The Theatre State in Nineteenth Century Bali*. New Jersey: Preclon University Press.
- Geertz, C. (1989). *Penjaja dan Raja, Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Bhratara.
- Giddens, A. (2010). *Teori Strukturasi, Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Grand, B. (1964). *Indonesia*. Landon and New York: Cambridge University Press.
- Groeneveldt, W. (1960). *Historical Notes on Indonesia and Malaya*. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Howe, L. (2009). *Hierarchy and Equality Variations in Balinese Social Organization*. Amsterdam: KITLV.
- Jensen, G., & I.K., S. (1996). *Orang Bali*. Denpasar: Iniversitas udayana.
- Ka'bah, R. (2005). *“Pluralisme dalam Perspektif Syari’ah” dalam Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam*. Jakarta: Nuansa.
- Kertopermono, A. (1989). *Agricultural Landuse in Indonesia With Special Reference Rice Cultivation*. Jepang: Kyoto University.
- Kusumaatmadja, S. (1996). *Dimensi Birokrasi Dari Integrasi Nasional: Tinjauan Empiris. Dalam Integrasi Nasional, Teori Masalah dan Srategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lloyed, C. (1987). *Teori Sosial & Praktek Politik*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Lombard, B. (2005). *Nusa Jawa: Silang Budaya 2*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, A. (2014). *Posmodernisme, Teori dan Metode*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Ma'arif, S. (2005). *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Jakarta: Logung Pustakaa.
- Machasin. (2000). *Islam Teologi Aplikatif*. Yogyakarta: Pustaka Alief.
- Martono, N. (2014). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mouw, R., & Sander, G. (1993). *Pluralism and Horizon*. Grand Rapids: William B eerdmans Publishing Compony.

- Peurson, C. (1990). *Fakta, Nilai, Peristiwa: Tentang Hubungan antara Ilmu Pengetahuan dan Etika*. . Jakarta: Gramedia.
- Plumer, K. (2013). *Sosiologi The Basics*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Poerbotjaraka. (1976). *Riwayat Indonesia I*. tp: tp.
- Pruit, D., & J.Z., R. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Putera. (1981). *Cudamai: Kumpulan Kuliah Adat Agama Hindhu*. Denpasar: UD. Seraya.
- Raharjo, M. (2006). Mengapa Semua Agama Itu Benar? . *Tempo*, 12.
- Rahman, & Munawar, B. (2006). “Kata Pengantar” dalam *Mohamed Fathi Osman Islam Pluralisme & Toleransi Keagamaan*. Jakarta: Paramita.
- Rahman, M. (2006). “Kata Pengantar” dalam *Mohamed Fathi Osman Islam Pluralisme & Toleransi Keagamaan*. Jakarta: Paramadina.
- Raka, P. (1990). *Mengenal dan Pembinaan Desa Adat di Bali*. Denpasar: Proyek Pemantapan Lembaga Adat.
- Ratnawati. (2003). *Mencari Kedamaian di Maluku: Suatu Pendekatan Historis Politis. (Dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini)*. . Leiden: INIS.
- Rauf, M. (1996). *Konflik Politik dan Integrasi nasional. Dalam Integrasi Nasional, Teori Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sachedina. (2002). *Kesetaraan Kaum Beriman: Akar Pluralisme Demokratis dalam Islam*. Jakarta: Serambi.
- Salganik, M., & D.J, W. (n.d.). *Web-Based Experiments for the Study of Collective Social*.
- Santoso, S. (2004). *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santoso, T. (2003). *Kekuasaan dan Kekerasan*. Leiden: INIS.
- Scott, J. (2001). *Teori Sosial, Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti, H. (2005). *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata*. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, E. (2009, Meret). <http://buletinlitbang.dephan.go.id>. Diakses Kamis. Retrieved from Konfli Poso dan Resolusinya.

- Sjamsuddin, N. (2003). *Demensi Politik dari Integrasi Nasional: Tinjauan Teoritis. Dalam Integrasi Nasional, Teori Masalah dan Strategi*. . Leiden: INIS.
- So, A. (1990). *Social Change and Devepment : Moderenisation, Dependency, and Worl-System Theories*. USA: SAGE Publication.
- Soebandi, K. (1983). *Sejarah Pembangunan Pura-Pura di Bali*. Denpasar: CV. Kayumas.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarno. (1965). *Di Bawah Bendera Revolusi Djilid Pertama*. Djakarta: Panitia di Bawah Bendera Revolusi.
- Subagya, R. (1981). *Agama Asli Indonesia*. Jakarta: Djaya Pirusa.
- Surbakti, R. (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Malang: Aditya Media Publising.
- Suseno, F. (2003). *Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik Antara Kelompok Etnis dan Agama di Indonesia. Dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Leiden: INIS.
- Tilly, C. (1981). *As Sociologi Metts History*. Orlando Florida: Academi Press.
- Titib. (1981). *Anatomi Masyarakat Warna*. Denpasar: Warta Hindu Dharma Tahun XIV.
- Tones, R. (2012). *Teori-Teori Tindakan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turner, & Maryanski, A. (2010). *Fungsionalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turner, B. (2012). *Teori Sosiologi, Dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Veerhaak, C., & R.H, I. (1987). *Filsafat Ilmu Penegetahuan, Telaah Atas Cara Kerja Ilmu-Ilmu*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Widya. (1981). *Corak Kerakyatan Masyarakat Desa Adat*. Denpasar: Warta Hindu Dharma no. 163.
- William, D. (1996). *“Pluralism and Monoism”* . Amerika: Encyclopedia Americana.
- Wirawan, I. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Woyowasito, W. (1952). *Sejarah Budaya Indonesia*. Jakarta: NV. Silieangi.

Wyatt, D., & Kautz, T. (2007). *Capturing Spontaneous Conversation And Social Dynamics*. Honolulu: ICASSP.

Yoeti, O. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Young, H., & Durlauf, S. (2001). *Social Dynamics*. Wasingto DC: Brooking Institution Press.

-----, 1979. *Kitab Weda*. Jakarta: Departeman Agama Republik Indonesia
-----, *Bhagavad-Gita, Menurut Aslinya*. 2006. The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

DAFTAR INDEKS

- agency, 25
Ahimsa, 59
aktor, 9, 13, 19, 20, 25
akulturasi, 7, 65, 98
Allah, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 78, 127
Al-Qur'an, 5, 37, 40, 50, 54
Arema, 72
Bali, 3, 5, 6, 63, 64, 65, 66, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149
bangsa, 1, 3, 4, 6, 9, 10, 29, 30, 31, 41, 43, 46, 57, 60, 65, 84, 110, 142
beragama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 26, 30, 31, 36, 37, 44, 48, 53, 64, 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 95, 98, 107, 115, 116, 118, 121, 123, 128, 129, 135, 136, 143, 145
beribadah, 36, 44, 50, 88, 118, 139
Bhagawadgita, 56
binner, 14
budaya lokal, 8, 66, 80, 97, 98, 144, 145
Budaya Lokal, 92
Budha, 2, 5, 7, 36, 74, 98
Catur Tapa Brata Penyepepian, 72
cinta, 2, 57, 65, 78
Comte, 14, 22
dekonstruksi, 10, 14, 66
desa adat, 103, 104, 106, 107, 131, 132, 137, 138
desa-kala-patra, 65
Descartes, 36
Dewa Brahma, 105
Dewa Siwa, 105
Dewa Wisnu, 105
Dinamika, 12, 13, 149
disintegrasikan, 1, 4
Durkheim, 15, 22
eksklusif, 3, 27, 32
eksklusivisme, 26
Ferdinand Tonnies, 16, 22
FKUB, 91, 114, 115, 134, 142
fungsionalisme, 14, 15, 16
Gidden, 20, 25
Gotong-royong, 106
grand theory, 14
hadits, 34, 37, 44, 53, 55
Hari Raya Idul Fitri, 89, 122, 132, 135
Hari Raya Nyepi, 72, 86, 87, 89, 90, 92, 122, 132, 134
heterogen, 14, 22, 24, 65
Hindu, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 27, 36, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150
horizontal, 1, 10, 27, 29, 30, 31, 131, 143, 145
imperialisme, 10
Indonesia, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 31, 65, 66, 67, 68, 70, 97, 102, 110, 112, 124, 145, 146, 147, 148, 149, 150
Injil, 50, 53
inklusif, 27, 32, 114
Islam, 2, 3, 5, 6, 7, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 63, 66, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Jawa, 4, 8, 45, 70, 71, 72, 73, 74, 87, 92, 94, 104, 109, 119, 124, 125, 130, 131, 143, 144, 147
Jihad, 28
Kabupaten Bangli, 5, 6, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122,

124, 128, 131, 134, 137, 142, 143,
 144, 145
 kebangsaan, 8, 33, 47
 kebersamaan, 5, 8, 12, 22, 23, 27, 29,
 33, 52, 58, 59, 63, 79, 81, 82, 87,
 90, 91, 92, 96, 106, 121, 131, 135,
 142, 143
 kedamaian, 36, 45, 53, 57
 kerukunan, 6, 7, 30, 31, 63, 77, 78,
 79, 80, 84, 85, 86, 88, 91, 95, 97,
 114, 115, 134, 143
 kolonialisme, 10
 konflik, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 14, 16,
 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,
 28, 29, 32, 64, 66, 114, 117, 134,
 136
 Kristen, 2, 3, 7, 27, 28, 36, 40, 63, 92
 Langgar, 119, 120, 124, 125, 127,
 128, 129, 130, 139, 143
 latten, 26
 Malang Raya, 4, 5, 6, 67, 68, 70, 71,
 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 85,
 86, 92, 93, 142, 143, 144, 145
 manifes, 26
 Marx, 17, 18, 19, 21
 Masjid, 44, 83, 90, 97, 98, 118, 121,
 132, 134, 138, 139
 masyarakat, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32,
 33, 34, 35, 40, 41, 45, 48, 54, 57,
 58, 59, 63, 65, 67, 68, 71, 72, 75,
 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,
 89, 91, 93, 95, 96, 97, 102, 103,
 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112,
 113, 114, 116, 117, 118, 121, 122,
 123, 128, 131, 132, 133, 134, 135,
 136, 139, 143, 145
 Max Weber, 17
 Mayoritas, 30
 Menyama Braya, 117
 minoritas, 6, 30, 45, 53, 76, 85, 88,
 120, 122, 134, 135, 136, 142
mitoni, 87, 93, 144
 Monoisme, 35
 moral, 1, 8
 Muhammad, 40, 41, 42, 44, 49, 50,
 51, 54
 MUI, 77, 82, 131
 Nabi, 34, 37, 40, 43, 44, 49, 51, 53,
 54
 Nagarakertagama, 74
 neraka, 9
 nirwana, 11
 NKRI, 4, 30, 135
 NU, 79, 80, 83
nyadran, 92, 144
ogoh-ogoh, 88, 90, 120, 135
 Paguyuban, 16
 Palemahan, 137
parahyangan, 63, 118, 119, 121,
 122, 123, 124, 137, 143
 Parsons, 24
 Pawongan, 131
 Pecalang, 3
 pendidikan, 4, 12, 26, 76, 81, 84,
 102, 108, 113
 persaudaraan, 33, 47, 56, 61, 63, 64,
 69, 83, 85, 90, 131
 Pesantren, 5
 PHDI, 77, 79, 82, 87, 90, 98, 132,
 135
 plural, 8, 9, 23, 34, 47
 pluralisme, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
 40, 41, 44, 51, 52, 53, 65, 114, 145
 Pluralisme, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 48,
 51, 55, 65, 147, 148
 pluralitas, 34, 42, 46, 47
 politik, 1, 4, 12, 28, 29, 31, 32, 33,
 35, 36, 65, 103
punden, 82, 92, 93, 95, 97, 144
 Pura, 75, 78, 89, 91, 103, 105, 116,
 119, 120, 121, 124, 125, 126, 127,
 128, 129, 130, 135, 138, 139, 143,
 149
 rahmat, 9, 41, 45, 47
 ras, 3, 36, 41, 60
 realita sosial, 14, 17, 21
 religious, 1, 3, 35
 retorikan, 2
 revolusi, 22, 25
 Sang Hyang Widhi, 55, 56, 57, 58,
 60, 62
 Sang Pencipta, 9, 57
 sejarah, 7, 10, 11, 19, 41, 46, 71, 97,
 104, 128, 129, 133

Semi feodal, 9
Semi kolonialisme, 9
seputro, 93, 144
soleha, 93, 144
solidaritas, 12, 15, 22, 24, 63
sorga, 2, 9
struktural, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 21,
22, 24, 25
suku, 3, 8, 9, 12, 35, 36, 41, 46, 47,
64, 77
surga, 9, 11, 46
Syariah, 4
Tat Twam Asi, 63
teori, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 24, 26
terprovokasi, 28
tingkeban, 93
toleransi, 3, 5, 6, 11, 35, 47, 53, 57,
59, 74, 77, 89, 94, 119, 133, 135,
145
Toleransi, 53, 55, 66, 116, 117, 124,
148
Tri Hita Karana, 63, 64, 65, 104,
117, 134, 137
Tuhan, 4, 8, 11, 27, 37, 42, 52, 55,
63, 64, 82, 104, 107, 113, 116,
118, 127, 137
vertikan, 30
Weber, 18, 19, 20
Weda, 11, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 150
Yahudi, 36, 39, 40, 43, 49
Yayasan Trimurti, 5

SINOPSIS

Tulisan yang dicengkram oleh lambang negara Indonesia (Burung Garuda Pancasila) adalah “Bhineka Tunggal Ika”. Secara tekstual, setiap insan Indonesian tahu makna tersebut yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, juga tahu bahwa keberagaman diberbagai hal, termasuk keragaman keberagamaan adalah keniscayaan, kodrat yang harus kita terima. Tetapi dalam tatatan empirik masih banyak yang mengingkarinya, bahkan menginginkan untuk menyamakan, perbedaan adalah musuh dan harus dibinasakan, inilah yang menyebabkan terjadinya konflik. Konflik yang bersifat SARA, khususnya konflik agama masih terus terjadi di Indonesia, walaupun tidak bersifat *manifes*, tetapi bersifat *laten*. Di balik konflik yang terjadi, buku ini memberikan inspirasi bahwa masih terdapat butiran mutiara relasi harmonis kehidupan antar agama yang berasal dari masyarakat desa dengan pendidikan formal relatif renfah. Ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan seseorang tidak ada korelasi yang signifikan dengan tingkat kecerdasan sosial seseorang dalam menyikapi perbedaan.

Buku ini terdiri atas lima bab, yang secara berturut-turut akan membahas tentang kerukunan umat beragama, konflik agama, integrasi bangsa secara umum. Begitu juga konsep pluralisme agama dalam pespektif Agama Islam dan Hindu berdasarkan kitab suci masing-masing. Dan bagaimana mereka memanfaatkan berbagai kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi modal sosial dan budaya yang secara cermat mereka sikapi dan laksanakan sebagai media untuk berinteraksi harmonis dalam perbedaan.

Buku ini adalah hasil penelitian di kantong-kantong penganut Agama Hindu yang minoritas di wilayah Malang Raya dan minoritas penganut Agama Islam di Kabupaten Bangli, Bali. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa mereka bisa hidup dengan harmonis. Mereka saling menghormati, saling membantu dalam segala aktivitas baik yang menyangkut agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Karena itu buku ini bertajuk “Belajar Harmoni Beragama dari Desa” bisa menjadi pedoman masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan mengetahui bagaimana strategi yang mereka lakukan sehingga sampai sekarang bisa hidup dengan damai.

ISBN 9786024701796



9 786024 701796
Anggota IKAPI No. 059/JTI/89